

P

Majalah

Parlementaria



| Edisi : 139 TH. XLVI. 2016 |

TRAGEDI MUDIK YANG MEMILUKAN

GRATIS
TIDAK DIPERJUALBELIKAN

BREXIT, HANYA PINTU
KELUAR MINOR

8

PEMERINTAH SERIUS
LAKSANAKAN PROGRAM
TAX AMNESTY

32



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH
Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si.
(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si.
(Deputi Persidangan)

PIMPINAN REDAKSI
Drs. Suratna, M.Si.
(Karo Pemberitaan Parlemen)

WK. PIMPINAN REDAKSI
Dra. Tri Hastuti
(Kasubag Media Cetak)
Insan Abdirrahman, SH
(Kasubag Media Sosial)
Ahyar Tibi, SH
(Kasubag Analisis Media)

REDAKTUR
Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos

SEKRETARIS REDAKSI
Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto

ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati,
Muhammad Husen, Sofyan Efendi,
Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi,
Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra Sasmita, Iwan Armanias

FOTOGRAFER
Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Andi M. Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati,
Jayadi Maulana, Arief Rachman,
R. Kresno P. D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI FOTO
Hasri Mentari

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350
Fax. (021) 5715341,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com.
www.dpr.go.id/berita



sumbu foto: detik.com

PENERBITAN & DISTRIBUSI

PIMPINAN PENERBITAN
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP
(Kabag Penerbitan)

WK. PIMPINAN PENERBITAN
Mediantoro, SE
(Kasubag Produksi),
Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si
(Kasubag Distribusi)

STAF PRODUKSI

Eko Murdiyanto, Farid, SE, Barliansyah, Fathurahman,
Mujiono, Abdul Kahfi, S.Kom

SIRKULASI

Siti Rondiyah, Oji, Remon, Ifan
Telp: 021-571 5697, Fax: 021-571 5421
Email: penerbitandpr@gmail.com

Hubungi Bagian Penerbitan untuk permintaan hasil cetak dan distribusi (GRATIS)

Isi berita dan materi foto diluar tanggungjawab Bagian Penerbitan

PENGANTAR REDAKSI

Banyak catatan penting selama arus mudik 2016, meski terjadi kemacetan dimana-mana baik jalur selatan maupun jalur pantai utara (pantura) namun yang pantas disorot adalah di Brexit (pintu keluar tol Brebes Timur) karena terjadi kemacetan paling parah. Di sinilah terlihat manajemen pengaturan lalu lintas dan rekayasanya dinilai buruk.

Parlementaria edisi 139 kali ini menurunkan laporan utama soal evaluasi mudik lebaran karena kemacetannya paling parah dibanding sebelumnya. Bahkan menurut Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana, yang lebih memprihatinkan, kemacetan arus mudik kali ini tanpa antisipasi, tanpa informasi, dan tanpa suplai makanan-minuman untuk pemudik yang sakit. Belum lagi cuaca yang panas, kanan kiri hanya sawah, penerangan jalan minim, dan BBM sulit didapat. Semuanya tak terantisipasi. Saking parahnya ia menyebut inilah tiga hari yang “horor” di Brexit.

Kasus Brexit juga menghebohkan, tercatat 17 orang meninggal, belum lagi yang sakit, yang kehabisan bensin dan harus beli Rp 50 ribu per liter. Semua ini membuat pemudik tidak nyaman. Dengan sindiran halus, dia menyinggung tidak banyaknya kecelakaan. “Mungkin karena macet, jadi tidak banyak terjadi kecelakaan.”

Tiga fungsi utama DPR RI yaitu bidang pengawasan, legislasi, dan anggaran diturunkan laporan rutin diantaranya soal penculikan WNI oleh pemberontak Abu Sayyaf di Philipina, anggaran soal pengampunan pajak dan legislasi soal RUU RTRI.

Menanggapi penyanderaan yang hingga kini belum ada tanda-tanda pembebasan, Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari sangat menyayangkan, pasalnya sudah berkali-kali terjadi. Hal itu mengindikasikan bahwa negara lain cukup berani dengan Indonesia. Sehingga ini menjadi tantangan TNI untuk mampu mencium nyalinya mereka.

Ia pun mengharapkan peran diplomasi Menteri Luar Negeri sangat dibutuhkan agar Filipina mau menyelesaikan persoalan Abu Sayyaf ini. Jika Filipina bersedia, Indonesia siap untuk membantu, namun, hingga kini belum ada titik terang dari negara sesama anggota Asean itu. ■

IKUTI AKUN MEDIA SOSIAL DPR RI
Follow, Like & Subscribe

Facebook: DPR RI | Twitter: @DPR_RI | Instagram: @DPR_RI | YouTube: DPR RI

medsos@dpr.go.id | www.dpr.go.id

DAFTAR ISI

ASPIRASI	4
PROLOG	
Tragedi Mudik yang Memilukan	6
LAPORAN UTAMA	
Brexit, Hanya Pintu Keluar Minor	8
Tiga Hari yang “Horor” di Brexit	10
Tinggalkan Gengsi, Jalin Koordinasi	12
Catatan Penting untuk Jalur Mudik	14
Inventarisasi Masalah Harus Dilakukan	16
Batasi Penggunaan Kendaraan Pribadi	18
Berharap Zero Accident	19
Ada Salah Prediksi	20
Apa Kata Pemudik	22
SUMBANG SARAN	
Brexit, Perencanaan Tol (Seharusnya) Terintegrasi	24
PENGAWASAN	
Perlu Langkah Pasti Antisipasi Produk-produk Palsu	26
TNI Harus Mampu Ciutkan Nyali Perompak	30
ANGGARAN	
Pemerintah Serius Laksanakan Program <i>Tax Amnesty</i>	32
<i>Tax Amnesty</i> Sebagai Momentum Reformasi Perpajakan	34
LEGISLASI	
RUU Radio dan Televisi (RUU RTRI): Imbangi Siaran Asing dan Jaga NKRI	36
FOTO BERITA	40
KIAT SEHAT	
Vaksinomik, Paradigma Vaksin nan Futuristik	50
PROFIL	
Farid Alfauzi Magnet Politik Sang Santri Bangkalan	52
KUNKER	56
SOROTAN	
Hindari Klaim Negara Lain, Natuna Harus Dikembangkan	66
LIPUTAN KHUSUS	68
PERNIK	72
SELEBRITI	74
PARLEMEN DUNIA	76
POJOK PARLE	78



8 LAPORAN UTAMA



40 FOTO BERITA



72 PERNIK



74 SELEBRITI

Aspirasi Pendidikan dari Guru Aceh

Kami dari Dewan Presidium Koalisi Barisan Guru Bersatu Aceh, menyampaikan Rekomendasi hasil Rapat Kerja Koalisi Barisan Guru Bersatu Aceh di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai berikut :

Mendesak Pemerintah Provinsi Aceh Cq. Disdik Provinsi dan Disdik Kabupaten/Kota untuk :

Mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak dan menyediakan bantuan hukum gratis untuk para guru yang terkena kasus hukum terkait pelaksanaan tugas.

Mengeluarkan Regulasi tentang tanggung jawab masyarakat dan kewenangan kepolisian serta Satpol PP untuk menangkap anak-anak usia sekolah, yang berkeliaran pada jam sekolah.

Mengeluarkan Regulasi tentang larangan keras pengutipan dana dalam bentuk dan dengan alasan apapun di sekolah-sekolah negeri regular selain sekolah Boarding (sekolah berasrama) dan sekolah swasta.

Mempedomani Permendiknas No.28 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah, karena hal tersebut banyak dilanggar oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Mempensiunkan dini para guru usia lanjut yang sudah kurang proaktif dan produktif, karena faktor usia atau karena menderit sakit permanen yang berkepanjangan.

Menghentikan pemberian izin pendirian Lembaga Pencetak Tenaga Kependidikan (LPTK) Swasta serta

mengevaluasi keberadaan Kinerka dan Akreditasi LPTK Swasta.

Melakukan Koordinasi dengan pihak Perguruan Tinggi/ Lembaga Pencetak Tenaga Pendidikan (LPTK) Negeri dalam mencetak tenaga Kependidikan untuk menghindari terjadinya kelebihan guru untuk mata pelajaran tertentu.

Mengeluarkan Regulasi tentang jumlah standar maksimal siswa perrombel, Yaitu ; 24 orang siswa perkelas.

Menyarankan kepada Mendikbud agar :

- Menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di seluruh Indonesia untuk menghentikan segala bentuk kecurangan.
- Menambah jam pelajaran Bahasa Inggris di sekolah-sekolah Kejuruan, SMK dalam rangka menyambut Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).
- Memverifikasi dan mengangkat Tenaga Pendidik Honorer K-2 yang dianggap layak untuk menjadi CPNS sesuai mekanisme yang ada.
- Menyarankan kepada Menpan RB untuk merevisi UU Pengadilan Tata Usaha Negara agar Kepala Daerah yang tidak melaksanakan eksekusi Putusan PTUN mendapat Hukuman Pidana.

Sayuthi Aulia
Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam

Tindak Lanjut Konflik Tanah Warga Pidada Lampung

Saya adalah Ketua Tim Pancasila untuk Penyelesaian Konflik Tanah Warga Pidada Panjang, dan selaku wakil dari masyarakat Lingkungan II/III, Bandar Lampung.

Berdasarkan pengaduan warga Lingkungan II/ III, Kota Bandar Lampung, yang disampaikan oleh Tim Pancasila kepada Bapak Presiden RI, melalui TU. Kementerian ATR/BPN RI, atas pengaduan tersebut pada tanggal 14 Oktober 2015, Komisi Nasional Hak Azasi Manusia melalui Komisioner Dr. Ansori, Sinungan, SH, LLM, langsung turun ke Lingkungan II/III dan pada tanggal 15 Oktober 2015, melakukan sidak di Pemda Kota Bandar Lampung.

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015, Komisioner Komnas HAM melakukan mediasi, supervisi, dan investigasi terkait dengan pokok-pokok permasalahan dengan mengundang para pihak, PT. Pelindo II, BPN,

warga masyarakat melalui Tim Pancasila.

Tanggal 15 April 2016, Komnas HAM kembali melanjutkan mediasi, supervisi dan investigasi tertulis, dalam berita acara terlampir, dengan hasil adanya Inclave, atas tanah 5 Ha, untuk dikeluarkan dari gambar sertifikat HPL No.01/Way/lunik/1989, dan disertifikatkan kepada masyarakat Lingkungan II/III, Kelurahan Pidada.

Bahwa masyarakat menyambut baik rencana Inclave tersebut, dan berharap agar Pimpinan Komisi II DPR RI dapat mendorong mempercepat Inclave atas tanah perkampungan Lingkungan II/III, Kelurahan Pidada, tersebut dengan berkoordinasi dengan Komnas HAM RI dan Kementerian terkait

Nurrahman
Bandar Lampung, Lampung



Pengaduan Buruknya Kinerja PN Ambon

Saya terdakwa dalam perkara pencabulan terhadap anak di bawah umur, mengadukan mengenai buruknya kinerja PN Ambon terkait penanganan perkara tersebut. Barang bukti berupa celana dalam yang penuh dengan darah/sobek, tidak ada, serta hasil visum et reperthum pada saat peristiwa terjadi dikatakan luka lama.

Dalam pemeriksaan persidangan, terdapat barang bukti yang tidak ditunjukkan.

Sebagai terdakwa dituntut 7 (tujuh) tahun penjara, dan oleh Hakim diputus 6 (enam) tahun penjara. Atas putusan tersebut saya mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi memutus hukuman menjadi 7 tahun, saya mengajukan kasasi.

Pada saat mengajukan kasasi, diduga telah terjadi rekayasa yang di lakukan oleh Sdr. Daud Samadara (individu kepaniteraan) yaitu tidak mengirimkan memori kasasi pada saat penyerahan akta, tetapi pada hari ke-14 (batas akhir) pengajuan kasasi dan mewajibkan pengajuan kasasi dengan diketik, sehingga kasasi ditolak. Selain itu dalam Amar Putusan terindikasi kebohongan karena tidak mungkin Ketua bersama Hakim Tinggi serta Panitera membuat putusan seperti yang tertera pada amar putusan salinan yang ada pada terdakwa dan melanggar kode etik.

Saya memohon agar Komisi III DPR RI membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Maxmiliam Tupamahu
Ambon, Maluku

Permohonan Bantuan Monitoring Pencalonan Kades

Saya Wakil Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tegal, mengajukan permohonan bantuan monitoring atas perkara penggunaan dokumen palsu pada pencalonan Kepala Desa, yang saat ini sedang dalam proses penyidikan.

Bahwa Hj. Siti Mashita Soeparno diduga menggunakan ijasah palsu dalam proses pemenuhan persyaratan pencalonan Kepala Desa sebagaimana laporan Nomor 75/B/Sek/IX/1436 H yang dilayangkan kepada Kepala Badan Reserse dan Kriminalitas Kepolisian Indonesia, dan perkara tersebut saat ini sedang dalam proses penyidikan.

Adapun bukti adanya pemalsuan dokumen oleh yang bersangkutan terkait pencalonannya sebagai Kepala Desa, antara lain yaitu bahwa NPWP atas nama yang bersangkutan baru terdaftar pada tanggal 25 Februari 2011, sehingga patut diduga isian Form SPT tahun pajak 2008 dan tanda terima SPT tahun 2010 untuk tahun Pajak 2009, dan tanda terima SPT tahun 2011 untuk tahun Pajak 2010, mencantumkan NPWP yang berbeda.

Demikian pula dokumen yang terkait dengan ijasah/STTB atau pengganti ijasah/STTB pada semua tingkat pendidikan yang dinyatakan dalam surat pernyataan bahwa dokumen tersebut belum ditemukan, namun tidak dilengkapi dengan surat kehilangan dari instansi yang berwenang.

Kami memohon Ketua Komisi III DPR RI membantu memonitor kasus ini.

Wahyu Hidayat
Tegal, Jawa Tengah

Permohonan Penugasan Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Bintan

Saya mewakili Warga Kelurahan Kijang Kota, ingin menyampaikan bahwa Kabupaten Bintan membutuhkan penegak hukum yang mampu menindak kejahatan yang dilakukan oleh penguasa dan pengusaha.

Di Kabupaten Bintan banyak peristiwa kejahatan melawan hukum dan perundang-undangan yang ancamannya diatas 5 (lima) tahun penjara, serta

mudah dilakukan operasi tangkap tangan, tanpa melakukan penyadapan maupun laporan masyarakat.

Kejahatan yang dimaksud beranekaragam yang dilakukan oleh penguasa dan tokoh masyarakat dengan bukti-bukti nyata. Demikian mohon dilakukan pengawasan dan penyidikan

Rasyid
Bintan, Kepulauan Riau



TRAGEDI MUDIK YANG MEMILUKAN

Salah prediksi, minim koordinasi, dan tak ada rekayasa lalu lintas yang efektif. Jadilah kemacetan yang luar biasa di mana-mana. Keluh kesah dari kesaksian para pemudik tercurah tiada henti. Inilah kemacetan arus mudik paling fenomenal.

Rabu, 27 Juli sedianya akan ada rapat evaluasi arus mudik 2016 di ruang Komisi V DPR RI. Tak dinyana, rapat urung digelar, lantaran ada pengumuman *reshuffle* kabinet di Istana Negara. Dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dilengserkan. Penggantinya adalah Budi Karya Sumadi. Dan bicara evaluasi arus mudik berarti bicara Brebes exit (Brexid). Nama yang sangat populer selama arus mudik. Brexid adalah pintu keluar tol di Brebes Timur. Inilah titik krusial kemacetan.

Kritik tajam bersahutan, tidak saja dari gedung parlemen, tapi juga pengamat dan masyarakat pemudik. Ada apa dengan Brexid? Komisi V DPR RI sebetulnya sudah melakukan penyisiran atas jalur mudik sepanjang Pantura, termasuk Brebes Timur. Semua *stakeholder* hadir memberi penjelasan, baik Kemenhub, Korlantas, dan pengelola jalan tol. Semua bisa meyakinkan delegasi Komisi V yang hadir meninjau jalur mudik.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana yang memimpin delegasi

mengungkapkan, titik kemacetan sudah bisa terprediksi sebelumnya. Pada arus mudik yang lalu, diprediksi akan ada 120 ribu kendaraan masuk tol Cikampek. Dan sudah ada rencana rekayasa lalu lintas, baik yang ke Pantura maupun ke Bandung, utara dan selatan.

Tiba di Brexit, tim Komisi V sudah memberi catatan penting. Pertama, median jalan (blok pembatas di sisi jalan) ternyata warnanya sama dengan permukaan jalan. Ini membuat para pengemudi terkecoh, karena media jalan itu dikira permukaan jalan yang datar. Terbukti, saat arus mudik terjadi, median jalan sepanjang Brexit banyak tergores dan pecah akibat tertabrak mobil. Rest arenya juga banyak yang belum layak pakai.

Ternyata, prediksi dan rencana rekayasa lalu lintas tidak sesuai kenyataan. Kemacetan mengular di mana-mana. Di Brexit para pemudik dikepung kemacetan parah puluhan jam. Tak bisa bergerak, udara panas menyengat, asap knalpot menebar polusi, toilet tak ada, dan SPBU terlalu jauh dijangkau. Stres menyelimuti pemudik. Apalagi, mayoritas pemudik sedang berpuasa. Tercatat, 17 pemudik meninggal dunia karena sakit dan kelelahan. Tragedi mudik yang memilukan.

Catatan kritis juga disampaikan Anggota Komisi V Novita Wijayanti. Masyarakat kerap tergoda untuk mencoba hal baru, termasuk jalan tol. Politisi Partai Gerindra ini juga mudik ke Cilacap melewati jalur Cikampek, Cipali, Brebes, Grobogan, dan Purwokerto. Ia merasakan lelahnya menghadapi kemacetan.

“Setelah saya mengamati, banyak yang harus disempurnakan di sepanjang jalan tol. Akses tol dari Cikampek hingga Purwokerto, minim kelokan untuk memutar arah. Median pembatas jalan di kanan juga terlalu panjang. Jadi, saat terjebak macet, banyak kendaraan numpuk di situ, tak ada akses keluar hingga terkurung di tengah kemacetan parah,” ungkap Novi.

Soegeng Poernomo dari Masyarakat

Transportasi Indonesia (MTI), mengusulkan, perlu ada *re-timing* arus mudik. Penduduk di Jabodetabek yang ingin mudik diatur keberangkatannya berdasarkan wilayah. Misalnya, penduduk Karawang dan Bekasi Timur diimbau pulang H-4. Kemudian Bekasi Barat dan Jakarta bagian timur pulang pada H-3. Tujuannya, agar bisa lolos dari kemacetan. Ini yang namanya *re-timing*.

“Bisa juga *re-timing* itu mengumumkan penduduk Bekasi Timur berangkat H-3 pagi. Lalu, penduduk Bekasi Barat yang mudik ke arah timur bisa siang hari. Sementara penduduk Jakarta mudik setelah jam buka puasa. Jadi 24 jam dibagi 4 (pagi, siang, sore, malam). Kira-kira setiap 6 jam. Itu saya kira akan memecah arus.”



Pemerintah juga tidak pernah melakukan *traffic management* terhadap rekayasa lalu lintas dalam arti yang sebenarnya. Itu sebabnya saya merasa heran kalau Korlantas dengan mudahnya menyatakan telah melakukan rekayasa lalu lintas



Perspektif lain juga disampaikan Anggota Komisi V lainnya Rendy M. Affandy Lamadjido. Menurutnya, perlu ada inventarisasi masalah setiap kali menghadapi mudik. “Saya belum melihat pemerintah melakukan inventarisasi masalah, mulai dari *seat* atau tempat duduk, *traffic management*, dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan,” katanya.

Inventarisasi masalah dilakukan untuk mengetahui secara pasti berapa besaran jumlah masyarakat yang melakukan mudik lebaran dengan transportasi umum, dengan menggunakan motor, dan berapa masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi. Di tol Cipali, misalnya, belum ada *traffic management*. Pemerintah membiarkan semua orang masuk melalui tol Cipali. Akibatnya, dapat dipastikan terjadi kemacetan.

Penumpukan dan perlambatan laju kendaraan yang melintas pun terjadi. “Pemerintah juga tidak pernah melakukan *traffic management* terhadap rekayasa lalu lintas dalam arti yang sebenarnya. Itu sebabnya saya merasa heran kalau Korlantas dengan mudahnya menyatakan telah melakukan rekayasa lalu lintas,” tandas politis PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, kesaksian para pemudik menyisakan kisah duka. Mereka betul-betul tersiksa terkurung di tengah kemacetan Brexit. Karena macet puluhan jam tak bergerak, bensin kendaraan pun menipis. Penduduk setempat melihat peluang bisnis di tengah penderitaan para pemudik. Bensin diajakan ke tengah kerumunan macet. Harganya fantastis, mulai dari Rp12 ribu sampai Rp50 ribu per liter.

Belum lagi, pemudik yang *kebelet* pipis. Penduduk setempat juga membuatkan toilet darurat dengan harga melangit. Jasa menggunakan toilet dipatok Rp10 ribu per orang. Argumen mahalnya tarif toilet, lantaran airnya diambil dari Kota Tegal. Begitu pengakuan para penjaga toilet. Sempat terjadi tawar menawar di muka pintu toilet dengan sang penjaga. Untuk empat orang yang mestinya Rp40 ribu, ditawar Rp28 ribu. *Deal* terjadi, satu per satu pun bisa masuk toilet.

Begitulah kisah di balik kemacetan mudik. Sedih, lelah, stres, lapar, panas, dan jenuh, tumpah ruah di Brexit yang “horor”. Mudik yang tadinya merupakan tradisi kultural dan ritual, berubah jadi duka kolosal. Inilah tragedi mudik paling memilukan. ■



foto: kopertis12.or.id

Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR RI

Brexit, Hanya Pintu Keluar Minor

Keputusan politik sudah dikeluarkan Presiden Joko Widodo sebelum arus mudik terjadi. Pintu keluar Brebes Timur atau yang populer disebut Brexit dibuka sebagai pintu keluar bagi para pemudik. Sayangnya, keputusan politik ini minim koordinasi dan perencanaan. Akibatnya, kendaraan pemudik tumpah ruah di Brexit, tak bergerak hingga berjam-jam.

dari Parleментарia. Dalam wawancara eksklusifnya, ia mengatakan, kemacetan arus mudik tahun ini adalah yang terparah. Berikut ini petikan wawancara lengkapnya.

Evaluasi apa yang bisa Anda sampaikan terhadap arus mudik 2016?

Kekurangan kita pada taraf pelaksanaan. Keputusan politik sudah dikeluarkan Presiden bahwa arus mudik melewati Brebes Timur. Ya, itu harus dilaksanakan oleh jajaran kementerian-kementerian terkait. Yang jadi sorotan adalah koordinasi. Kegaduhan dan kejadian yang sangat memilukan, diakibatkan lemahnya koordinasi. Dalam koordinasi mestinya dibuat strategi yang holistik agar berjalan sesuai dengan Keputusan Presiden bahwa keluarnya di Brebes Timur atau Brexit.

Brexit ini adalah pintu keluar yang minor. Jalan tol menuju Brexit pun menggunakan jalan yang kecil. Memang ada dua lajur, jalur keluar dan masuk. Diperlukan strategi supaya yang keluar itu tidak seluruhnya di Brexit. Kalau semua keluar di Brexit tentu akan *stag*. Begitu *stag*, Brebes pun tak bisa menampung, karena merupakan kota kecil. Pasti infrastrukturnya juga belum memadai, sehingga macet sampai berhari-hari. Ini menandakan langkah koordinasi yang buruk. Di sinilah diperlukan strategi holistik.



Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto

foto: kresno/iw

Brebes hanya kota kecil. Fasilitas infrastrukturnya pun minim. Tak mungkin menerima lonjakan kendaraan yang begitu banyak, karena akses jalannya sempit. Inilah yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto kepada reporter M. Husen dan fotografer Kresno Moempoeni

Brebes Timur sebetulnya hanya untuk masuk Semarang dan Jakarta. Tidak boleh terlalu banyak kendaraan yang masuk. Sebagian harus diarahkan ke Brebes Barat, Cirebon, Palimanan, dan sebagainya. Walaupun tetap ada kemacetan, tapi bisa diatasi.

Sementara untuk jalur penerbangan, saya sempat ke Angkasa Pura I Semarang. Saya juga ke terminal Tawang, ke terminal Poncol, dan terminal Terboyo. Saya memberikan arahan di sana. Kelihatannya untuk stasiun kereta di stasiun Poncol dan Tawang cukup siap untuk menerima lonjakan arus balik dan mudik. Jadi, begitu keluar bisa di-screening dan bisa langsung ke tempat masing-masing. Kalau penerbangan sudah ditata sedemikian rupa. Kalau pun terjadi penumpukan penumpang, itu hal biasa.

Transportasi massal kita masih bermasalah. Mayoritas pemudik masih menggunakan kendaraan pribadi?

Banyak alasan soal itu. Mungkin pemudik ingin kemudahan bertransportasi saat di kampung halaman. Selain itu, ada rasa kebanggaan, kalau dia datang dengan kesuksesannya. Yang penting, pemerintah harus mempersiapkan jalur mudik secara matang, disiapkan strategi yang

Brebes Timur sebetulnya hanya untuk masuk Semarang dan Jakarta. Tidak boleh terlalu banyak kendaraan yang masuk. Sebagian harus diarahkan ke Brebes Barat, Cirebon, Palimanan, dan sebagainya.



Pintu keluar tol Brebes Timur

holistik dan tepat, sehingga tidak terjadi kemacetan.

Kalaupun ada kemacetan harus bisa diurai. Kemarin itu tidak bisa diurai, karena jajarannya kurang siap, kurang koordinasi, dan tidak membuat *planning* yang jelas.

Bagaimana seharusnya membagi arus mudik agar tak menumpuk di Pantura. Ada jalur selatan yang juga bisa dilalui?

Pemerataan pembangunan memang harus diterapkan. Selama ini, jalur Pantura yang selalu direhab karena ada kerusakan. Namun, jalur selatan juga cukup bagus dan harus dikelola. Kenapa orang lebih memilih Pantura, karena jalurnya lebih mudah dilalui dan banyak fasilitas tol. Bahkan, rencananya ada akses tol Jakarta-Surabaya. Menurut saya, seluruhnya harus ditingkatkan, baik jalur utara maupun selatan.

Infrastruktur jalan selalu tak seimbang dengan volume kendaraan. Apa yang terjadi?

Volume kendaraan meningkat dengan pesat. Infrastruktur juga harus ditingkatkan jauh lebih cepat lagi. Selama ini peningkatan infrastruktur selalu ketinggalan dengan jumlah kendaraan. Ini tugas pemerintah. Untuk itu, tol Jakarta-Surabaya harus selesai. Begitu juga di Sumatera. Dari Lampung lewat Merak terus Jakarta, Semarang, Solo, Surabaya,

Banyuwangi, sampai Bali, bisa betul-betul terkoneksi. Namun, ini memerlukan waktu. Tapi, paling tidak lebaran tahun depan Jakarta ke Semarang bisa terlampaui.

Bagaimana proyeksi arus mudik tahun depan?

Sebenarnya macet yang terparah itu sekarang. Sebelumnya, saya pulang kampung selalu bawa kendaraan. Macet memang, tapi bisa teratasi. Kemarin macetnya tidak bisa teratasi. Ini kesalahan sistem dan perencanaan. Perbaikan-perbaikan harus dilakukan. Kami mendorong pemerintah supaya lebih cepat menuntaskan infrastruktur.

Kalau sudah ada Keputusan Presiden untuk *exit* di Semarang, aparat di bawahnya harus siap dengan kapabilitas dan koordinasinya.

Fasilitas pemudik dirasa kurang terutama di jalan tol Brebes saat menghadapi kemacetan?

Brebes atau di Brebes Timur, memang, tidak diperuntukkan untuk *exit*. Ini hanya salah satu keluaran menuju kota Tegal. Infrastrukturnya juga tidak memadai. Jangankan *rest area*, akses jalannya saja kecil untuk menuju ke sana. Ini, kan, kota kecil. Akhirnya, tidak mampu dan tidak dipersiapkan untuk menampung lonjakan pemudik. Kelak, bila sudah ada keputusan politik dari Presiden, ke bawahnya harus benar-benar menjalankan hal-hal yang terbaik. ■

foto : andri/iw

(mh)

Yudi Widiana, Wakil Ketua Komisi V DPR RI

Tiga Hari yang “Horor” di Brexit



Antrean kendaraan yang hendak keluar melalui pintu tol Brebes Timur mengular hingga puluhan kilometer

Banyak catatan penting yang disampaikan Komisi V DPR RI selama arus mudik 2016. Di *Brexit* (pintu keluar tol Brebes Timur) jadi titik kemacetan paling parah. Di titik inilah catatan dan evaluasi kritis disampaikan. Manajemen pengaturan lalu lintas dan rekayasanya dinilai buruk.

Parlementaria bertandang ke

ruang Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana untuk membincang pantauan arus mudik berikut evaluasinya. Komisi V sendiri sudah menyisir infrastruktur sepanjang Pantura dari Jakarta hingga ke Jawa Timur. Titik kemacetan sudah terprediksi sebelumnya.

Dimulai dari Cawang sampai ke km 67 ditemukan banyak batuan

yang naik. Di JORR dari arah Serpong ada 3 jalur, Cawang 4 Jalur, dan Tanjung Priok 2 jalur. Jadi total 9 jalur. Sementara keluarnya hanya tersedia 4 jalur. “Kami sudah memberikan rekomendasi dan mendukung Jasa Marga maupun Korlantas untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Rekayasanya dari Serpong diarahkan ke Tanjung Priok, sehingga keluarnya hanya tinggal 2 ditambah 4, jadi 6 jalur,” jelas Yudi.

Masuk ke Cipali, relatif lebih baik daripada tahun sebelumnya. Komisi V mendapat informasi dari otoritas setempat bahwa pada *peak season* (musim liburan) diperkirakan ada 120 ribu kendaraan yang akan masuk tol Cikampek. Sudah ada rekayasa pembelahan arus mudik saat itu, baik ke Pantura maupun Bandung. Jadi terbagi ke jalur utara dan selatan.

Tiba di *Brexit*, tim Komisi V sudah memberi catatan penting. Pertama, median jalan (blok pembatas di sisi jalan) ternyata warnanya sama dengan permukaan jalan. Ini akan membuat para pengemudi terkecoh, karena media jalan itu dikira permukaan jalan yang datar. Terbukti, saat arus mudik terjadi, median jalan sepanjang *Brexit* banyak tergores dan pecah akibat tertabrak mobil. Rest arenanya juga banyak yang belum layak.

Yudi mengungkapkan, di *Brexit* ada 3 jalur plus bahunya 1 jalur, jadi 4 jalur. Tapi jalur keluarnya hanya satu plus bahunya. Ini berpotensi menimbulkan kemacetan parah. Saat kendaraan pemudik ingin keluar, terbukti *Brexit* tak siap menampung lonjakan arus kendaraan yang begitu

banyak. Akibatnya macet hingga puluhan kilometer. Pemudik pun terkurung di Brexite dan tak bisa keluar untuk beralih jalur.

“Tetapi kami melihat Brexite lebih baik daripada Pejagan. Begitu keluar Pejagan ke kiri, ada pintu kereta. Kalau Brexite, begitu keluar keretanya di bawah, karena ada flyover,” ungkap politis PKS ini yang ditemui akhir Juli lalu.

Mengomentari soal semrawutnya kemacetan pada arus mudik kali ini, Yudi menilai, ternyata manajemen pengaturan lalu lintasnya kurang baik. Pemerintah, kata Yudi, cenderung membiarkan masyarakat

menggunakan jalur Pantura, tanpa pengaturan dan informasi yang memadai. Akibatnya, Jumat malam (4 Juni) dua hari sebelum lebaran, terjadi kemacetan yang luar biasa. Begitu juga pada Sabtu dan Minggu (5-6 Juni), kemacetan mengular tak terkendali.

Rekayasa lalin tak segera dilakukan ketika kendaraan pemudik numpuk di Brexite. “Ketika terjadi kemacetan itu, kami lihat rekayasa lalu lintasnya lambat. Selasa saya mendapatkan informasi, bahwa sudah 1,5 juta kendaraan meninggalkan Jakarta dalam 3 hari. Artinya, terjadi lonjakan yang luar biasa. Tidak ada upaya melakukan tindakan antisipasi,” papar Yudi lagi.

Mestinya, saat kendaraan para pemudik masuk Pantura, sudah ada pencegahan di Cikampek terutama di km 67 untuk memecah arus kendaraan ke jalur lain. Dengan memecah arus, setidaknya *fifty-fifty* arus pemudik terbagi. “Ini malah semua dipersilakan masuk. Dapat dibayangkan, kemacetan sampai 20 km antara Brexite dan Pejagan. Hampir 170 ribu kendaraan yang terjebak di situ. Kalau dikalikan rata-rata 1 mobil 4 orang, jadi

hampir 600 ribu manusia sepanjang 20 km,” keluh Yudi.

Kemacetan arus mudik kali ini tanpa antisipasi, tanpa informasi, dan tanpa suplai makanan-minuman untuk pemudik yang sakit. Belum lagi cuaca yang panas, kanan kiri hanya sawah, penerangan jalan minim, dan BBM sulit didapat. Semuanya tak terantisipasi. “Inilah tiga hari yang ‘horor’ di Brexite. Untung saja tidak terjadi kerusakan. Bila ada satu saja mobil yang dibakar, bisa menyulut kerusakan lebih luas,” ucap Yudi.

Selama libur lebaran, Brexite jadi sorotan dan perbincangan luas, tidak saja di dalam negeri, tapi juga dunia internasional. Walaupun secara umum angka kecelakaan menurun, tapi peristiwa 17 pemudik yang meninggal karena kemacetan jadi sorotan tersendiri. Ini belum yang sakit di perjalanan.

“Tahun sebelumnya, di Ciawi karena kemacetan 11 jam ada yang meninggal dan yang melahirkan, tetapi tidak heboh. Di Brexite ini menghebohkan. Tercatat 17 orang meninggal, belum lagi yang sakit, yang kehabisan bensin dan harus beli Rp 50 ribu per liter. Semua ini membuat pemudik tidak nyaman. Mungkin karena macet, jadi tidak banyak terjadi kecelakaan,” ujar politisi dari dapil Jabar IV itu. ■

(mh/dep)



Ketika terjadi kemacetan itu, kami lihat rekayasa lalu lintasnya lambat. Selasa saya mendapatkan informasi, bahwa sudah 1,5 juta kendaraan meninggalkan Jakarta dalam 3 hari. Artinya, terjadi lonjakan yang luar biasa. Tidak ada upaya melakukan tindakan antisipasi.



Wakil Ketua Komisi V DPR RI, **Yudi Widiana**

Michael Wattimena, Wakil Ketua Komisi V DPR RI

Tanggalkan Gengsi, Jalin Koordinasi

Saling lempar tanggung jawab terjadi antar-kementerian dan lembaga. Kemacetan arus mudik dibumbui ego sektoral. Koordinasi pun terabaikan.

Data Kementerian Perhubungan RI mempehitungkan ada peningkatan dan penurunan jumlah penumpang angkutan umum 2016, dari sejumlah moda transportasi yang digunakan mulai tujuh hari sebelum hingga sesudah Lebaran. Perkiraan total

penumpang untuk periode tahun ini sebanyak 17.698.484 penumpang.

Sedangkan data dari Kepolisian RI jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi pada tahun ini diprediksi mencapai 2,4 juta kendaraan. Sedangkan untuk sepeda motor diperkirakan berjumlah 5,6 juta kendaraan.

Merespon hal ini Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena merasa semak hati, di satu sisi transportasi publik belum mencukupi kebutuhan kunjungan silaturahmi, namun di sisi lain pemerintah bertanggungjawab menekan angka penggunaan kendaraan pribadi, yang sering kali membuat lalu lintas tidak rapi.

“Kalau masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi, pertanyaan kritisnya adalah, apakah fasilitas publik itu sudah layak untuk dipakai, dan apakah memang tersedia,” keluh politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Dia memaparkan alasan dari keluhan kesahnya, permintaan masyarakat dalam penggunaan kereta api cukup tinggi. Namun ketersediaan transportasi ini nyatanya tidak mampu memenuhi hajat masyarakat banyak. Untuk sarana transportasi bus umum pun dinilainya masih belum menjadi pilihan, karena masyarakat masih merasa kurang nyaman dengan transportasi massal ini. Terlebih lagi

dengan penggunaan pesawat terbang, banyak masyarakat yang belum mampu menjangkau biaya tiketnya.

“Kebutuhan untuk menggunakan moda transportasi kereta itu, kan, banyak, tetapi sarananya terbatas, sehingga tidak mungkin dia akan menggunakan kereta. Sementara transportasi darat yang lain seperti bus juga terbatas, bahkan dengan harga yang signifikan. Dan transportasi udara lebih gila lagi. Dengan harga tiket yang sangat tinggi, itu, kan, sulit dijangkau oleh semua masyarakat,” papar Michael.

Menurut data dari Kemenhub peningkatan penumpang yang terjadi pada moda kereta api diprediksi sebesar 4,63 persen, dari 3.931.712 pada tahun lalu, menjadi 4.113.867 tahun ini. Untuk moda jalan, Kemenhub memperhitungkan jumlah penumpang tahun ini sebanyak 4.328.337 penumpang. Jumlah ini berkurang sebanyak 7,87 persen dibanding periode yang sama pada 2015, yakni 4.697.945 penumpang.

Adapun penumpang dengan moda penyeberangan laut diprediksi naik sebesar 3,54 persen atau sebanyak 3.698.042. Tahun lalu sebanyak 3.572.103 penumpang. Sedangkan moda udara, ada kemungkinan naik 7,62 persen dari 4.319.134 menjadi 4.648.047 penumpang.



Wakil Ketua Komisi V DPR RI, **Michael Wattimena**



Akibat dari kemacetan menimbulkan korban 12 jiwa, tetapi menurut informasi yang kami dengar, dari 12 itu, kan, ada lima yang tidak ada riwayat penyakit sama sekali. Sehingga harapan kita ke depan proses ini tidak akan terulang lagi, seperti tol Brexit yang dimaksud.



Fenomena tol Brebes Timur atau yang populer disebut Brexit pada arus mudik Lebaran 2016 juga menjadi perhatian Michael. Dia mengharapkan kemacetan yang berlangsung selama berjam-jam akibat padatnya arus lalu lintas tidak terulang lagi. Fakta yang sulit dihindari dari tragedi ini adalah, tewasnya 12 orang di jalur tersebut. Masalah ini tentu menjadi aib penyelenggaraan mudik Lebaran 2016.

“Tetapi memang ada juga hal-hal yang masih dirasakan kurang oleh masyarakat, contohnya yang paling fenomenal, Brebes exit. Akibat dari kemacetan menimbulkan korban 12 jiwa, tetapi menurut informasi yang kami dengar, dari 12 itu, kan, ada lima yang tidak ada riwayat penyakit sama sekali. Sehingga harapan kita ke depan proses ini tidak akan terulang

lagi, seperti tol Brexit yang dimaksud,” harap Michael.

Menurutnya kekacauan lalu lintas yang terjadi di Tol Brebes Timur ini salah satu akibatnya adalah luputnya koordinasi antar lembaga yang bertanggungjawab dalam penanganan kemacetan. Michael berharap, agar lalu lintas mudik dan balik di tahun yang akan datang bisa berjalan dengan lancar. Hendaknya antar lembaga menanggalkan gengsi.

Menurutnya koordinasi antara pemangku kepentingan akan berhasil, jika komunikasi antara Kementerian Perhubungan, Polisi Lalu Lintas, dan penyedia infrastruktur jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan petugas

jalan tol terjalin dengan baik.

“Padahal koordinasi antara kementerian dan lembaga ini penting untuk menghindarkan ego sektoral masing-masing kementerian atau lembaga. Peristiwa yang terjadi di Brebes exit itu banyak yang saling melempar kesalahan,” ujar Michael.

Dia mengungkapkan ada pihak yang mengatakan tol Brebes Timur semestinya belum saatnya digunakan, sehingga kesalahan bisa dilemparkan ke Kementerian PUPR. Namun, ada juga yang beranggapan, kalau sudah digunakan maka kelalaian ada pada proses rekayasa lalu lintas. “Satu hal yang sulit dikerjakan di Republik ini adalah soal aspek koordinasi,” imbuhnya. ■

(eko)



Novita Wijayanti, Anggota Komisi V DPR RI

Catatan Penting untuk Jalur Mudik

Mudik jadi tradisi khas masyarakat Indonesia. Memasuki mudik Lebaran, banyak infrastruktur jalan dibangun. Dan masyarakat selalu tergoda mencoba jalur baru yang ternyata menjebak dalam kemacetan parah. Perbaikan arus mudik perlu segera dibenahi.

Parlementaria bertandang ke ruang kerja Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti. Ramah menyambut, Novi menyediakan waktu untuk sesi wawancara eksklusif di sela-sela kesibukannya sebagai anggota dewan. Berbincang pengalaman mudik sekaligus sebagai Anggota Komisi V DPR, tentu banyak hal disampaikan sekaligus catatan penting sepanjang jalur mudik 2016. Komisi V sebenarnya sudah menyalisir jalur mudik yang dilalui para pemudik jauh sebelumnya. Saat dipantau, semuanya baik sesuai laporan Kemenhub, Kemen PUPR, dan Korlantas. Akses tol yang baru di Brebes Timur atau yang populer disebut Brexit juga tak luput dari pantauan. Dan masyarakat selalu punya kecenderungan ingin mencoba akses tol baru untuk mengejar waktu.

“Saya juga berpikiran begitu, ingin mencoba alternatif tol baru ini. Setelah dilalui, ternyata macet sekali, hingga mengakibatkan 17 orang meninggal karena terjebak kemacetan. Kebetulan saya mudik

tanggal 30 Juni dan selalu lewat darat pada malam hari. Jalan masih relatif lancar. Memasuki tanggal 1 Juli, mulai ramai sekali. Bahkan, pegawai saya yang pulang ke Banjarnegara pada minggu pagi, ternyata tiba Selasa malam,” aku Novi, mengisahkan arus mudik.

Jakarta-Banjarnegara pada musim mudik harus ditempuh 3 hari 2 malam dari yang seharusnya 7 jam. Politisi Partai Gerindra ini menyaksikan dan merasakan betul bagaimana

kemacetan selama arus mudik berlangsung. Dan Novi melihat dari dekat kegelisahan para pemudik saat terjebak macet

di Brexit. Ketika pulang kampung ke Cilacap dan Banyumas di selatan Jawa, dia mengaku selalu melewati jalur Cikampek, Cipali, Brebes, Bumiayu, Purwokerto, Grobogan. Banyak catatan penting dan kritis disampaikan Novi untuk arus mudik tahun ini.

“Setelah saya mengamati, banyak yang harus disempurnakan di sepanjang jalan tol. Akses tol dari Cikampek hingga Purwokerto, minim kelokan untuk memutar arah. Median pembatas jalan di kanan juga terlalu panjang. Jadi, saat terjebak macet, banyak kendaraan numpuk di situ, tak ada akses keluar hingga terkurung di tengah kemacetan parah,” ungkap Novi.

Perlu dibuka akses darurat di tengah jalan tol, agar pemudik bisa berbalik arah menghindari jebakan macet berjam-jam, bahkan berhari-hari di ruas tol. Yang ada, sambung Novi, justru kanan kiri tertutup oleh median pembatas jalan yang begitu panjang. Terkurung dalam kemacetan, hingga mobil pemudik kehabisan bahan bakar. Ini yang tak terantisipasi dengan baik. SPBU tak terjangkau karena terlalu jauh. Truk penyuplai BBM juga terjebak macet.

Catatan lainnya adalah posko kesehatan pemudik masih minim. Apalagi, mobil ambulance juga tak bisa masuk menembus barikade kemacetan. Yang paling mungkin adalah dengan mengoperasikan helikopter di tengah kemacetan. Tapi, itu butuh helipet. Korban sudah terlanjur berjatuh dan otoritas jalan raya tak mampu berbuat banyak mengurai kemacetan dan menolong para pemudik yang sakit



Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti



Perlu dibuka akses darurat di tengah jalan tol, agar pemudik bisa berbalik arah menghindari jebakan macet berjam-jam, bahkan berhari-hari di ruas tol. Yang ada justru kanan kiri tertutup oleh median pembatas jalan yang begitu panjang.



dan meninggal dunia.

Jalan tol yang lurus membentang, tentu membuat pengemudi lelah dan jenuh. Ini yang kurang diantisipasi oleh otoritas jalan raya. "Biasanya kalau trek lurus, orang, kan, gampang capek dan ngantuk, sehingga diperlukan rest area dan posko kesehatan. Pasti banyak anak kecil dan orangtua yang kelelahan. Yang sehat bisa sakit, apalagi yang dalam kondisi sakit," keluh Novi.

Rest area perlu diperbanyak. Rest area yang selama ini tak aktif, bisa diaktifkan kembali selama arus mudik berlangsung. Keberadaan rest area sangat menolong para pemudik untuk beristirahat dan menyelamatkan yang sakit. Selain itu, jalur alternatif perlu diperbanyak ke seluruh penjuru. Jadi, kata Novi, pemudik tidak harus melulu lewat tol, bila ada akses alternatif yang lebih baik dan

cepat. "Ini harus dipetakan dengan benar. Dibuat jalur alternatif ke jalan-jalan kecil. Bisa juga jalan tolnya ditambah.

Jalan layang (flyover), tambah Novi lagi, perlu dibangun di titik pertemuan dengan rel kereta. Yang ditemukan selama arus mudik kemarin, banyak sekali rel kereta bersinggungan dengan akses keluar tol dan jalan raya. Ini menjadi titik kemacetan tersendiri. Pintu kereta telah menyumbang waktu kemacetan yang lumayan signifikan.

"Bayangkan saja, perlu beberapa menit untuk menunggu lintasan dibuka. Dan titik rel kereta ini banyak. Di Brebes-Purwokerto saja ada 5 titik pintu rel kereta. Jadi, flyover yang dibangun di perlintasan rel kereta api, bisa membuat arus tetap lancar. Kereta api pun bisa bolak-balik di bawah flyover dengan lancar."

Tarif nominal tol jadi sorotan lainnya. Pembayaran jasa tol yang ditetapkan dengan tarif nominal angka ganjil, seperti Rp 55.500, telah menyumbang kemacetan pula. Nominal seperti ini membutuhkan waktu pengembalian yang cukup lama di gerbang tol. Dengan menggunakan uang pas sesuai tarif saja butuh waktu beberapa detik. Apalagi, tanpa uang pas yang membutuhkan pengembalian. Mungkin tarif tol butuh pembulatan, sehingga nilainya pas dengan nominal uang yang dikeluarkan pemudik.

"Bila perlu tarif tol digratiskan saat kemacetan begitu panjang terjadi. Dengan begitu, pemudik bisa melintas dengan lancar. Lebih baik lagi, bila para pemudik menggunakan kartu akses tol," ungkap Novi. Selama mengakses tol, Novi menemukan masih banyak masyarakat yang lalu lalang menyeberangi jalan. Perlu sosialisasi kepada masyarakat setempat agar tak melintas di jalan tol, karena sangat membahayakan. Inilah temuan dan catatan penting yang disampaikan. ■

Rendy M. Affandy Lamadjido, Anggota Komisi V DPR RI

Inventarisasi Masalah Harus Dilakukan

Kemacetan arus mudik tahun ini meninggalkan banyak cerita duka. Puluhan kilometer kendaraan para pemudik terdiam dan terkurung di tengah jalan. Inventarisasi masalah arus mudik jadi keniscayaan.

Rapat Paripurna DPR RI belum dimulai saat itu. Parlementaria menemui Anggota Komisi V DPR RI Rendy M. Affandy Lamadjido sebelum mengikuti rapat paripurna DPR. Ramah menyambut Parlementaria, politisi PDI Perjuangan ini pun langsung memaparkan pandangan kritisnya menyangkut evaluasi arus mudik 2016.

Inventarisasi masalah mestinya sudah dilakukan jauh sebelum arus mudik terjadi. Kemacetan yang selalu tersuguh hampir setiap kali musim mudik, mengindikasikan inventarisasi masalah belum optimal dilakukan. “Saya belum melihat pemerintah melakukan inventarisasi masalah,

mulai dari *seat* atau tempat duduk, *traffic management*, dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan,” ujar Rendy pertengahan Juli lalu.

Inventarisasi masalah dilakukan untuk mengetahui secara pasti berapa besaran jumlah masyarakat yang melakukan mudik lebaran dengan transportasi umum, dengan menggunakan motor, dan berapa masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi. “Kalau ini semua ditata, saya kira dapat dilakukan langkah-langkah antisipasi mulai dari persoalan *seat* dan penyediaannya, hingga pada persoalan *traffic management*,” paparnya.

Di tol Cipali, sambung Rendy, belum ada *traffic management*. Pemerintah membiarkan semua orang masuk melalui tol Cipali. Akibatnya, dapat dipastikan terjadi kemacetan. Penumpukan dan perlambatan laju kendaraan yang melintas pun terjadi.

“Pemerintah juga tidak pernah melakukan *traffic management* terhadap rekayasa lalu lintas dalam arti yang sebenarnya. Itu sebabnya saya merasa heran kalau Korlantas dengan mudahnya menyatakan telah melakukan rekayasa lalu lintas.”

Rekayasa yang dimaksud Rendy adalah penyelidikan, penelitian, dan pengendalian atas arus lalu lintas yang akan terjadi. Proses rekayasa tidak bisa tiba-tiba dan sporadis untuk mengurai kemacetan saat itu. Rekayasa butuh waktu, jauh sebelum prediksi kemacetan terjadi. “Jadi, bukan se-konyong-konyong hari ini, lalu kita dapat langsung melakukan rekayasa lalu lintas,” lanjutnya.

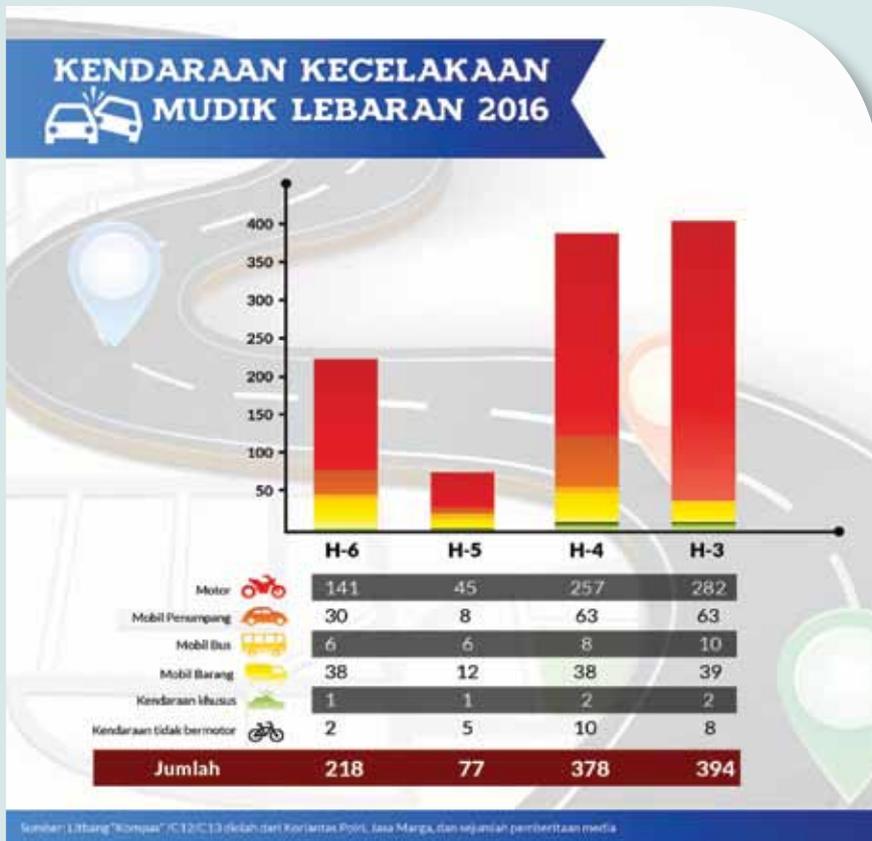
Sebelum Polisi menentukan jalan Pantura sebagai akses untuk jalur mudik, seharusnya diselidiki terlebih dahulu berapa kemampuan kapasitas jalan tersebut dalam menerima arus kendaraan masuk dan memilah mobil berdasarkan jenisnya untuk dilakukan penghitungan. Selain itu, menganalisa pula sarana dan prasarana infrastruktur setempat, seperti jembatan yang mungkin saja berpotensi menimbulkan kemacetan.

Demikian juga dengan elevasi atau ketinggian jalan yang tidak mungkin dilintasi kendaraan roda enam atau truk kontainer. Semua ini perlu mendapat perhatian dan analisa mendalam untuk mencegah kemacetan parah yang tidak diharapkan. Dari inventarisasi berbagai masalah transportasi itulah, pembangunan berkelanjutan pun mulai didesain. Bentuk konkritnya berupa pelebaran jalan, perpanjangan jalan tol, atau dengan membuat jalan tol baru.

Rendy juga menyesalkan, selama ini pemerintah belum menerapkan



Sejumlah petugas tengah mengatur lalulintas untuk mengurangi kepadatan di pintu keluar Tol Brebes Timur



Pemerintah juga tidak pernah melakukan *traffic management* terhadap rekayasa lalu lintas dalam arti yang sebenarnya. Itu sebabnya saya merasa heran kalau Korlantas dengan mudahnya menyatakan telah melakukan rekayasa lalu lintas.



traffic management yang bagus, yaitu mengelola dan memelihara seluruh sumber jaringan agar tetap terpelihara dengan baik. “Kita tahu bahwa jalan tol itu kecepatannya 100 km/jam. Begitu keluar tol, akses jalannya juga harus bebas hambatan. Jangan sampai ada persimpangan, lampu merah, perhentian bus, pasar, dan segala macam yang dapat mengganggu kelancaran kendaraan keluar,” ucapnya.

Rendy menuturkan kalau semua akses seperti *rest area*, posko kesehatan, dan lain sebagainya belum dilakukan dengan *traffic management* yang bagus, akibatnya semua menjadi amburadul. Justru dalam sebuah *rest area* sering terlihat adanya kemacetan.

“Di *rest area* 62, ada tiga tujuan orang masuk ke area tersebut, yakni ingin ke toilet, makan, dan ingin mengisi BBM. Maka harus ada pengaturan yang benar di sana. Jangan setiap mobil masuk,

diarahkan melalui jalur pengisian BBM dahulu. Akibatnya, orang yang tadinya hanya ingin ke toilet atau makan, jadi ikut antrian pom bensin, tidak bisa langsung menuju tempat yang dimaksud,” ungkap Rendy lagi.

Dalam penilaian politisi dari dapil Sulawesi Tengah ini, sistem pengendalian kemacetan pada arus mudik lebaran tahun ini adalah yang terburuk. Kendaraan para pemudik seperti dibiarkan mengalami kemacetan parah, tanpa pembatasan.

“Sebenarnya kalau diatur secara bagus, tidak akan terjadi kemacetan. Dan yang lebih fatal lagi, dalam kemacetan tersebut ada beberapa orang pemudik yang meninggal dunia. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang harus bertanggungjawab,” tegasnya. ■

(dep/mh)



Anggota Komisi V DPR RI,
Rendy M. Affandy

foto : andri/iw

Fauzih H. Amro, Anggota Komisi V DPR RI

Batasi Penggunaan Kendaraan Pribadi

Kendaraan pribadi masih jadi yang favorit digunakan para pemudik. Volume kendaraan selalu tak seirama dengan infrastruktur jalan yang tersedia. Perlu kalkulasi ilmiah.

Budaya tahunan mudik selalu menuai masalah hampir setiap tahun. Banyak kekurangan yang selalu terlihat usai arus mudik dan balik. Pembenahan jadi keniscayaan. Salah satunya ialah sarana dan prasarana transportasi darat.

Masyarakat lebih cenderung menggunakan kendaraan pribadi daripada transportasi umum untuk mudik. Anggota Komisi V DPR RI Fauzih H. Amro menyoroti sisi ini sebagai titik krusial mudik. Dibanding transportasi udara dan laut, di darat selalu mengundang masalah masif yang seakan tak ada habisnya.

“Laut ada masalah, tapi masih bisa diatasi. Udara juga ada masalah kecil-kecil seperti *extra flight* dan *delay*. Gitu-gitu masih normal. Problem terbesar itu justru di darat, yaitu pengguna motor dan kendaraan pribadi. Tahun 2014 kurang lebih 700 kecelakaan yang meninggal 400. Sementara 2015 kemarin menurun dari 600 kecelakaan 300 yang meninggal. Tapi, prediksi kami tahun ini meningkat,” ungkap Fauzih.

Untuk tahun ini, Korlantas Polri menyebutkan, korban kecelakaan saat operasi Ramadan berjumlah 2.601 orang pada H-6 hingga H+5 lebaran. Diantaranya, 483 orang meninggal di tempat, 844 orang luka berat, dan 3.464 orang luka ringan.

Politisi dari Fraksi Hanura itu meminta Pemerintah tegas mengambil sikap dengan membuat terobosan-terobosan baru untuk mengurangi angka kecelakaan pada saat mudik lebaran. Bila perlu, lanjut Fauzih, penggunaan sepeda motor saat mudik

dihentikan. Ini untuk mengurangi angka kecelakaan sekaligus meminimalisir potensi kemacetan.

“Bila perlu pemudik dibatasi. Yang bawa keluarga saja yang boleh bawa kendaraan, seperti 3 in 1. Yang enggak bawa keluarga, wajib naik transportasi umum. Mudik itu minimal 5-8 orang atau sesuai kapasitas mobil, harus dibatasi. Ini agar tidak menambah korban kecelakaan berikutnya. Setop penggunaan sepeda motor untuk mudik di 2017. Kalau motor dihentikan, otomatis minim kecelakaan,” tegasnya.

Dalam UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan, sepeda motor merupakan transportasi jarak dekat. Apabila, digunakan lebih dari 2 jam, maka kategorinya jarak jauh. Sementara itu, menyikapi rekayasa lalu lintas dengan sistem ganjil genap bukanlah solusi yang tepat.

“Kita harus membatasi jumlah kendaraan bermotor. Pemerintah harus tegas. Enggak hanya buka-tutup saja, seperti pakai celana. Enggak menyelesaikan masalah,” ungkap politisi dapil Sumatera Selatan I itu.

Sebagai gantinya, tambah Fauzih, Pemerintah harus menambah fasilitas mudik gratis dengan menggunakan bus atau kereta api. Bila motor dan mobil pribadi terus dibiarkan untuk mudik, sama saja pemerintah membiarkan pemudik dalam bahaya yang mengancam nyawanya.

Selain itu, lanjutnya, infrastruktur juga jadi salah satu faktor pendukung untuk mengatasi masalah. Disebutkannya,

pembangunan prasarana moda transportasi darat perlu diimbangi dengan laju pertumbuhan kendaraan. “Harus seimbang dong, pertumbuhan infrastruktur jalan kita dengan pertumbuhan mobil dan motor. Di Jabodetabek ada 3000 kendaraan yang masuk per hari. Kalau dikali 30 sudah hampir 100.000 kendaraan tiap bulannya,” ungkap Fauzih.

Ini harus jadi perhatian serius. Berkaca dari tragedi tol Brebes Exit (Brexite), terlihat tidak ada koordinasi dan ketidakseimbangan antara volume kendaraan dengan infrastruktur jalan. “Kayak Brexite itu, ya, udah enggak bisa karena mentok. Ibarat segitiga,

arus masuk dari Jakarta besar, sementara arus keluaran minor,” paparnya lagi.

Di sinilah pentingnya kalkulasi ilmiah agar kemacetan serupa tak terjadi lagi tahun depan. ■

(ann)



Anggota Komisi V DPR RI, Fauzih H. Amro

foto: iwan armanias/aw



foto : artef/iw

Anggota Komisi V DPR RI, **Anton Sihombing**

Antthon Sihombing, Anggota Komisi V DPR RI Berharap *Zero Accident*

Tradisi yang selalu berulang mestinya bisa diprediksi dan direncanakan. Petugas pengatur lalu lintas dan penyedia sarana jalan semestinya juga sudah memiliki pengalaman yang terlatih. Rekayasa lalu lintas jadi keniscayaan untuk menyalasi kepadatan kendaraan.

Jika volume kendaraan sedang meningkat, petugas bisa menguraikan kesemrawutan ke berbagai jalur yang ada. Ketika jalur Pantura sudah mulai penuh, maka bisa dirahkan ke jalur tengah (Pamanukan, Subang, Majalengka, Kuningan, dan Ketagunggunan). Setelah itu, belok ke kanan melalui Bumiayu dan Purwokerto, serta jalur selatan (Cikampek, Purwakarta, Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Kebumen).

Skenario-skenario seperti itu kurang terlihat dalam persiapan angkutan mudik Lebaran 2015-2016 sejak tol Cipali hingga tol Brebes Timur (Brexit) beroperasi. Wajar apabila perhatian calon pemudik tertuju pada jalur tol Cipali-Brexit saja. Mereka tak dapat disalahkan mengapa tidak memilih jalur alternatif (Pantura, jalur tengah, dan selatan).

Inilah yang disoroti Anggota Komisi V DPR RI Anthon Sihombing.

Menurutnya, kelemahan pengaturan mudik lebaran 2016 adalah soalantisipasi. “Macet, kan, karena orang kepengen lewat tol itu, promosi, dan orang-orang kepingin lewat tol yang baru. Semua lewat di situ. Sehingga jalur yang lain kosong. Termasuk Pantura. Hal ini yang perlu diantisipasi di waktu-waktu yang akan datang,” ujarnya.

Kemacetan tak terkendali yang terjadi di tol Brexit merupakan bagian dari insiden yang tidak diharapkan. Pengguna jalan yang terjebak kemacetan tentu merasa dirugikan dengan tragedi naas itu. *Zero accident* adalah harapan bersama. Bahkan, sampai ada 12

orang yang tewas karena kelelahan menghadapi kemacetan parah.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyayangkan tragedi tersebut. Meskipun perbaikan infrastruktur jalan sudah dilakukan, namun Anthon berharap ada peningkatan koordinasi antara pemangku kepentingan sehingga *zero accident* bisa terwujud tanpa ada celah kemacetan.

“Perbaikan infrastruktur jalan sudah ada kemajuan. Jalan yang mangkrak sudah diperbaiki. Tapi, koordinasi perlu ditingkatkan untuk *zero accident*. Jalan disiapkan, koordinasi makin ditingkatkan. Informasi pada pemudik itu dikasih tahu. Jangan udah *full* di sini, terus masih ke situ lagi,” harap Anthon. ■

(eko)



foto : liputan6.com/iw

Antrean kendaraan yang terjebak kemacetan di pintu keluar tol Brebes Timur

Soegeng Poernomo, Presidium MTI Ada Salah Prediksi

Pemerintah sudah salah prediksi dalam mengantisipasi arus mudik. Kemacetan arus mudik tahun ini luar biasa. Libur lebaran bersamaan dengan libur sekolah. Ada jalan tol baru yang dipromosikan untuk arus mudik. Plus ada peningkatan kepemilikan mobil pribadi. Jadilah penumpukkan kendaraan di satu ruas tol yang mengakibatkan macet total.

Parlementaria ingin mengorek perspektif lain soal arus mudik 2016. Adalah Soegeng Poernomo, Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) yang coba menguliti akar masalah dan biang kemacetan arus mudik ini. Kepada reporter Devi Iriandi, M. Husen, dan fotografer Jaka Nugraha, beliau menuturkan banyak hal pada pertengahan Juli lalu. Berikut petikannya.

Brexit sangat populer saat arus mudik kemarin. Di situlah titik krusial kemacetan. Sejauh mana Anda memberi evaluasi?

Kalau pertanyaannya fokus ke arah Brexit, itu sebetulnya hanya masalah satu moda yang namanya transportasi darat, yaitu jalan. Ada jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan ada jalan tol. Semua jalan itu saling terhubung. Nah, khusus Brexit, namanya saja hanya exit, bukan gerbang utama. Di Brexit hanya ada dua jalur keluar. Tentu tidak imbang. Itu hanya untuk exit Brebes.

Hanya saja masyarakat kita selalu tertarik hal-hal baru. Mudik pun ingin

mencoba tol baru. Saya katakan ada kekeliruan pemerintah dalam mengantisipasi. Mestinya ada data berapa yang mau mudik dan kapan *big hour*-nya. Ada estimasi yang keliru. Ternyata, yang lewat Pantura khususnya jalan tol jauh lebih besar dari yang diestimasi.

Brexit ini jalan tol lurus dan hanya untuk exit. Ada perilaku masyarakat yang tidak sabar, sehingga macet. Semua mengambil jalur kiri, bahkan jalur *emergency* pun jadi penuh. Kalau macetnya hanya dua jalur, yang *emergency* masih lancar. Jadi, kalau ada suplai bensin atau ada yang sakit, masih bisa lewat jalur *emergency*. Ini sudah tidak bisa. Itulah perilaku masyarakat kita. Apalagi, penegakan hukumnya juga kurang kuat.

Siapa yang harus bertanggung jawab mengatur arus mudik?

Yang mengatur Kementerian Perhubungan. Bila dari Cikarang sudah diketahui ada 60 ribu kendaraan keluar pada H-3, mestinya sampai di pertigaan menuju Bandung harus disetop. Jangan lewat sini, karena sudah kelebihan kapasitas. Harus ditutup dan paksa lewat Bandung.

Penegakan hukum ini yang tidak ada. Ini malah dibiarkan terus. Saya kira dengan sistem buka tutup seperti di jalur puncak akan membantu kelancaran arus mudik.

Belum lagi jalan nasional yang isinya motor. Ini juga luar biasa mentok. Sehingga terjadi pertemuan yang luar biasa macetnya. Bahkan, motor lebih panjang daripada mobil yang ada di Brexit. Mobil di Brexit sekitar 12-20 jam. Ternyata, motor 20-30 jam hanya untuk ruas Cirebon-Pemalang. Ini luput dari perhatian. Kemudian ke selatan juga demikian. Katanya selatan relatif longgar, tapi kenyataannya juga sama saja.

Pemudik ke arah Bandung dan Nagrek dialihkan ke Garut. Ke arah Tasik malaya sudah luar biasa macetnya. Artinya, ada perhitungan yang kurang pas dari jumlah pemudik. Kemudian tidak ada *timing direction* atau arahan mengenai waktu. Di prediksi



Presidium MTI, Soegeng Poernomo

foto : jaka/iw

puncaknya H-4 dan H-3. Ternyata puncaknya sampai ke H+1. Jalur masih macet, khususnya di selatan. Di jalur utara mulai terurai, tetapi tetap masih ada antrian. Di sinilah ada salah prediksi.

Arus balik diprediksi H+2 dan H+3. Ternyata, sampai H+10 pun masih macet. Sekali lagi ini salah prediksi. Orang tua libur karena lebaran dan anak-anak juga libur sekolah. Akhirnya, numpuk jadi satu. Ditambah lagi promosi jalan tol yang gencar, sehingga banyak orang nekat melintas. Jadilah tumpukan dari berbagai keinginan yang menyatu.

Bagaimana seharusnya mengatur arus mudik?

Ke depan saya kira perlu ada pembelajaran yang baik. Harus ada pengaturan yang namanya *re-timing*. Katakanlah H-4, H-3, H-2, dan H-1. Contoh, penduduk Karawang dan Bekasi Timur diimbau pulang H-4. Kemudian Bekasi Barat dan Jakarta bagian timur pulang pada H-3. Ini agar bisa lolos lebih dahulu dari kemacetan. Ini yang namanya *re-timing*.

Bisa juga *re-timing* itu mengumumkan penduduk Bekasi Timur berangkat H-3 tapi pagi. Lalu, penduduk Bekasi Barat yang mudik ke arah timur bisa siang hari. Sementara penduduk Jakarta mudik setelah jam buka puasa. Jadi 24 jam dibagi 4 (pagi, siang, sore, malam). Kira-kira setiap 6 jam. Itu saya kira akan memecah arus.

Tapi mereka yang banyak mudik ini “orang-orang baru”, ya mereka yang baru beli mobil. Banyak sekali mobil yang entah sewaan atau milik sendiri. Mungkin mereka juga ingin dilihat bahwa dia sudah bisa beli mobil dan ingin dibawa pulang kampung, karena di sana tidak ada alat transportasi selain mobilnya sendiri. *Public transport*-nya tidak pernah didahulukan. Ini adalah kesalahan struktural yang

sudah sangat lama, sehingga orang cenderung memakai mobil pribadi daripada kendaraan umum.

Pembangunan kendaraan umum selama ini seret, baik bus, kereta api, kapal, atau pesawat. Semua orang lebih senang menggunakan kendaraan pribadi. Ini keliru. *Public transport* mestinya lebih dominan daripada *private transport*. Bagaimana mengalihkan hal tersebut, ini jadi tugas berat jangka panjang pemerintah agar *public transport* jadi primadona pada suatu hari.



Pertumbuhan jumlah kendaraan jauh lebih besar dari pertumbuhan jalan. Dalam kurun 10 tahun lagi jumlah kendaraan akan lebih besar daripada jumlah penduduknya. Pengaturannya harus tegas, seperti ganjil genap. Itu sudah mengurangi separuh.

Bagaimana dengan pembangunan jalan tol di Pantura selama ini?

Pembangunan jalan tol tahun 2017 bisa diperpanjang sampai ke Pemalang. Kelak, akan lebih baik daripada sampai Brebes. Tetapi saya sudah ingatkan kepada pihak PU, agar dikasih sodetan juga. Jangan sampai problem di Brexit nanti berubah problemnya jadi Pemxit (Pemalang exit). Di sana

ada jalan daerah sepanjang 25 km yang dapat tembus ke sebelah timur Pekalongan. Itu kalau perlu dikejar. Dari sekarang harus dianggarkan agar jadi alternatif tol.

Jumlah kelas menengah meningkat, sehingga kepemilikan mobil pribadi juga meningkat. Ini jadi biang kemacetan di jalan raya. Pendapat Anda?

Ya, pertumbuhan jumlah kendaraan jauh lebih besar dari pertumbuhan jalan. Dalam kurun 10 tahun lagi jumlah kendaraan akan lebih besar daripada jumlah penduduknya. Pengaturannya harus tegas, seperti ganjil genap. Itu sudah mengurangi separuh. Atau pembatasan tidak boleh masuk jalur protokol pada jam tertentu. Itu juga bisa. Ini semua pengaturan untuk jangka pendek. Tapi, untuk jangka panjangnya semua moda transportasi harus dikerahkan.

Jalan tol di Jawa harus segera diselesaikan. *Double track* untuk jalur kereta harus dirampungkan. Begitu juga dengan bandara-bandara baru harus diselesaikan. Saya menyoroti dimensi waktu 50 tahun ke depan, ketika sentra ekonomi kita hanya di Jabodetabek. Berarti urbanisasi akan luar biasa. Suatu hari jumlah penduduk bisa melonjak dari 25 juta menjadi 50 juta penduduk, karena semua industri ada di wilayah ini. Ada kekeliruan pengembangan perindustrian yang semuanya disentralkan di Jakarta.

Pada suatu hari dalam jangka waktu 50 tahun, orang mudiknya bukan lagi dari Jakarta ke daerah, melainkan dari daerah ke Jakarta. Ini harus ada desain, tidak dibiarkan semua tumbuh di Jakarta. Siapa yang mendesain ini, mari kita sama-sama lakukan itu. Hanya mereka yang punya visi jauh ke depan saja yang bisa mendesain pembangunan, tidak semua tersentralisasi. Tapi, harus didesentralisasi. ■

(dep/mh)

APA KATA PEMUDIK



Jayadi Maulana Dua Hari yang Melelahkan

Hampir setiap jelang lebaran, saya dan keluarga selalu pulang kampung menuju Solo dan Purworejo. Kami putuskan berangkat Sabtu pagi (2/7) pukul 08.00 WIB. Sebelum berangkat kami mengecek keadaan jalan tol Cikampek dengan menggunakan aplikasi *waze*. Ternyata tol Bekasi Timur macet total. Jadi, kami putuskan mengambil jalur non tol hingga ke Cikampek.

Kami mulai masuk tol di Cikopo dengan kondisi jalan yang cukup lancar. Jalan masih sepi dan kendaraan bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Mendekati pintu keluar Brebes Timur (Brexid) mulai terlihat ada kemacetan hingga 3 km. Keluar dari tol Brexid, kami mengakses jalan biasa di Kota Brebes. Kemacetan parah mulai kami alami Sabtu sore sekitar pukul 16.00 di Bulakamba, Brebes. Saat itu, kami masih menjalani ibadah puasa.

Kami mengira kamacetan tidak parah, ternyata hingga malam hari mobil yang kami tumpangi tak bergerak. Hingga pukul 20.00 mobil masih terdiam. Mobil para pemudik hanya sedikit saja bergerak setelah lewat dari pukul 20.00. Setelah itu, kembali macet total. Masih di Brebes, waktu sudah menunjukkan pukul 03.00 WIB. Minggu (3/7) dini hari, kami masih di tengah jalan Kota Brebes.

Kami putuskan untuk istirahat sambil sahur bersama dan menunggu kumandang azan Subuh. Kondisi kami sekeluarga sudah kelelahan. Pukul 06.00 WIB, kendaraan kami mulai bergerak lagi. Kondisi jalan masih macet total. Berjam-jam kami habiskan waktu di tengah jalan. Pukul 18.00, Minggu sore, kami istirahat kembali untuk berbuka puasa dan salat Magrib.

Usai salat Magrib, kami bergerak lagi. Kemudi mobil pun berganti diambil alih. Tiba di Kota Semarang pukul 24.00. Dari Semarang, kami melewati tiga kota, Ambarawa, Salatiga, dan Boyolali. Akhirnya, Senin (4/7) dini hari pukul 03.00, kami sampai juga di Kota Solo. Dua hari yang melelahkan menuju kampung halaman.



M. Nur Rofiq 30 Jam Pulang Kampung

Hampir setiap tahun saya dan keluarga mudik ke Bumiayu, Brebes. Sejak dibukanya tol Cipali tahun lalu, saya berharap perjalanan mudik bisa lebih cepat. Dalam kondisi normal waktu tempuh Bekasi-Bumiayu hanya membutuhkan 4-5 jam dari sebelumnya 8-9 jam. Ternyata, pengalaman saya mudik dua tahun terakhir ini mengatakan lain. Walau sudah ada tol Cipali, tetap saja waktu tempuhnya lebih dari 24 jam.

Bahkan, tahun ini saya menghabiskan 30 jam lebih di jalan untuk sampai ke kampung halaman. Itu pun harus melalui

jalan alternatif. Selain volume kendaraan tinggi, petugas pengatur lalu lintas juga kurang banyak, sehingga tidak efektif menertibkan para pengendara yang sudah tidak sabar.

Masih banyak PR yang dimiliki pemerintah, diantaranya kondisi jalan pasca-exit tol yang belum disiapkan secara maksimal, penataan keluar masuk *rest area* yang kurang efektif, penyiapan jalur-jalur alternatif untuk mengurai kemacetan, dan sebagainya. Di sisi lain, saya apresiasi DPR RI yang telah aktif melakukan pengawasan agar pemerintah mengoptimalkan layanan bagi pemudik.

Amelia Safira Mudik yang Menyiksa



Awalnya, saya ingin berangkat mudik pada Senin (4/7), tapi kemudian dipercepat Sabtu (2/7) agar terhindar dari kemacetan. Usai salat Subuh, perjalanan mudik dimulai menuju Temanggung, Jateng. Awalnya memang lancar. Di tengah jalan sudah terdengar informasi bahwa tol Brebes Timur (Brexid) macet total. Tapi, saya dan keluarga penasaran ingin mencoba tol baru tersebut.

Mendekati gerbang *exit* tol Pejagan, dahsyatnya kemacetan mulai kami rasakan. Ketika itu, kami dihadapkan dua pilihan, ke kiri keluar Pejagan dan lurus menuju Brebes Timur. Bingung pada dua pilihan dan saat yang sama indikator bahan bakar mulai menyusut, tinggal dua bar. Akhirnya, dipilih keluar Pejagan dengan harapan bisa mengisi bensin. Namun, antrian menuju keluar tol Pejagan macet total.

Akhirnya, kami alihkan lagi ke arah Brebes Timur. Awalnya agak lancar. Namun, di tengah jalan mulai terjebak macet. Kendaraan tak bisa bergerak. Di sinilah saya dan keluarga benar-benar terjebak kemacetan parah di Brexid. AC mobil dimatikan, karena bensin mulai kritis dan kaca jendela pun dibuka. Hari itu siang menyengat dan kami dalam kondisi berpuasa. Hari terus beranjak gelap, sementara kendaraan masih belum bisa bergerak.

Tol Brexid yang baru ini, ternyata minim rest area, SPBU, dan toilet. Benar-benar tersiksa dikepung kemacetan dan terkurung di lokasi jalan yang minim fasilitas. Warga setempat berinisiatif membangun toilet darurat. Bahkan ada warung darurat dan penjual BBM dadakan. Karena sudah kritis, akhirnya kami membeli bensin yang dijual dengan harga Rp 20 ribu per liter. Harga yang menggila di tengah kesulitan.

Lebih gila lagi, toilet darurat tarifnya Rp10 ribu per orang. Sempat terjadi tawar-menawar harga ketika kami berempat ingin masuk toilet. Yang mestinya Rp 40 ribu, akhirnya jadi 28 ribu. Setelah memenuhi semua hajat dan keperluan, kendaraan mulai bergerak lagi sedikit demi sedikit. Untuk jarak 13 km ditempuh 8 jam. Total perjalanan mudik tahun ini ke Temanggung 30 jam.



Vania Kamila Andarini
39 Jam Menuju Kudus

Inilah perjalanan mudik saya paling berat dalam 10 tahun terakhir. Saya pulang kampung bersama keluarga ke Kota Kudus, Jawa Tengah. Rekor mudik terlama sepanjang hidup saya. Dari Jakarta hingga ke tol Kanci, Cirebon, butuh waktu 10 jam. Itu sudah mengakses tol Cikampek, Cipali, Palimanan, hingga berakhir di Kanci. Belum lagi perjalanan di Brebes menyita waktu 13 jam, Tegal 11 jam, dan Pemalang-Kudus 4 jam.

Berangkat mudik, Senin (4/7) pagi pukul 07.00 WIB. Perjalanan masih lancar. Tiba di km 114 tol Palimanan, perjalanan mulai tersendat. Sudah terlihat dari kejauhan kendaraan para pemudik terjebak kemacetan panjang. Jarak 15 km harus ditempuh 5 jam. Kejenuhan mulai menghantui di tengah kemacetan. Persediaan bensin mulai menipis. Rasa ingin buang air kecil pun tak tertahankan. Tak ada toilet tersedia. Kanan kiri hanya pepohonan dan kendaraan para pemudik.

Hari mulai gelap, namun perjalanan masih juga tersendat. Kendaraan hanya bergerak 2-5 meter saja. Tengah malam, pukul 23:25 WIB, petugas di tol Pejagan menyuruh kendaraan pemudik untuk melalui jalan *contra flow*. Alhamdulillah, lancar hingga bisa mampir sejenak di SPBU. Tapi, BBM sudah habis. Akhirnya, saya pun memutuskan melanjutkan perjalanan.

Pukul 03.40 dini hari, tiba di pintu keluar tol Brebes Timur (Brexite). Keluar dari Brexite, saya disambut lagi dengan kemacetan panjang. Benar-benar melelahkan. Saya kira, pemerintah kurang siap dalam menyambut arus mudik tahun ini. Harusnya lebih *aware*, terutama di titik pertemuan arus sepanjang Pantura dari Cipali hingga Brebes. Perjalanan mudik ke Kudus yang normalnya bisa ditempuh 10-15 jam, kini harus ditempuh 39 jam.



Rizki Amalia Laksmiputri
Brexite yang Panas Menyengat

Saya dan keluarga pulang kampung ke Surabaya menyusuri pantai utara Jawa. Saat berada di tol Brebes Timur (Brexite), kami sudah disambut kemacetan parah. Bahkan, saya sempat tertidur di mobil, karena macet berjam-jam. Suara klakson mobil bersahutan, hingga membangunkan saya. Saat itu masih pagi di Brexite.

Hingga beranjak siang, mobil pemudik hanya bergerak beberapa meter saja. Panas mulai menyengat. Hari semakin siang dan kami semua semakin kelelahan. Untungnya, saya, ibu, dan adik perempuan saya sedang tidak berpuasa. Jadi, bisa minum dan makan. Hanya ayah dan adik laki-laki saya yang berpuasa. Tapi, akhirnya adik saya pun batal, karena tak kuat menahan panas.

Panas menyengat dan polusi udara di Brexite membuat saya dan keluarga stres. Ditambah lagi tidak ada toilet dan SPBU. Melihat kemacetan berjam-jam, warga setempat pun menjajakan makanan dan minuman untuk para pemudik yang ingin berbuka puasa. Penjual bensin pun bermunculan. Bahkan, toilet darurat didirikan.

Berhasil keluar dari Brexite, saya berharap tak menemukan kemacetan lagi. Ternyata, kembali terjebak macet parah. Ingin mengisi bensin pun tak bisa, karena antrian di SPBU sudah mengular panjang. SPBU berikutnya juga begitu. Padahal, saat yang sama kami sekeluarga juga ingin ke toilet. Antrian di SPBU sampai 1 km. Kami pun memutuskan jalan kaki untuk sampai ke toilet.



Tetty Vera Lambok Bako
Berharap Cepat, Ternyata Macet

Saya dan keluarga memutuskan mencoba lewat tol Brexite (tol di Brebes Timur) dengan harapan bisa segera cepat sampai tujuan. Ternyata, saya terjebak macet. Dari Pejagan berangkat pukul 08:00 pagi dan baru bisa keluar dari Brexite pukul 22:00. Tak ada *contra flow* seperti dinformasikan pemerintah. Loket pembayaran di gerbang tol macet parah. Mobil-mobil harus mengantri panjang.

Banyak pemudik mematikan mesin mobilnya, karena terdiam macet dalam waktu lama. AC mobil pun dimatikan untuk menghemat bahan bakar. Penduduk setempat berjasa membuatkan toilet umum darurat untuk para pemudik. Makanan kecil dan mie instan juga dijajakan penduduk setempat. Tapi, makanan yang dijajakan terlalu mahal. Bahkan, tiba-tiba bermunculan pula penjual bensin.

Untungnya, saya dan keluarga sudah mengisi full bahan bakar, termasuk menyiapkan kartu E-tol dan makanan untuk persiapan perjalanan sepanjang jalur mudik. Saya melihat banyak mobil pemudik kehabisan bensin. Harapan saya, kelak polisi bisa bekerja sama dengan Dishub untuk membuka akses jalan memutar balik untukantisipasi bila terjebak dalam kemacetan panjang.

Sedih sekali bila mengingat kenangan masa mudik yang lalu.

Saya kecewa dengan pengaturan arus mudik tahun ini. Apalagi, mobil yang saya bawa bersistem manual. Cukup melelahkan.

Mudah-mudahan tahun depan tidak seperti ini. Posko-posko harus diperbanyak, baik posko istirahat maupun bengkel mobil.

Brexit, Perencanaan Tol (Seharusnya) Terintegrasi

Oleh:

Herawati Zetha Rahman, Jade Sjafrecia Petroceany, Perdana Miraj

Pengamat Transportasi, Infrastruktur, Departemen Teknik Sipil Universitas Pancasila, Jakarta



Tanpa adanya jalan dengan kapasitas cukup dan mutu yang handal, maka dipastikan lalu lintas penumpang maupun barang akan mengalami hambatan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi. Kerugian yang ditanggung oleh pemakai jalan akibat hambatan tersebut, merupakan potensi yang dapat diubah ke dalam bentuk pembayaran masyarakat atas pemakaian jalan bebas hambatan.

Perbedaan jalan tol dengan jalan raya selain pengenaan tarif kepada pengguna jalan tol, yaitu adanya Syarat Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol. SPM ini digunakan sebagai acuan pelayanan kepada pengguna yang salah satunya terkait dengan indikator kondisi jalan tol, indikator Pelayanan Kecepatan Tempuh Rata-Rata, Indikator Pelayanan Aksesibilitas, dan indikator terkait lainnya.

Pembangunan jalan tol telah mendukung adanya konektivitas antardaerah sehingga berujung pada peningkatan aksesibilitas masyarakat. Di satu sisi, konektivitas ini memiliki pengaruh positif, namun di sisi lain berakibat pada keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi.

Jalan tol memiliki peran strategis untuk mewujudkan pemerataan pembangunan maupun untuk pengembangan wilayah. Pada wilayah yang tingkat perekonomiannya telah maju, mobilitas penumpang maupun barang pada umumnya sangat tinggi sehingga dituntut adanya sarana perhubungan darat atau infrastruktur jalan dengan mutu yang handal. Pulau Jawa sebagai pulau dengan populasi terpadat di Indonesia dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) tertinggi terus membutuhkan prasarana yang memadai untuk menghadirkan aksesibilitas bagi masyarakat.

Lebaran di Brexit

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa kemacetan parah yang terjadi di Jalan Tol Pejagan-Pemalang 2016 tepatnya gerbang tol Brebes Timur disebabkan oleh minimnya *rest area* yang tersedia. Pendapat ini tidak sepenuhnya salah. Bila ditelisik lebih jauh, pembangunan *rest area* terutama untuk jalan tol telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1990 tentang Jalan Tol.

Pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa “Pada Jalan Tol antarkota di masing-masing jurusan setiap jarak 50 (lima puluh) kilometer tersedia sekurang-kurangnya satu tempat istirahat”. Namun demikian dalam realita di lapangan, jalan tol seksi Pejagan-Pemalang yang membentang sejauh 57.5 km hanya memiliki 1 *rest area* di satu sisi dari arah barat. Padahal, mengacu peraturan terkait, jumlah ideal yang dibutuhkan pada tol ini adalah 4 *rest area*, masing-masing 2 unit baik dari barat dan timur jalan tol.

Di sisi lain, sistem pembayaran juga berkontribusi dalam menghadirkan kemacetan di jalan tol. Sebagian masyarakat

belum terbiasa dengan perubahan budaya dalam transaksi jalan tol. Bukti konkret dapat dilihat pada antrian gerbang tol yang ada di penjuruk Jakarta. Kendaraan rela antri bahkan lebih dari 20 mobil pada *gate* manual, sementara *gate* elektronik dibiarkan menganggur hanya 5-7 mobil pada *peak hours*.

Padahal dari sisi waktu tempuh, penggunaan transaksi elektronik jelas lebih cepat dengan waktu proses hanya 2-3 detik (tanpa masalah) dibandingkan dengan manual pembayaran yang mencapai 9 detik. Perubahan paradigma ini perlu didorong oleh operator dengan secara gradual menghapus sistem pembayaran manual dan fokus pada pelayanan dan peningkatan kompetensi SDM.

Penyebab Tambahan Kemacetan

Kemacetan pada “Brexit” memiliki keterhubungan penyebab. Terkait pada sisi perencanaan, koordinasi antara para pihak, dalam hal ini pengembang, operator, dan



Herawati Zetha Rahman



Perdana Miraj



Jade Sjafrecia Petroceany

foto-foto: dokpri/iv

regulator belum berjalan maksimal. Seperti halnya dalam perencanaan pintu tol, panjang antrian yang direncanakan, letak pintu keluar dari jalan nasional dan simpang terdekat. Data-data terkait perencanaan seharusnya telah dimiliki dan dielaborasi oleh semua pihak dengan berbagai pertimbangan di masa yang akan datang.

Dalam sisi pemilihan lokasi sendiri, harus dilakukan studi secara komprehensif menyangkut area yang akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perletakan lokasi pintu tol tersebut. Pada kenyataannya, lokasi pintu keluar Brebes Timur yang dipilih, menyebabkan adanya *bottleneck* jalan nasional, terminal, lokasi SPBU dan perlintasan sebidang dengan jalur KA. Para pemangku kebijakan selayaknya sudah menjalin komunikasi di awal perencanaan sehingga konflik tidak terjadi saat operasional.

Selain itu, terdapat pula hal yang perlu dipertimbangkan di awal perencanaan, yakni VCR (Volume to Capacity Ratio), perbandingan volume kendaraan dengan kapasitas jalan yang tersedia. Nyatanya, sebagian besar jalan di Indonesia telah

mencapai kapasitas maksimal. Reayasa yang komprehensif diperlukan guna mengatasi beban kendaraan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Sehingga, mudik lebaran, natal, dan tahun baru, yang merupakan tradisi dan kearifan lokal dari masyarakat Indonesia, dapat berlangsung lancar.

Penumpukan kendaraan di Brebes Timur mengindikasikan bahwa pemudik lebih banyak menggunakan jalur utara daripada menggunakan jalur selatan. Hal ini karena kondisi jalanan dan fasilitas di jalur pantura lebih baik daripada di jalur selatan. Kondisi jalan di pantura secara umum relatif baik walaupun penuh tambalan dan bergelombang.

Jalur utara juga memiliki fasilitas yang lebih baik seperti jalanan yang lebar dan telah diberi pembatas, lampu penerangan jalan yang memadai, serta fasilitas peristirahatan yang cukup banyak seperti restoran dan lain-lain. Hanya saja jalur utara memiliki jalur yang sedikit membosankan karena jalanan cenderung lurus jarang adanya tikungan.

Operator hendaknya juga berbekal kesiapan koordinasi saat menghadapi kondisi *ultimate* pada infrastruktur yang direncanakan. Penggunaan teknologi yang telah berkembang pesat saat ini diharapkan juga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh operator untuk membantu para pengguna jalan mendapatkan kondisi aktual.

Solusi dalam Perencanaan Terintegrasi

Sejumlah solusi bermunculan sebagai wacana penyelesaian konflik. Solusi awal yang dilakukan oleh pihak operator dan kepolisian semasa lebaran yang lalu adalah pemberlakuan *contraflow*, *three in one*, 3 lajur keluar dan 1 lajur masuk tol, jemput bola oleh petugas dengan mendatangi mobil yang berhenti untuk melakukan transaksi pembayaran masuk tol, dan pengalihan arus untuk meminimalisir kemacetan yang lebih panjang.

Dalam jangka pendek solusi yang dapat dilakukan tidak lepas dari komunikasi dan koordinasi para pihak. Diantaranya adalah pembuatan *multiple exit* di titik kemacetan pintu tol Brebes Timur, sehingga memungkinkan adanya opsi bagi para pengguna untuk keluar dan tidak terkonsentrasi pada tempat yang sama.

Solusi lain dalam jangka waktu menengah adalah pembangunan *flyover*. Hal ini bertujuan untuk menghindari simpangan sebidang dengan perlintasan KA Pejagan. Selain itu, diperlukan adanya upaya pembebasan lahan untuk menampung kapasitas arus keluar dari tol sehingga tidak terjadi *deadlock* dan *bottleneck* pada jalan nasional.

Lebih jauh, dalam jangka panjang diperlukan adanya penarikan minat masyarakat Indonesia dengan tradisi mudik pada angkutan umum seperti bus atau kereta api. Sejalan dengan hal itu, kebijakan yang mendukung inisiatif mudik berbasis transportasi publik perlu didukung adanya peningkatan dari fasilitas dan pelayanan angkutan umum. Diharapkan dengan cara tersebut dapat mengatasi kemacetan saat hari raya tiba. Mimpi jangka panjangnya adalah romantisme mudik dengan transportasi berbasis rel ala HST (high speed

(E)



Warga tengah menunggu untuk melakukan vaksinasi ulang di Rumah Sakit Harapan Bunda



foto : jayadi/iw

Perlu Langkah Pasti Antisipasi Produk-produk Palsu

Terbongkarnya kasus praktik peredaran vaksin palsu untuk bayi oleh Bareskrim Polri membuktikan bahwa Indonesia masih menjadi surga bagi produk-produk palsu. Tindakan pembuatan dan peredaran vaksin palsu untuk bayi adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Betapa tidak, vaksin palsu itu bisa mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa anak-anak generasi penerus bangsa.

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf menyatakan pemerintah harus mengambil alih untuk meredam kepanikan masyarakat akibat peredaran vaksin palsu yang masih dalam proses penyelidikan.

“Kita hormati sikap pemerintah, kita minta pemerintah melakukan sesuai prosedur yang ada untuk meredam kepanikan yang terjadi. Masyarakat boleh panik tetapi negara tidak boleh panik. Negara harus punya langkah-langkah pasti untuk mengantisipasi,” kata Dede di Gedung DPR, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Lebih lanjut Dede Yusuf mengatakan saat ini sudah dibuat *crisis center* yang bertujuan memberikan informasi baik untuk masyarakat dan pihak rumah sakit. Artinya semua pengetahuan

yang dimiliki pihak terkait harus ada disitu untuk menjawab keresahan masyarakat terkait vaksin palsu.

“*Crisis center* ini akan dibuat di pusat dan di daerah-daerah yang terduga terkena vaksin palsu. Dibukanya *crisis center* guna meredam dan menjadi filter bagi masyarakat yang saat ini panik dan kebingungan, harus melakukan apa dan bagaimana,” paparnya.

Politisi Partai Demokrat ini juga mengatakan perlu adanya Official Letter, dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) untuk memberi informasi atau tidak dampak vaksin palsu tersebut terhadap tubuh korban.

Dia juga mengatakan, kejadian

ini merupakan catatan untuk Badan POM, memang dalam pengawasannya hanya bisa di ranah publik, tidak bisa menelusuri dan menangkap. Maka kedepan Komisi IX akan membuat RUU untuk memperkuat kinerja BPOM.

“Dalam fungsi pengawasan BPOM memang tidak bisa melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang illegal. BPOM tidak bisa menelusuri dan menangkap, hanya bisa di ranah publik. Kalau dibilang lalai pasti juga karena mengetahui tetapi tidak berbuat apa-apa,” katanya.

Rutin Lakukan Pengawasan

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI dari FPKS, Ansory Siregar mengatakan negara bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari peredaran obat-obatan dan vaksin palsu. Karenanya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus rutin melakukan pengawasan di lapangan. Apotek-apotek yang terbukti menjual vaksin dan obat-obatan palsu harus ditindak tegas. Pemerintah harus mencabut izin apotek yang dengan sengaja menjual produk-produk obat dan vaksin palsu.

“Para pemilik apotek memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa



Anggota Komisi IX DPR RI, **Ansory Siregar**

produk obat dan vaksin yang mereka jual benar-benar terjamin keasliannya. Ada tanggung jawab moral untuk melindungi masyarakat dari produk-produk obat-obatan serta vaksin palsu. Tak boleh hanya asal murah dan demi meraih keuntungan, kemudian merugikan kesehatan dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya juga mengapresiasi Bareskrim Polri yang telah berhasil

membongkar sindikat pembuatan dan peredaran vaksin palsu ini. “Kita berharap, polisi mengusut tuntas para pelaku jaringan pemalsu vaksin untuk bayi ini dan terus memerangi sindikat pembuat dan pengedar vaksin palsu bayi ini. Bukan tidak mungkin, kasus yang terbongkar ini hanyalah fenomena gunung es,” katanya.

Politisi PKS itu juga menghimbau agar masyarakat lebih hati-hati dalam membeli produk obat-obatan. “Saat akan memvaksin buah hatinya, para orang tua memiliki hak untuk menanyakan kepada dokter atau tenaga medis bahwa vaksin yang digunakan adalah produk asli. Ini tentu sangat penting demi kesehatan dan keselamatan jiwa anak-anak kita,” katanya.

Masa depan bangsa ini ada di tangan anak-anak kita saat ini. Apa jadinya bangsa ini di masa depan apabila bayi-bayi calon penerus perjuangan bangsa disuntik vaksin palsu. Negara tak boleh abai dan lalai dalam melindungi rakyatnya,” lanjutnya.

Pimpinan DPR RI juga bereaksi yang sama atas munculnya kasus vaksin palsu ini, usai menerima orangtua yang mengadukan kasus vaksin palsu



Crisis Center untuk korban vaksin palsu di Rumah Sakit Harapan Bunda



foto-foto : jayadi/iw



Empat rumah sakit yang memberikan vaksin palsu kepada balita.

yang diduga menimpa anak mereka kepada Pimpinan DPR, Ketua DPR RI Ade Komarudin meminta pemerintah membentuk *crisis center* di rumah sakit sebab kasus tersebut menyita perhatian masyarakat. “Secara nasional dipimpin langsung menteri, bagaimana mengatasi ini dulu,” kata Ade saat menemui orangtua korban vaksin palsu di Gedung DPR, Jakarta baru-baru ini.

Ia meminta vaksin palsu tersebut diteliti melalui BPOM kemudian mencari permasalahan tata niaga vaksin. Ade meminta Komisi IX DPR terus mengawasi kasus tersebut. Bila diperlukan, Komisi IX dapat membentuk panitia kerja (Panja).

Bahkan, lanjut Ade, kasus vaksin palsu yang melibatkan banyak pihak membuat DPR RI dapat membentuk tim pengawasan yang berasal dari lintas komisi.

“Segera menindaklanjuti siapa biang kerok dari pengadaan vaksin palsu yang membuat heboh secara nasional. Ini menyangkut generasi penerus anak dan cucu kita,” kata Politisi Golkar itu.

Penegakan Hukum

Sementara itu, dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Plt Kepala Badan POM, Kepala Bareskrim Polri, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Vaksin Palsu, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan Direktur Biofarma, di Gedung DPR, Jakarta pertengahan Juli lalu, Komisi IX DPR dengan tegas mendesak Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Vaksin Palsu untuk mengintensifkan kinerja dan melakukan penegakan hukum dalam rangka penanggulangan peredaran vaksin palsu di Indonesia

serta memberikan laporan secara tertulis kepada Komisi IX DPR.

Rapat yang berlangsung cukup lama itu juga mendesak Badan POM RI untuk meningkatkan kinerja dalam pengawasan peredaran obat dan makanan di Indonesia dan mendorong Kemenkes untuk mengkaji usulan dari IDAI agar melakukan pemeriksaan antibody anak yang terduga menerima vaksin palsu.

Dalam Raker tersebut juga terungkap 14 nama rumah sakit penerima vaksin palsu yang sebagian besar berada di wilayah Bekasi, Jawa Barat selain itu terdapat juga 6 bidan dan klinik yang menerima vaksin palsu.

Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes untuk berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pengelolaan limbah rumah sakit secara benar dan aman demi menjamin kesehatan dan

Komisi IX DPR RI mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri dalam penanganan kasus hukum vaksin palsu

keselamatan masyarakat.

Selanjutnya Komisi IX DPR RI juga mendesak Kemenkes untuk merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Permenkes Nomor 35 tahun 2014 tentang standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Permenkes Nomor 58 Tahun 2014 tentang standar Pelayanan Kefarmasian di rumah sakit, dan Permenkes Nomor 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan mutu obat pada instalasi farmasi Pemerintah dalam jangka waktu 15 hari kerja dengan melibatkan Badan POM RI dan berkonsultasi dengan Komisi IX.

Komisi IX DPR RI mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri dalam penanganan kasus hukum vaksin palsu dan meminta Bareskrim Polri untuk meningkatkan kinerja dalam pengungkapan jaringan pemalsuan vaksin palsu dan melakukan penerapan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Terkait hal itu, menurut Ansory, Indonesia tidak kekurangan undang-undang yang terkait dengan pemalsuan vaksin dan obat, yaitu Pertama; pasal 197 Pasal 197 UU 36/2009, dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar. Kedua; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 386 ayat 1 yaitu hukuman penjara selama lamanya 4 tahun. Ketiga; UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62 (1) pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar. Keempat, UU No. 15/ 2001 tentang Merek, yaitu Pasal 90 dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

dr. Ratu Meulya Rezeki dokter anak yang berpraktek di Poliklinik Yankes DPR RI menilai kasus vaksin palsu ini cukup mengejutkan apalagi sudah beredar sejak tahun 2003.

“Berdasarkan data dari BPOM, ada tiga vaksin yang dipalsukan yakni vaksin Hepatitis B, DPT dan Nacl. Kalau ketiganya masuk kedalam tubuh anak, tidak ada yang berbahaya kecuali dalam pembuatannya tidak steril biasanya akan memunculkan infeksi,” kata dr. Ratu.

Infeksinya, jelas dr. Ratu yang juga praktek di RS Prikasih Pasar Rebo ini, tidak berlangsung lama, biasanya hanya satu minggu. “Dampak bahayanya adalah tidak adanya kekebalan padahal tujuan imunisasi itu untuk kekebalan tubuh, jadi dia akan rentan penyakit. Melakukan vaksin ulang adalah cara yang paling benar,”terang dr. Ratu.

Ketika ditanya Parleментарia,



foto : jayadi/iw

dr. Ratu Meulya Rezeki

bagaimana cara membedakan vaksin palsu dengan yang asli, Ratu menjelaskan, asli atau palsu hanya bisa diketahui melalui pemeriksaan dilaboratorium, “Tidak bisa kasat mata. Dan kita para dokter dapat dari instalasi farmasi di RS. Mereka yang mengawasi dan membeli. Kita dokter tinggal terima obatnya. Yah jadi kita percaya saja,” tandasnya.

Ratu menambahkan, atas kasus ini, yang paling bertanggung jawab mulai dari produsen vaksin palsu sampai distributor. “Peredaran ini memang harus ada pengawasannya. Apalagi kasus ini sudah berlangsung 13 tahun berarti memang pengawasannya tidak baik,” imbuhnya. ■

(nt/rmm)



foto : jayadi/iw

Posko pengaduan di Rumah Sakit Harapan Bunda

TNI Harus Mampu Ciutkan Nyali Perompak

Maraknya kasus penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) yang dilakukan kelompok perompak di perairan Malaysia dan Filipina menjadi perhatian banyak pihak, pasalnya kasus ini terjadi secara berkali-kali. Salah satunya kelompok bersenjata yang diduga berasal dari Filipina menyandera warga negara Indonesia yang bekerja di Lahad Datu Negeri Sabah, Malaysia pada Sabtu, 9 Juli 2016.

Sebagaimana yang dilaporkan majikan para WNI yang bernama Chia Tong Lim yang merupakan warga negara Malaysia kepada Kepolisian Negeri Sabah bahwa pekerjaannya itu sedang menangkap ikan menggunakan kapal miliknya di perairan Kawasan Felda Sahabat Tungku, Lahad Datu. Ia mengungkapkan, sekitar pukul 23.30 waktu setempat, kapal yang berisi WNI itu didatangi sebuah *speedboat* berukuran panjang dengan lima orang penumpang membawa senjata laras panjang.

Tidak lama kemudian, kata Chia Tong, tiga orang dari tujuh anak buah kapal (ABK) yang dipekerjakan tersebut langsung dibawa oleh kelompok bersenjata. Ketiga WNI diculik dan

dibawa kabur ke perairan Tawi-Tawi, Filipina selatan. Maka, ini menjadi insiden keempat yang terjadi dalam 7 bulan terakhir.

Majikan WNI yang beralamat di Kampung Cina Lorong Satu Pekan Kunak Negeri Sabah menambahkan, ketiga WNI yang diculik tersebut bernama Lorence Koten (34 tahun) selaku juragan kapal, Teodorus Kopong (42 tahun) dan Emanuel (40 tahun).

Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu Negeri Sabah melalui Staf Teknis Imigrasi Nasriansyah dalam pesan singkatnya membenarkan adanya penculikan terhadap ketiga WNI asal NTT tersebut.

Menanggapi penyanderaan tersebut, Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari angkat bicara. Menurutnya, penyanderaan itu patut disayangkan. Pasalnya terjadi secara berkali-kali. “Saya cukup menyayangkan ini penyanderaan WNI ini terjadi sedemikian sering,” ujarnya kepada Parleментарia ketika ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Politisi PKS ini juga menuturkan bahwa ini mengindikasikan bahwa negara lain cukup berani dengan Indonesia. Sehingga ini menjadi tantangan TNI untuk mampu mencitukan nyali mereka. “Ini permasalahan serius, karena kita punya kekuatan, tentara kita harus mampu mencitukan nyali mereka, ini mengindikasikan bahwa mereka berani dengan Indonesia, apa maksud berani? Ya berani ganggu

Indonesia.” terangnya.

Meskipun menilai bahwa dalam kasus penyanderaan ini Indonesia dilecehkan, namun ia juga menjelaskan bahwa Indonesia tidak boleh gegabah untuk sesegera main tempur, karena ada hukum internasional yang harus dihormati. “Yang paling menyedihkan itu ketika ada tujuh anak buah kapal, tapi yang diplih untuk disandera yang memiliki paspor Indonesia. Ini melecehkan Indonesia. Namun kita tak boleh juga gegabah main tempur saja, itu tidak mungkin karena ada hukum internasional yang harus ditaati,” tuturnya.

Ia pun juga menyatakan bahwa meskipun ada pernyataan yang mengatakan bahwa yang melakukan



Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari

foto: jayadi/iw

tindakan penyanderaan itu adalah anak buah Abu Sayyaf, Indonesia tidak bisa langsung ke Filipina untuk menindaklanjuti. “Ketika muncul statemen bahwa yang melakukan penyanderaan adalah anak buah Abu Sayyaf, kita tidak bisa langsung ke Filipina tanpa persetujuan Filipina itu sendiri,” jelasnya.

Peran Diplomasi

Ia pun mengharapkan peran diplomasi Menteri Luar Negeri sangat dibutuhkan agar Filipina mau menyelesaikan persoalan Abu Sayyaf ini. Kharis menegaskan bahwa jika Filipina bersedia, Indonesia siap untuk membantu. Namun, hingga kini belum ada titik terang dari Filipina sendiri.

“Saya kira ini peran diplomasi Menteri Luar Negeri sangat dibutuhkan, harapannya adalah Filipina mau *beresin* mereka. Kalau tidak, kita bisa bantu mereka. Nah sayangnya hari ini belum ada titik terang mereka (Filipina) itu maunya apa,” jelasnya.

Meskipun begitu, dirinya tidak menilai kasus penyanderaan ini adalah bentuk kelalaian pemerintah. Karena tidak mungkin pemerintah setiap detik mengawasi satu per satu kapal yang lewat karena perairan Indonesia begitu luas. Ia menilai tetap harus ada yang perlu di evaluasi dari sistem pertahanan Indonesia.

Terkait evaluasi yang harus dilakukan, Kharis menuturkan bahwa tak ada cara lain selain meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga dan anggaran. “Cara meningkatkan pertahanan dan keamanan ya tidak ada cara lain seperti meningkatkan kemampuan SDM, meningkatkan koordinasi antar lembaga dan butuh biaya,” jawabnya.

Ia menjelaskan bahwa saat ini di pagu indikatif Kementerian Pertahanan tahun 2017 yang seharusnya Rp 209 Triliun, tetapi hanya Rp 104 Triliun. Baginya ini menggambarkan bahwa *baseline* saja tidak mencukupi, apalagi bicara pada titik optimal.

“*Baseline* anggaran Kemenhan yang harusnya Rp 209 Triliun, tapi di pagu indikatif hanya Rp 104 Triliun. Ini kan

menggambarkan bahwa *baseline* saja tak mencukupi, hanya separuhnya. Jadi kita jauh untuk bicara optimal,” tuturnya.

Legislator dapil Jawa Tengah V ini menuturkan bahwa keterbatasan anggaran bisa saja menjadi penyebab kasus penyanderaan ini. Meskipun Indonesia memiliki kualitas prajurit yang bagus tapi kalau tidak didukung anggaran yang kuat maka tetap saja tidak mampu berbicara banyak.



Ini permasalahan serius, karena kita punya kekuatan, tentara kita harus mampu menciutkan nyali mereka, ini mengindikasikan bahwa mereka berani dengan Indonesia, apa maksud berani? Ya berani ganggu indonesia.



“Saya kira keterbatasan anggaran menjadi salah satu penyebab. Sementara kita punya prestasi, pasukan tempur kita bagus sekali, kemampuan *sniper* kita bagus, tapi ketika tak punya anggaran cukup ya SDM yang baik ini tidak mampu melakukan kegiatan yang mampu menangkal ancaman terhadap Indonesia,” jelasnya.

Ia pun menginginkan anggaran pertahanan untuk ditambah. “Ya kita berharap anggaran ditingkatkan, tapi anggaran itu diusulkan pemerintah, kita hanya mengevaluasi, membahas dan menyetujui,” harapnya.

Logika anggaran ini dijelaskan Kharis dalam konteks TNI saat ini,

seperti seseorang ketika dalam keterbatasan saja bisa *survive*, apalagi jika didukung dengan anggaran yang memadai. Misalnya dapat dilihat dari Helikopter yang dimiliki Indonesia yang sudah berumur tua. Para penerbang Indonesia pun berani untuk menggunakan Helikopter tua tersebut. Padahal, lanjut Kharis, penerbang luar negeri pun sudah tidak mau menggunakan Helikopter tua milik Indonesia tersebut.

“Meskipun pesawat yang digunakan itu akhirnya jatuh juga seperti yang terjadi di Yogyakarta,” sambungnya. Kharis menambahkan bahwa faktor umur pesawat tak bisa diabaikan.

Oleh karenanya melihat konteks ini, Komisi I DPR RI ingin mendorong anggaran pertahanan itu betul-betul ditingkatkan. Ia kembali menjelaskan bahwa anggaran pertahanan itu tidak seperti anggaran infrastruktur jalan yang ketika hari ini dianggarkan besok sudah pakai untuk membuat jalan.

Ia menjelaskan bahwa anggaran pertahanan itu digunakan agar tidak ada ancaman yang menerobos Indonesia. Artinya jika tidak ada musuh yang mengganggu, berarti pertahanannya dikelola dengan baik.

“Keamanan dan pertahanan itu apa sih? Ya, ketika tak ada ancaman yang bisa menerobos dan tak ada musuh yang mengganggu kita, itu tandanya pertahanannya sudah baik. Ketika aman berarti target pertahanan tercapai,” jelasnya.

“Misalnya, kenapa TNI harus membeli peluru meskipun tidak ada musuh? Ya, peluru bukan dibeli untuk menembak musuh, tapi untuk latihan, prajurit kita berlatih terus,” sambungnya.

Ketika ditanya mengenai evaluasi pemerintah dalam bidang pertahanan, Kharis menilai bahwa pemerintah terlihat koordinasinya kurang. Seolah-olah banyak yang berebut panggung antar berbagai pihak. Ia menginginkan agar hal itu segera disudahi dan segera bikin *crisis center* agar semua orang yang terlibat dalam penanganan penyanderaan ini harus terkoordinasi di *crisis center*. ■

(hs)

Pemerintah Serius Laksanakan Program Tax Amnesty

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak, atau Tax Amnesty. Program pengampunan pajak ditargetkan meraup tambahan penerimaan negara mencapai Rp 165 triliun. Pemerintah pun sudah menyiapkan berbagai instrumen untuk menyukseskan program yang direncanakan berjalan 9 bulan lalu.

Parlementaria berkesempatan mewawancarai Anggota Komisi XI DPR RI, **Sarmuji**, untuk memperdalam pelaksanaan program *tax amnesty* dari sudut pandang seorang Anggota Dewan. Bertempat di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu, politisi F-PG dan dapil Jawa Timur VI ini pun mengemukakan pandangannya terhadap UU yang disahkan DPR RI pada pada akhir Juni lalu itu. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana Anda melihat pelaksanaan program *tax amnesty*?

Saya melihat Pemerintah sekarang tampak serius mempersiapkan pelaksanaan program *tax amnesty*. Bahkan Presiden Jokowi pun turun tangan langsung dalam proses sosialisasi. Saya terus terang merasa terkejut dengan Presiden yang terlibat langsung sosialisasi. Presiden bukan hanya hadir, tapi ikut menjelaskan dalam sosialisasi *tax amnesty*. Ini menunjukkan Presiden serius, dan mengetahui detail undang-undang, dan tahu betul permasalahannya.

Presiden juga tahu betul kira-kira faktor apa yang kemungkinan menyebabkan orang itu enggan untuk mengikuti *tax amnesty*. Dan dalam sosialisasi itu Presiden menyatakan dan menegaskan komitmen Pemerintah untuk mengatasi segala sesuatu yang menjadi keengganan orang untuk mengikuti *tax amnesty*.

Misalkan salah satu faktor orang enggan mengikuti *tax amnesty* karena takut datanya bocor, data digunakan di luar perpajakan. Presiden menegaskan, bahwa pembocoran data

tax amnesty, yang berkaitan dengan perpajakan itu bisa diancam hukuman pidana. Dan Pemerintah kewanti-wanti supaya aparatnya, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak tidak sekali-kali membocorkan data yang berkaitan dengan *tax amnesty* itu. Saya melihat Pemerintah sudah serius dari sisi sosialisasi seperti itu. Jadi, intens proses sosialisasinya.

Bahkan dalam pelaksanaannya, Pemerintah membentuk *subdesk* untuk program *tax amnesty*. Pemerintah dan Kemenkeu sama-sama membentuk tim untuk memantau pelaksanaan *tax amnesty*. Hal ini yang menurut saya menunjukkan keseriusan Pemerintah. Saya berharap lagi keseriusan Pemerintah itu juga harus mendekati wajib pajak yang mau disasar.



Kalau melihat data yang disampaikan Pemerintah, dana orang Indonesia di luar negeri itu besar sekali. Dan kalau itu efektif ditarik ke dalam negeri, itu Rp 165 triliun, itu bisa tercapai. Tapi kalau tidak efektif bisa ditarik, maka target tidak akan tercapai.



Anggota Komisi XI DPR RI, Sarmuji

foto: arief/iw

Realistiskah target Rp 165 triliun?

Jika ada pihak yang pesimis *tax amnesty* ini tidak mencapai target Rp 165 triliun, anggap saja sebuah cambuk bagi Pemerintah untuk bekerja lebih keras. Tetapi terlalu optimis juga bisa berakibat dari kelenaan. Jadi, anggap saja kalau ada yang pesimis, itu dijadikan cambuk.

Saat pembahasan RUU Pengampunan Pajak, Pemerintah sudah berusaha meyakinkan kita, bahwa ada data *by name, by address dan by account* harta kekayaan orang Indonesia di luar negeri.

Kalau melihat data yang disampaikan Pemerintah, dana orang Indonesia di luar negeri itu besar sekali. Dan kalau itu efektif ditarik ke dalam negeri, itu Rp 165 triliun, itu bisa tercapai. Tapi kalau tidak efektif bisa ditarik, maka target tidak akan tercapai.

Alangkah tidak eloknya juga, jika kita mencari rejeki di dalam negeri, kemudian ditanamkan di luar negeri. Tidak memberikan manfaat bagi Indonesia.

Apa yang perlu dilakukan Pemerintah, jika target tidak tercapai?

Pemerintah memang harus membuat *plan A* dan *B*. Kalau *plan A* pelaksanaannya berjalan mulus dana uang tebusan yang dihasilkan dari *tax amnesty* cukup menjadi bantalan

APBN. Meskipun sebenarnya Rp 165 triliun tidak harus berupa uang tebusan semua. Karena disamping uang tebusan itu, ada manfaat ekonomi lain, di luar uang tebusan. Manfaatnya membesarnya *tax base*. Kalau *tax base* itu meningkat maka pajak yang akan dihasilkan juga akan meningkat. Berarti ada ekstentifikasi data-data baru yang masuk, menjadi basis perpajakan.

Manfaat ekonomi lainnya kan dana yang masuk itu akan menggerakkan perekonomian, karena implikasinya adalah membesarnya pajak. Bukan hanya dari uang tebusan Rp 165 triliun, tetapi juga bisa diakibatkan oleh manfaat lain dari *tax amnesty*.

Tetapi seandainya dalam kasus yang terburuk, program ini tidak mencapai target, Pemerintah harus menghemat anggaran lagi. Atau menerbitkan surat utang yang tidak sampai melanggar undang-undang, yakni sebesar 3 persen. Pemerintah harus menghemat anggaran, dan kemudian menunda proyek-proyek.

Dikabarkan, ada negara tetangga yang ingin menjegal pelaksanaan program *tax amnesty*, bagaimana Anda melihat hal itu?

Kita tidak bisa mencegah negara lain mau melakukan apa saja untuk membuat dana orang Indonesia betah di negeri mereka. Faktanya,

kita tidak bisa intervensi negara itu. Karena itu yang perlu dilakukan oleh Pemerintah adalah berusaha memberikan ikatan, tawaran yang semenarik mungkin. Bukan asal saja menarik saja, tapi sesuai dengan RUU Pengampunan Pajak,

Misalkan soal kepastian hukum. Karena mereka juga khawatir jika tidak ada kepastian hukum. Jangan-jangan aman di periode ini, tapi tidak aman pada periode berikutnya. Jaminan-jaminan itu harus diberikan. Dan kerahasiaan data juga harus betul-betul diperkuat.

Jika Pemerintah negara lain juga ikut menawarkan fasilitas-fasilitas yang lebih dari *tax amnesty* itu dikeluarkan, maka kita akan bersaing, antara fasilitas yang diberikan oleh negara Indonesia untuk menarik dana orang Indonesia dari luar, dengan Pemerintah negara lain yang ingin agar dana orang Indonesia tetap di negaranya.

Kita harus bersaing dengan fasilitas itu. Tetapi walaupun seandainya ada persaingan di situ, kalau yang disentuh itu personal, semangat gotong royong, kekeluargaan, dan semangat cinta tanah air, mungkin itu menjadi faktor lebih buat orang-orang Indonesia yang memiliki dana di luar negeri itu memasukkan dananya ke dalam negeri. ■

(sf)

Poin-poin Utama dalam UU Pengampunan Pajak:

Pertama, Pengampunan Pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang mendapatkan Pengampunan Pajak terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Penjualan Nilai atau Pajak atas Barang Mewah.

Kedua, Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk yang berada di dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga, Setiap wajib pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak. Jika Wajib Pajak belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di kantor Direktorat Pajak tempat wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.

Keempat, Dalam Undang-Undang ini, tarif uang tebusan

terbagi atas; tarif Uang Tebusan atas Harta repatriasi dalam negeri, Tarif Uang Tebusan atas Harta deklarasi luar negeri, dan Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak UMKM.

Kelima, disepakati periode penyampaian Surat Pernyataan terbagi atas 3 periode, yaitu 3 bulan pertama, bulan keempat sampai 31 Desember 2016, dan 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017

Keenam, juga disepakati Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan 31 Maret 2017.

Ketujuh, dalam UU ini, untuk melakukan repatriasi, pengalihan harta ke dalam negeri harus melalui bank persepsi yang khusus ditunjuk oleh menteri. Harta yang dialihkan harus diinvestasikan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016 bagi yang menyatakan periode pertama kedua atau paling lambat 31 Maret 2017 bagi yang menyatakan pada periode ketiga. ■

(sf)

Tax Amnesty Sebagai Momentum Reformasi Perpajakan



Jesly Panjaitan

foto: dokpri

Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang berpijak dengan kekuatan sendiri, bukan dari utang atau bantuan luar negeri.

Pajak, menjadi salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat saat ini. Untuk itulah, sumber penerimaan perpajakan menjadi sangat penting. Namun, hingga saat ini kinerja penerimaan pajak masih rendah. Padahal, target penerimaan pajak pada APBN 2016 sangatlah besar, yakni sebesar 74,63 persen dari total target penerimaan pendapatan negara.

Dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir, realisasi penerimaan pajak selalu dibawah target yang ditetapkan Pemerintah, kecuali pada tahun 2008 ketika *Sunset Policy* diterapkan, dan tax ratio hanya berada di 10-13 persen. Disisi lain, kesadaran Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan pajaknya juga masih sangat rendah.

Rendahnya kesadaran WP tersebut terlihat dari adanya gap yang cukup besar antara jumlah WP baik Orang Pribadi maupun Badan yang terdaftar dengan jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Untuk tahun 2014, rasio kepatuhan WP terhadap jumlah SPT yang masuk sebesar 58,87 persen.

Ditengah kinerja penerimaan perpajakan yang masih rendah dan kebutuhan pendanaan untuk akselerasi pembangunan cukup besar, pemerintah dipaksa untuk mencari berbagai cara untuk meningkatkan kinerja penerimaan

perpajakan. Salah satu cara yang dipilih pemerintah adalah melalui pengampunan pajak atau *tax amnesty*, yang Undang-undang tersebut sudah disahkan pada 28 Juni 2016 silam.

Setiap WP Berhak Mendapatkan Pengampunan Pajak

Lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, merupakan landasan hukum pemerintah untuk menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau yang lebih dikenal dengan sebutan *tax amnesty*. UU tersebut memuat, pertama, penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan membayar uang tebusan.

Kedua, basis SPT untuk tahun pajak 2014 atau sebelum yang disampaikan WP sebelum UU tentang Pengampunan Pajak berlaku. Ketiga, setiap WP berhak mendapatkan pengampunan pajak kecuali WP yang sedang dilakukan penyidikan, sedang dalam proses peradilan atau sedang menjalani

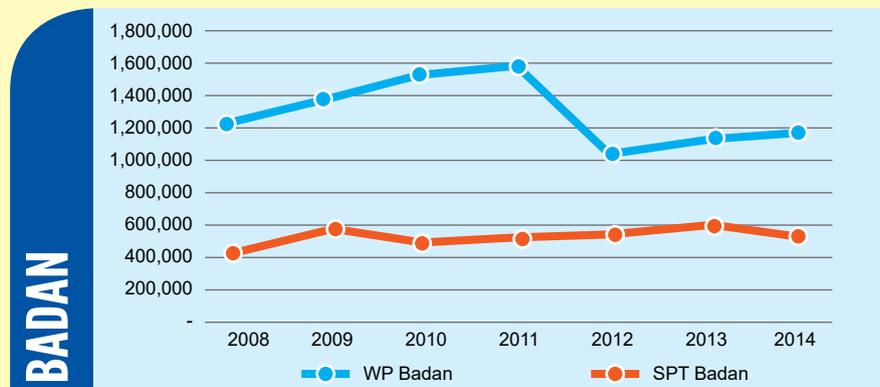
hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Kemudian, tarif uang tebusan terbagi menjadi tiga periode. Untuk periode 1, 1 Juli - 30 Sept 2016 dikenakan 2 persen untuk repatriasi dan 4 persen untuk non repatriasi. Sementara pada periode 2, 1 Oktober - 31 Desember 2016 yakni 4 persen untuk repatriasi dan 6 persen untuk non repatriasi. Dan yang terakhir pada periode 3, 1 - 31 Maret 2017, dikenakan 6 persen untuk repatriasi dan 10 persen untuk non repatriasi.

Untuk mendukung hal ini, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengalihan Harta WP ke Dalam Wilayah NKRI dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

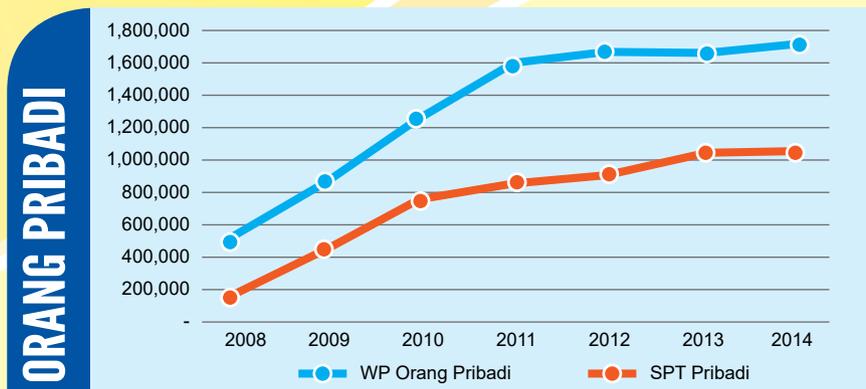
Bentuk *tax amnesty* dengan repatriasi pada hakikatnya bertujuan untuk memberi insentif bagi WP untuk membuka data kekayaan yang selama

Jumlah WP Terdaftar Terhadap Jumlah SPT Yang Masuk



Sumber: DJP, data diolah

Jumlah WP Terdaftar Terhadap Jumlah SPT Yang Masuk



Sumber: DJP, data diolah

ini diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk di luar negeri.

Harta yang direpatriasi wajib diinvestasikan ke dalam negeri selama 3 tahun sejak dialihkan dalam bentuk antara lain: surat berharga Negara Republik Indonesia; obligasi BUMN/lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah/swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); investasi keuangan pada Bank Persepsi; investasi infrastruktur/ sektor riil yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Keuangan juga telah menetapkan 55 pintu masuk dana repatriasi, yang terdiri dari 18 bank persepsi, 18 manajer investasi dan 19 perusahaan efek untuk menyalurkan dana sekaligus menjamin dana tidak keluar dari Indonesia dalam waktu 3 tahun.

Sosialisasi Tax Amnesty Harus Lebih Masif

Dalam jangka pendek, *tax amnesty* sudah pasti akan memberikan manfaat bagi penerimaan jangka pendek. Setelah diterapkan per tanggal 18 Juli 2016, dalam waktu seminggu, harta yang dideklarasikan sudah mencapai diatas Rp 400 miliar dan uang tebusan yang disetorkan sudah melebihi Rp 6 miliar.

Akan tetapi, di jangka panjang belum tentu memberikan manfaat. Hal ini didasari pada pengalaman penerapan *sunset policy* pada tahun 2008, yang memiliki karakteristik yang relatif mirip dengan *tax amnesty*. Pasca penerapan *sunset policy*, jumlah WP yang menyampaikan SPT di tahun 2009 masih sangat kecil, yakni 47,39 persen.

Hal ini menunjukkan WP kembali menjadi tidak patuh setelah program pengampunan pajak berakhir.

Berkaca dari pengalaman tersebut, agar *tax amnesty* memberikan manfaat di jangka panjang, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah. **Pertama**, sosialisasi *tax amnesty* yang masif. Saat ini, sosialisasi *tax amnesty* masih kurang optimal. Sosialisasi dibutuhkan untuk memberi pesan kepada para penggelap pajak untuk ikut serta program *tax amnesty* karena setelah *tax amnesty* berakhir, akan diberlakukan sanksi yang tegas bagi WP yang tidak patuh. Diperlukan sosialisasi yang masif dengan menjelaskan latar belakang, bentuk kebijakan dan jaminan yang akan diperoleh jika mengikuti *tax amnesty* termasuk rencana-rencana DJP setelah *tax amnesty* berakhir.

Kedua, membangun sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dan lebih modern. Sistem yang lebih baik akan membuat WP merasa aman dan nyaman karena data dapat tersimpan dan tidak disalahgunakan untuk pihak tertentu. Sistem administrasi perpajakan yang lebih baik juga dapat menjadi alat untuk mengawasi ketidakpatuhan WP. Peningkatan pengawasan kewajiban perpajakan setelah *tax amnesty* berakhir merupakan kunci dari suksesnya program *tax amnesty*.

Diperlukan sistem administrasi perpajakan termasuk *database* dan IT Pajak yang lebih terkini dan lebih modern, karena ke depan, sesuai dengan kesepakatan melalui *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)* dan *Automatic Exchange Of Tax Information (AEOI)*, sistem administrasi perpajakan Indonesia harus terhubung

dengan sistem di luar negeri.

Diperlukan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dengan pemilik data seperti SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, yang terdiri dari Kepolisian, Pemerintah Daerah dan Jasa Raharja) yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan bermotor, Badan Pertanahan Nasional terkait kepemilikan tanah dan bangunan, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait kepemilikan saham dan instrumen investasi lainnya, Perbankan terkait investasi deposito dan instrumen lain, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Ketiga, reformasi peraturan. Pemerintah bersama DPR RI dapat merevisi UU perpajakan lainnya seperti UU KUP, UU PPh, dll sehingga pemutakhiran UU tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi setelah periode *tax amnesty*. Selain itu, peraturan atau ketentuan dari OJK, Bank Indonesia (BI) dan kementerian/kelembagaan lain yang terkait kebijakan *tax amnesty* perlu disusun. Tata laksana 55 pintu masuk repatriasi itu akan mempengaruhi peraturan dari BI/OJK/kelembagaan lain.

Momentum Reformasi Perpajakan

Tax amnesty tidak hanya berkaitan dengan penerimaan pajak semata namun dapat menjadi momentum untuk reformasi perpajakan menjadi lebih baik lagi. **Sosialisasi yang masif** diperlukan untuk mengajak masyarakat khususnya para penggelap pajak untuk ikut serta program *tax amnesty* karena setelah *tax amnesty* berakhir, akan diberlakukan sanksi yang tegas bagi WP yang tidak patuh. Diperlukan kerjasama dengan entitas pemilik data sehingga terwujud *database* yang baik.

Reformasi peraturan yang komprehensif dan perbaikan sistem administrasi perpajakan terutama teknologi informasi komunikasi menjadi prioritas upaya pemerintah untuk suksesnya kebijakan *tax amnesty*. Kedepan diharapkan, pemerintah juga perlu menyusun *road map* terkait penataan perpajakan yang lebih baik dan memikirkan agar kebijakan yang diambil pemerintah tidak hanya mencapai target dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang.

Ditulis oleh

Jesly Panjaitan, SE, MM, MBA
(Analisis APBN di Sekretariat Jenderal DPR RI)

RUU Radio dan Televisi (RUU RTRI):

Imbangi Siaran Asing dan Jaga NKRI

foto : andri/iw



Forum Legislasi RUU RTRI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta

Rancangan Undang-Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia, disingkat RUU RTRI akan menggabungkan RRI dan TVRI sebagai pemikiran untuk efisiensi dana dan sistem kerja. Melalui UU RTRI nantinya TVRI dan RRI posisinya akan kuat, seperti jelas badan hukumnya dan begitu juga dengan sumber daya manusianya. Saat ini TVRI berada dibawah Kementerian Komunikasi dan Informasi, sedangkan RRI dibawah Kementerian Keuangan. Semestinya hanya dibawah satu naungan saja.

Anggota Komisi I DPR RI Arief Suditomo menyatakan penggabungan dua Lembaga Penyiaran Publik RRI dan TVRI menjadi Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) misinya adalah sebagai lembaga penyiaran negara untuk mengimbangi siaran-siaran dari lembaga penyiaran asing dalam konteks menjaga Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh karena itu, keberadaannya sebagai lembaga penyiaran harus diperkuat. Hal tersebut bukan untuk mengejar swasta, tapi dalam konteks yang lebih besar lagi yakni bersaing dengan televisi asing yang melakukan penetrasi program dengan gencar ke Indonesia.

Siaran Radio dan Televisi RI

akan menyajikan berbagai khazanah keindonesiaan, seperti kultur, tradisi, budaya, perilaku yang sopan-santun, dan moralitas dari Sabang sampai Merauke sekaligus untuk menjaga kedaulatan NKRI.

“Jadi, RTRI ini sebagai alat untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Karena itu harus menyiarkan berita-berita khas keindonesiaan, seperti budaya, kultur, tradisi, perilaku, moralitas bangsa yang luhur dari Sabang sampai Merauke. Seperti halnya ‘Bocah Petualang’. Sebab, kalau anak-anak saat ini lebih senang nonton budaya asing, primordialitas makin kuat, maka kedaulatan kita makin terancam. Untuk itu, RRI dan TVRI harus diperkuat melalui RUU RTRI ini,” tegas politisi Hanura itu dalam forum legislasi ‘RUU RTRI’ di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Menurutnya, saat ini banyak siaran dari asing yang masuk ke Indonesia dan dinikmati masyarakat Indonesia langsung di rumah-rumah penduduk. Gencarnya siaran televisi asing ini akan mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku, masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda.

Program-program televisi asing, kata dia, diterima masyarakat Indonesia melalui paket siaran televisi berbayar, melalui parabola, maupun melalui *streaming*. “TVRI ke depan, didisain untuk menyajikan program-program bermuatan lokal dengan edukasi dan kearifan lokal, yang misinya untuk menjaga NKRI,” tegasnya lagi.

Melalui UU RTRI yang saat ini sedang dibahas DPR RI dan Pemerintah, menurut politisi Partai Hanura ini, TVRI ke depan ditargetkan menjadi lebih baik, baik secara kelembagaan maupun siaran-siarannya.

“Bahwa untuk menjadi lebih baik perlu dilakukan penataan

Sumber Daya Manusia dan adanya rasionalisasi, menurut dia, hal itu bisa saja terjadi,” katanya.

Potensi Besar

Ia melihat, TVRI memiliki potensi yang sangat besar, tapi selama ini belum diberdayakan secara optimal. Dan ia juga melihat, pemerintah saat ini menyampaikan diseminasi program-programnya melalui televisi swasta. Hal ini menurut Arief tidak tepat, karena lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI ini akan digabung menjadi satu agar lebih efisien dan optimal.



foto: iwan armanias/iw

Anggota Komisi I DPR RI, Arief Suditomo

Arief optimis dengan RUU RTRI ini, RRI dan TVRI akan mampu go *public*, melebihi siaran swasta, jika semua lapisan masyarakat komitmen untuk mendukung dan melaksanakan RUU ini. “Justru UU ini memberi kesempatan kepada RRI dan TVRI untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang professional dan sumber dana yang kuat oleh negara. Apalagi tugas RRI dan TVRI lebih mulia untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan pada saatnya rakyat akan rindu dengan TVRI sebagai rumah budaya bangsa,” ujarnya.

Pada prinsipnya kata Arief, TVRI dan RRI bukan untuk mengejar

keuntungan, *profit oriented*, komersial, melainkan untuk memberikan pencerahan dan mempertahankan kedaulatan negara. Terlebih saat ini menikmati siaran radio dan TV tidak lagi harus di rumah, tapi bisa didengar dan dilihat dari handpone di tangan, untuk kapan, dan dimana saja setiap saat, sesuai keinginan.

Bahkan Arief yakin bisa RRI dan TVRI sama dengan BBC, NHK, ABC, dan lain-lain. Dengan RUU ini RRI dan TVRI akan menjadi penyeimbang industri siaran TV swasta dalam konteks dunia yang lebih besar.

Ditegaskan Arief, ada tiga misi utama dalam UU RTRI ini, yaitu penguatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), penguatan Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan digitalisasi. Oleh karena itu, menurutnya, seluruh aspek yang menyangkut tiga hal itu di RTRI sedang diselaraskan dan sinkronkan.

Hal yang krusial di UU RTRI ini, dipaparkan Arief, adalah seberapa jauh RTRI juga memiliki kewenangan-kewenangan yang pada dasarnya bisa menjadikan mereka sebagai organisasi yang mandiri, fleksibel dalam hal menata administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan.

“Sehingga dalam proses mereka menjalankan misinya itu banyak sekali hal yang bisa mereka laksanakan tanpa harus memiliki ketergantungan terutama pada kementerian atau kelembagaan lain,” tukasnya.

Sehingga fleksibilitas dan Kemandirian itu, tandas Arief, merupakan salah satu hal yang memang sebagai elemen yang diperlukan. Kemudian juga dalam hal bagaimana RTRI ini harus mendapatkan konsensi lebih dari apa yang selama ini mereka miliki. Mereka harus mendapatkan alokasi frekuensi yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan televisi-televisi lainnya.

“Karena bagaimanapun TVRI memiliki kewajiban untuk bisa menjadi lokomotif dari pertelevisian di daerah. Karena pertelevisian di daerah itu belum tentu semua investor daerah yang akan mendirikan organisasi televisi itu memiliki kemampuan kapital

untuk membangun infrastruktur,” katanya.

“Sehingga TVRI inilah yang pada akhirnya akan kita berikan konsensi lebih sehingga mereka akan menjadi lokomotif dari usaha pertelevisian dan penyiaran di daerah,” tambahnya.

Masih haruskah TVRI menjadi Lokomotif?, menurut Arief, masih harus. Aspirasi lokal itu sudah pasti tidak bisa diserap atau diakomodir sepenuhnya oleh televisi-televisi swasta yang berjaring nasional, karena yang menjadi keputusan dan misi mereka adalah provit.



RTRI ini sebagai alat untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Karena itu harus menyiarkan berita-berita khas keindonesiaan, seperti budaya, kultur, tradisi, perilaku, moralitas bangsa yang luhur dari Sabang sampai Merauke. Seperti halnya ‘Bocah Petualang’.



Mengakomodir kepentingan lokal itu, dari pengamatannya, menjadi suatu beban. Sehingga hal-hal yang menjadi kepentingan lokal ini harus dibawakan oleh pengusaha lokal itu sendiri.

Pengusaha lokal itu, terangnya, mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Diantaranya keterbatasan



foto : andri/iw

Gedung TVRI, Senayan Jakarta

network, keterbatasan kapital dan lain-lain. Sehingga Komisi I DPR RI merasa bahwa TVRI-lah yang harus menjadi lokomotif.

“Kalau misalnya pengusaha lokal itu bisa menjalankan tugasnya hanya sebagai penyedia materi siarannya terlebih dahulu tanpa harus diributkan dengan pengadaan infrastruktur dan lain-lain, saya pikir itu akan lebih menstimulasi pengembangan penyiaran lokal. Maka TVRI lah yang akan menyediakan infrastruktur bagi mereka,” jelasnya.

Dan tentunya itu tidak gratis, lanjut Arief. Harus ada imbalan tertentu buat TVRI dan itu salah satu potensi pendapatan untuk negara (PNBP). Kalau itu bisa digunakan kembali untuk kepentingan TVRI itu merupakan sesuatu kekuatan modal tambahan yang pada dasarnya sangat menguntungkan bagi TVRI.

Ia menjelaskan, kalau saat ini

TVRI memiliki PNBP yang cukup baik, anggaran yang DPR RI alokasikan untuk TVRI pasti akan ada tambahan. Kalau ada anggaran tambahan pasti akan ada *capital expenditure*, *operational expenditure* yang bisa mereka biaya yang tadinya tidak bisa dibiayai.

“Saya pikir sistem ini, upaya ini merupakan salah satu terobosan dari kami (Komisi I DPR.Red) agar di masa depan LPP menjadi salah satu referensi, bukan hanya swasta saja. Baik referensi informasi, hiburan. Dan yang paling penting LPP harus menjadi lembaga yang kuat dan membanggakan. Kalau sekarang orang Jepang memiliki NHK, orang Inggris BBC, orang Australia memiliki ABC, kenapa kita tidak punya RTRI,” ungkapnya.

Ia menambahkan pihaknya akan melihat *organizational structure* dan *bussiness model*. Karena tidak mungkin membuat dua kerajaan terpisah dengan satu organisasi di atasnya.

“Jadi yang paling baik kita lebur, kita *reorganize structure* organisasinya, kita tentukan bisnis model baru, dan itu merupakan salah satu hal yang dijaga oleh UU RTRI,” tegasnya mengakhiri.

Harus Satu Misi

Sementara itu, praktisi RRI M. Kabul Budiono mendukung RUU ini, karena memang ada hal-hal yang secara prinsip berbeda dengan swasta. Hanya saja kalau dijadikan satu, maka misi dan visi antara RRI dan TVRI juga harus satu, karena ada ditangan manajemen yang satu dan pasti akan lebih kuat. Karena itu dari sisi penguatan kelembagaan melalui RUU ini harus ada kepastian. “Meningat sering terjadi benturan antara realitas dan idealitas yang sulit dilaksanakan di lapangan,” tambahnya.

Meski secara psikologis, manajemen, dan sebagainya pasti akan mengalami gesekan-gesekan, dan



foto : andri/iw

M. Kabul Budiono

benturan, namun bisa diatasi. “Jadi, program RRI dan TVRI berbeda karena memang tidak berorientasi *profit*, karena sifatnya independen. “Yang mempunyai misi pendidikan, pencerahan, keadaban, untuk rakyat seluruh Indonesia. Seperti penampilan anak di TV swasta, pasti berbeda

dengan di TVRI. Kalau di swasta cukup dengan jingkrak-jingkrak, tapi di TVRI bagaimana anak itu mampu memahami dirinya sebagai anak Indonesia. Selain itu ada hal-hal yang bersifat universal, karena RRI dan TVRI untuk melayani seluruh rakyat Indonesia, dan bahkan WNI yang ada di luar negeri,” tutur Kabul Budiono.

Sedangkan mantan Pemimpin Redaksi SCTV Nurjaman Muchtar menilai jika pudarnya TVRI pasca reformasi itu karena TVRI identik dengan suara pemerintah. Karena itu TVRI harus lebih kreatif di era digital dan web saat ini. “Kalau swasta itu kan jelas seperti lingkaran setan; kalau ratingnya tinggi, maka iklannya akan banyak, kalau iklannya banyak maka akan mendatangkan uang banyak, dan kalau uangnya besar, maka akan kreatif untuk mengembangkan program-program TV,” katanya.

Tapi, kalau TVRI dan RRI akan di-*backup* oleh negara melalui RUU RTRI ini, maka seharusnya



foto : andri/iw

Nurjaman Muchtar

mempertahankan keutuhan negara. Termasuk di dalamnya berbagai budaya bangsa dari Sabang – Merauke. “Yang pasti untuk pengembangan siaran itu harus diperkuat secara SDM yang profesional, dan dana yang memadai. Kalau tidak, tentu akan sulit,” pungkasnya. ■

(sc)



Saya pikir sistem ini, upaya ini merupakan salah satu terobosan dari kami (Komisi I DPR.Red) agar di masa depan LPP menjadi salah satu referensi, bukan hanya swasta saja. Baik referensi informasi, hiburan. Dan yang paling penting LPP harus menjadi lembaga yang kuat dan membanggakan



foto : tvri/iw

Siaran TVRI diharapkan mampu menyajikan kearifan budaya lokal untuk memperkuat keutuhan NKRI



Rangkaian kegiatan Sidang Tahunan MPR, Sidang bersama DPR dan DPD, serta Pidato Presiden Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2017 disertai Nota Keuangan. Selasa (16/8). Foto: Tim Parle





Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany dan jajaran Biro Pengelolaan Barang Milik Negara DPR RI meninjau persiapan acara pidato kenegaraan 16 Agustus 2016 di Gedung DPR RI. foto: Runi/iw





Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Agus Hermanto menyelenggarakan pengobatan gratis di Balai Kampung Karang Geneng Utara, Semarang, Sabtu (13/8) foto: Iwan Armanias/iw





Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Iskan Qolba Lubis meninjau MAN 2 Model, Medan. foto: Jaka/iw





*Tim Kunker Komisi III DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke Lapas Klas IIA di DIY, Pekanbaru dan Banjarmasin.
foto: Agung, Devi, Singgih/iw*



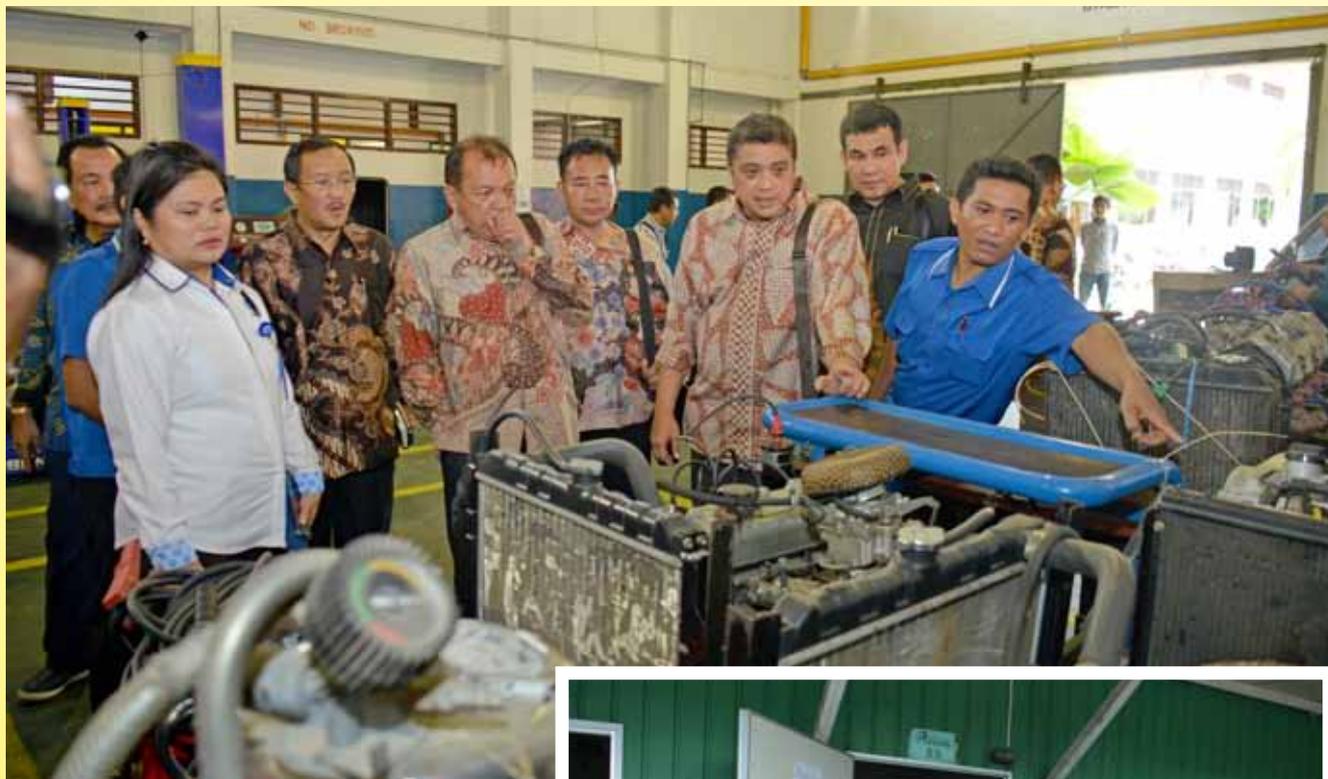
Tim Kunker Komisi V DPR RI dipimpin Ketua Komisi Fary Djemi Francis meninjau normalisasi sungai dan tanggul sungai Cipanas di Kabupaten Indramayu. foto: Azka/iw





Tim Kunspek Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Abdul Fikri Faqih meninjau Wisata Religi, Masjid Agung Jawa Tengah, Klenteng Sam Poo Kong, Gereja Blenduk dan Obyek wisata Goa Kreo, Semarang. foto : Iwan Armanias/iw





Tim Kunker Komisi IX DPR RI dipimpin Ketua Komisi Dede Yusuf meninjau sarana dan prasarana BLK Sorong dan mengecek kondisi penyimpanan vaksin di Puskesmas Waisai, Raja Ampat. foto: Naefurodji/iw





Tim Kunker Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Lasarus meninjau Bandara Tebelian, Sintang, Kalimantan Barat.
foto: Anne/iw



PIMPINAN DPR RI, ANGGOTA DPR RI,
KELUARGA BESAR
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Mengucapkan



**DIRGAHAYU
REPUBLIC INDONESIA**

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2016





dr. Dito Anurogo

foto: dokpr/iw

Vaksinomik, Paradigma Vaksin nan Futuristik

Oleh Dokter Dito Anurogo *

Di Indonesia, vaksin palsu merupakan masalah pelik. Di negara maju, teknologi vaksin telah berbasis genetik. Selamat memasuki era baru vaksin, vaksinomik.

Era vaksin dimulai tahun 1774. Saat itu, seorang petani bernama Benjamin Jesty melakukan observasi pada pemerah susu dengan cacar sapi (*cowpox*) kebal terhadap cacar sapi (*smallpox*). Ia menginokulasi istri dan dua anak lelakinya sekitar 22 tahun sebelum Edward Jenner melakukan inokulasi dan publikasi pertama kali tahun 1798. Kemudian di abad ke-19, virus *vaccinia* (*poxvirus* tikus) menggantikan *cowpox* untuk vaksin.

Penggunaan pertama virus *smallpox* sebagai vaksin hingga 1990an adalah perkembangan vaksin empiris dengan karakterisasi paradigma lama, yakni: injeksi, inaktivasi, dan isolasi. Seiring perkembangan teknologi kedokteran, kesehatan masyarakat, virologi, bakteriologi, imunologi, maka pembuatan vaksin pun mengalami kemajuan pesat. Perkembangan vaksin hepatitis B generasi kedua mulai memasuki era

kedokteran molekuler. Perkembangan selanjutnya perbaikan struktur imun dengan utilisasi konjugasi protein (vaksin *pneumococcal* dan *meningococcal*), serta vaksin HPV.

Paradigma baru berbasis imunogenetik dan kecanggihan peralatan *assays* imunologis dan genetik berdimensi tinggi, seperti sekuensing seluruh genom, transkriptomik mRNA, pendekatan bioinformatik terbaru untuk memahami kompleksitas respon imun mengakselerasi vaksinologi memasuki era baru yang dinamakan *vaccinomics*.

Ide mendasar di balik vaksinomik adalah komponen-komponen penting perkembangan vaksin, imunogenisitas, dan aplikasi klinis akan bergerak dari empirisme ke perkembangan langsung, dan penggunaan vaksin. Informasi ini diperoleh melalui data fenotip-genotip dan riwayat imun komprehensif yang mengasah

komprehensif, sehingga valid dan kuat untuk analisis, penemuan, replikasi, validasi, dan interpretasi. Peralatan bioinformatika memungkinkan untuk pengembangan profil imun yang canggih untuk memahami bagaimana vaksin dapat dikembangkan dan digunakan. Terlebih lagi dengan pesatnya teknologi *-omics* dan *personalized medicine* (PM) yang berasimilasi dengan vaksinologi sehingga merevolusi obat terapeutik. Inilah yang dinamakan vaksinologi prediktif dan personal (Poland dkk 2007). Pengembangan vaksinomik tentunya tetap memerhatikan tujuan vaksinasi, yakni untuk aktivasi dan memperpanjang daya proteksi sejumlah sel-sel T dan B spesifik antigen melawan patogen tertentu atau cukup antigen untuk menyediakan proteksi.

Prinsip-prinsip PM digunakan serupa dengan *personalized vaccinology* (PV). Maksudnya, pemilihan vaksin haruslah mempertimbangkan karakteristik (genetik) individu. Tepat vaksin, tepat dosis, tepat individu, tepat waktu, tepat sasaran/target (genetika, metabolisme, dsb) adalah pertimbangan rasional di dalam pemberian vaksin. Karena tidak semua individu merespon dengan cara sama terhadap vaksin.

Terdapat pendekatan PV optimal berupa formulasi vaksin, rute pemberian, ajuvan, dosis, jadwal pemberian (untuk vaksin-vaksin yang memerlukan dosis multipel) untuk (kelompok) individu. Aplikasi vaksinomik membantu peneliti dan masyarakat untuk memahami pelbagai faktor genetik dan non-genetik yang memengaruhi respon imun terhadap antigen vaksin di tingkat sistem organ



Sumber: journals.plos.org

kemampuan peneliti untuk menguraikan efek polimorfisme genetik dan interaksi antargen terhadap heterogenitas respon imun terhadap vaksin. Hal ini memerlukan data fenotip (*responder* atau *non-responder* vaksin) dan genotip (sekuens gen, transkriptomik) yang besar untuk menyediakan data yang

(Poland dkk, 2011). Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian di dalam vaksinomik adalah efektivitas vaksin yang ditentukan oleh pelbagai faktor seperti: aktivasi, replikasi, diferensiasi limfosit T dan B yang memicu generasi sel-sel memori.

Paradigma Vaksinologi

Ada beragam perspektif, pendekatan, kajian, dan teori termutakhir yang membahas tentang vaksinologi (lihat tabel 1). Tabel ini menguraikan beberapa pendekatan terbaru yang diaplikasikan untuk memahami pelbagai respon imun yang disebabkan oleh vaksin serta perkembangan kualitas vaksin.

Satu pelajaran penting yang dapat diambil dari aplikasi genomik terhadap vaksinologi adalah tidak semua reaksi/efek samping vaksin terkait erat dengan vaksin. Studi yang dilakukan oleh Verbeek dkk (2014) membuktikan bahwa pada sebagian besar kasus, defek struktural/genetika adalah penyebab yang mendasari onset epilepsi setelah imunisasi rutin pada anak-anak. Para peneliti memeriksa data 990 anak-anak yang mengalami kejang-kejang setelah imunisasi (empat dosis DTaP, satu dosis MMR, dan vaksin *Haemophilus influenzae* tipe B) selama dua tahun pertama kehidupan. Dari 1022 potensial kejang epileptik di antara

990 anak-anak ini, 68 dan 32% terjadi setelah menerima vaksin *inactivated* dan vaksin hidup yang dilemahkan (*live attenuated vaccine*).

Adversomik

Vaksinomik perlu didukung adversomik. Istilah *adversomics* pertama kali diperkenalkan tahun 2009, mengacu ke studi tentang reaksi efek samping vaksin menggunakan pendekatan imunogenomik dan sistem biologi. Singkatnya, paradigma baru untuk keamanan dan desain vaksin (Whitaker dkk, 2015). Pendekatan ilmu dasar, translasional, klinis terintegrasi diperlukan untuk memahami mekanisme di balik efek samping vaksin, prediksi, dan kemudian mengaplikasikan pengetahuan ini untuk mendesain vaksin baru yang menurunkan atau mencegah kejadian-kejadian ini.

Kajian adversomik vaksin merupakan perluasan dari farmakogenomik. Bedanya, kalau farmakogenomik mempelajari obat berbasis genomik, maka adversomik mengkaji vaksin berbasis genomik. Metodologi yang dipergunakan sama, meskipun sebenarnya mekanisme pasti yang mendasari terjadinya efek samping/reaksi vaksin belum diketahui. Memahami keterlibatan hingga tingkat molekuler, genetik, proteomik (yakni adversomik),

terutama bagaimana genetika (genomik dan transkriptomik) berpengaruh kuat terhadap perkembangan reaksi/efek samping vaksin, memberikan petunjuk di dalam desain kandidat vaksin yang lebih baru dan lebih aman.

Kajian adversomik banyak diperkaya dari pemahaman kontribusi gen HLA terhadap respon-respon imun yang menginduksi vaksin, termasuk efek sampingnya. Aplikasi pengetahuan genotip-fenotip berkontribusi nyata untuk pengembangan model predisposisi genetik terhadap efek samping vaksin.

Vaksinomik dapat dipahami dalam perspektif imunogenetik-genomik yang diaplikasikan untuk memahami dan meningkatkan respon-respon vaksin. Seiring kemajuan riset dan teknologi "*omic*", bidang vaksinomik kini berkembang pesat melampaui variasi genetik *host* dan mencakup efek fungsional (epigenomik, transkriptomik, proteomik) dari pelbagai variasi itu. Kolaborasi riset diperlukan antara ahli vaksinologi, ahli imunologi, ahli bioinformatika, ahli genetika, ahli farmakologi, ahli statistika demi kemajuan riset vaksinomik.

* **Dito Anurogo**, dokter digital pembelajar vaksinomik, penulis 18 buku, sedang studi S2 IKD Biomedis FK UGM Yogyakarta, email: ditoanurogo@gmail.com

Tabel 1. Pelbagai Pendekatan/Teori Terkini tentang Vaksinologi (Poland GA, dkk, 2013)

Teori/Model	Deskripsi	Peralatan yang Digunakan
Reverse vaccinology	Penggunaan data genomik dan analisis <i>in silico</i> untuk identifikasi antigen secara cepat untuk penggunaan vaksin.	Transcriptomik, proteomik, algoritma prediksi epitop, monitoring imun.
Teori jaringan respon imun	Mendeskripsikan imunitas sebagai hasil yang terprediksi dari interaksi/aktivasi sekuensial dari gen-gen dan jalur-jalur gen.	Transcriptomik, proteomik, analisis pathway.
Vaksinomik	Suatu studi komprehensif tentang respon-respon imun terhadap vaksinasi sehingga imunitas terinduksi vaksin dapat dipahami dan diprediksi kemudian diaplikasikan ke perkembangan vaksin-vaksin secara langsung dan rasional.	Transkriptomik, proteomik, epigenomik, imunogenetik/imunogenomik, modeling komputasional, pengawasan sistem imun.
Vaksinologi sistem	Aplikasi pelbagai sistem-metode biologi untuk memahami dan memprediksi respon-respon imun yang menginduksi vaksin.	Transkriptomik, proteomik, epigenomik, modeling komputasional.
Vaksinologi struktural	Penggunaan studi-studi biologi struktural untuk memfasilitasi seleksi epitop-epitop vaksin.	Proteomik, NMR (nuclear magnetic resonance), kristalografi sinar X, pengawasan sistem imun.
Informatik vaksin	Penggunaan pendekatan bioinformatika untuk memfasilitasi pengembangan, produksi, pengujian, dan lisensi vaksin.	Pemodelan komputasi, algoritma prediksi epitop, algoritma pengikatan-HLA, data mining dan integrasi, simulasi matematis dari respon imun.

Farid Alfauzi

“Magnet” Politik Sang Santri Bangkalan

Bak sebuah “magnet” Farid Alfauzi, Politisi Hanura yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI ini selalu mampu menarik hati orang-orang sekitarnya. Tak berlebihan jika kemudian anak seorang Kyai besar di Bangkalan, Madura ini mampu menyumbangkan suara terbesar pada partainya dalam pemilu tahun 2014 lalu.

Terlahir sebagai bungsu dari lima bersaudara yang sejak usia delapan bulan sudah berstatus anak yatim mengharuskan Farid hidup mandiri. Jauh dari kata “manja” yang biasa disandingkan pada kebanyakan anak bungsu.

“Saya terlahir dan hidup dalam tembok pesantren. Abah (bapak-red) saya meninggal saat saya berusia 7-8 bulan. Jadi bisa dikatakan saya tidak ingat tentang abah, abah saya wafat pada umur sangat muda masih 31 tahun” ujar Farid memulai kisahnya.

Meski sejak balita tidak mengenal sosok sang ayah yang sudah terlebih dahulu pergi menghadap Illahi, namun bisa dikatakan sejak kecil kasih sayang seorang ayah ia dapatkan melalui paman, kakek dan kakak-kakak kandung Farid. Beda memang, tapi setidaknya didikan dan ajaran yang mereka tanamkan turut membantu membentuk kepribadian Farid menjadi seorang pria yang tahan banting alias kuat.

Sebut saja ketika sekali waktu Farid meninggalkan sekolah agamanya, sang bunda sama sekali tidak pernah memarahinya. Namun tidak demikian dengan sang paman, yang langsung menanyakannya alasan tidak pergi sekolah. Sementara

sang bunda, lanjut Farid, diakuinya merupakan sosok ibu yang sabar dan tidak pernah memarahi anak-anaknya, termasuk Farid. Meski begitu, kelima anak-anaknya tetap hormat dan segan kepadanya.

“Saat usia SD, saya sekolah dua kali. Dari pagi saya sekolah umum di SDN Burneh I sampai siang hari, sekitar jam dua belas siang. Dan satu jam kemudian saya harus sudah sampai Madrasah Ibtidaiyah Nurul Taufiq, sampai jam lima sore. Malam harinya saya harus mengaji bersama umi (ibunda-red), ada dua malam yang mengharuskan saya mengaji di pondok pesantren di lain desa. Begitulah keseharian rutinitas saya,” paparnya.

Saat harus mengaji di desa lain yang berjarak tiga kilometer dari rumahnya itu, Farid kecil sangat merasakan perjuangannya. Ia harus melewati pematang sawah dan kebun. Terlebih lagi di sepanjang jalan itu belum dialiri listrik. Tak ayal ketika belajar mengaji Farid selalu membawa celurit yang pegang di sebelah kanan. Celurit itulah yang digunakan untuk melindungi diri jika ada ular. Sementara tangan kirinya memegang kitab.

Sempat timbul rasa jenuh dan bosan dalam diri Farid saat itu. Sampai-sampai ia sempat berdoa dan berharap agar segera dewasa sehingga terbebas dari rutinitas tersebut. Ya, ketika duduk di bangku



foto: jayadi/iw

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Hanura, **Farid Alfauzi**

SMP, kesemua kakak Farid belajar di pondok pesantren secara penuh. Sehingga tidak lagi menjalani rutinitas sebelumnya yang harus dua kali belajar di sekolah.

Ketika beranjak remaja, dimana Farid telah memasuki usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) hati Farid pun mulai merasa plong. Ia tidak lagi harus menjalani dua kali sekolah dalam setiap harinya. Bayangan indah tentang hidup di pondok pesantren pun semakin menyelimutinya.

Masuk Pondok Pesantren

Sayangnya, kenyataan tak seindah harapan. Nyatanya meski sudah berada di pondok pesantren, pagi harinya Farid tetap harus pergi ke sekolah di SMP Negeri I Bangkalan. Pulang sekolah ia harus mengikuti sederetan kegiatan yang sudah dijadwalkan pihak pengasuh pondok pesantrennya. Bahkan lebih parah lagi, disana ia harus menyuci dan memasak sendiri. Saat itu Farid merasa lebih tersiksa dari sebelumnya.

“Bayangkan setelah subuh saya ngaji ke pesantren lain khusus mendalami Al Qur’an, karena di pesantren yang saya tempati sudah khusus kitab kuning Fiqih dan Hadist. Antrian untuk ngaji Al Qur’an panjang sekali melingkar seperti ular. Tetapi untungnya ada paman saya yang minta ke Kyai agar saya didahulukan karena akan sekolah di luar pondok pesantren,” cerita Farid.

Usai pulang sekolah di SMP Negeri I Bangkalan, lanjutnya, ada jeda waktu beberapa saat sebelum mengikuti kegiatan lainnya di pondokan pesantren ia gunakan untuk istirahat. Setelah Adzan Ashar berkumandang dilanjutkan sholat berjamaah, Farid pun langsung bergabung bersama santri-santri lainnya untuk mengaji. Hal itu terus dilakukan hingga waktu Magrib tiba.

Sekitar pukul sepuluh malam, disaat seluruh kegiatan di pondokan selesai, seluruh santri langsung bergegas tidur. Namun tidak demikian halnya dengan Farid. Ia



foto: jaka/iw

Farid Alfauzi bersama tim Komisi VI DPR RI saat melakukan kunjungan kerja

gunakan waktu tersebut untuk mengulang pelajaran yang diajarkan sang guru di sekolah. Bahkan ia juga mempelajari pelajaran yang akan menjadi bahasan keesokan harinya di kelasnya. Tidak berlebihan saat pembagian raport, ia mendapat nilai tertinggi di kelasnya.

Begitu pun ketika lulus sekolah SMP, Farid berhasil meraih DaNEM (Daftar Nilai Ebtanas Murni) terbaik di SMP tersebut. Saat itu ia mampu membuktikan bahwa hidup di dalam tembok pesantren dengan berbagai keterbatasan yang dimilikinya, tidak menghalangi semangatnya untuk maju. Dengan nilai terbesar di sekolah tersebut, dapat dipastikan Farid pun diterima di SMA Negeri I Bangkalan yang *notabene* merupakan sekolah terbaik dan favorit di daerah tersebut.

Naik kelas 3 SMA, Farid pun meminta izin untuk pulang ke rumah alias keluar dari pesantren. Alasannya tak lain ingin mempersiapkan diri sepenuhnya bertarung diajangan Sopenmaru (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) untuk bisa masuk jurusan Teknik Kimia di ITS (Institut Teknologi Sepuluh November) Surabaya. Ada alasan tersendiri atas pilihannya mengambil jurusan tersebut, ia ingin sesuatu yang menantang.

Tidak ada usaha yang sia-sia. Berkat doa dan perjuangannya selama setahun belakangan, nama Farid pun termasuk dalam daftar calon mahasiswa teknik kimia yang diterima di kampus tersebut. Bahkan ia menjadi lulusan terbaik ketiga dari SMA tersebut, dan uniknya ketiga lulusan terbaik dari sekolah itu memilih kampus dan jurusan yang sama.

Sekitar tahun 1988 Farid pun hijrah ke Surabaya untuk melanjutkan sekolahnya. Di Ibukota Jawa Timur itulah Farid mulai merasakan perjuangan hidup yang sebenarnya. Untuk menghemat biaya, Farid memilih tempat kost yang berjarak sekitar dua kilometer dari kampusnya. Dinding kamarnya pun terbuat dari gedeg. Di belakang rumah kostnya ada banyak kolam yang didalamnya terdapat biawak-biawak. Untuk dapat tinggal di rumah kost tersebut, ia hanya membayar lima ribu lima ratus rupiah per bulannya. Kondisi demikian tidak membuatnya putus asa. Ia tetap semangat menimba ilmu di Surabaya.

Dalam hal pelajaran kuliah, kali ini Farid benar-benar “kena batunya”. Jika sejak SD hingga SMA ia tidak pernah menemui kesulitan dalam belajar dan menjawab soal-soal sekolah. Kali ini malah sebaliknya.

Mata kuliah yang diajarkan di kampusnya benar-benar dirasakan sangat berat. Terlebih lagi mata kuliah Matematika Teknik Kimia. Dan di saat itu jualah ia merasa salah memilih jurusan.

Saat kuliah Farid pun aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, salah satunya HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Ia mendukung salah seorang temannya untuk menjadi ketua himpunan. Hal itu memudahkan langkahnya untuk menjadi ketua senat di kampus tersebut. Dengan berbagai kegiatan itu membuat kuliahnya terhambat alias molor.

Hijrah Yogyakarta

Singkat cerita, gelar Insinyur (sekarang Sarjana Teknik-*red*), ia hijrah ke Yogyakarta. Di kota pelajar ini ia melanjutkan perkuliahan dengan mengambil gelar Magister Manajemen di UGM. Tujuannya tak lain untuk mendukung kelangsungan bisnis distributor Elpiji yang mulai dirintis sejak di Surabaya.

“Saat itu Indonesia tengah mengalami krisis ekonomi. Harga gas elpiji yang semula dua belas ribu menjadi empat puluh lima ribu. Saya pikir, ini sudah tidak beres. Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah saja, dari pada bisnis tapi juga tidak menentu,” ungkapnya.

Jalur diskusi dan diplomatis untuk memperbaiki negeri ini sudah tak bisa dilakukan. Saatnya mahasiswa turun ke jalan, menuntut reformasi.

Saya ingin kedepan BUMN lepas dari intervensi politik, baik pemerintah maupun dewan. Biarlah BUMN sebagai entitas bisnis negara yang mandiri dan besar.

Masih diingat Farid ketika itu gelombang reformasi semakin meluas. Bahkan khusus untuk Yogya yang *notabene* merupakan kota pelajar itu pun sudah mulai bergejolak untuk turun ke jalan. Farid pun tak mampu meredam jiwa aktivisnya. Sebagai ketua presidium mahasiswa Pasca Sarjana di kampus tersebut ia mulai mengumpulkan



Farid Alfauzi diwawancarai sejumlah wartawan

seluruh mahasiswa S2 untuk turun ke jalan.

“Jalur diskusi dan diplomatis untuk memperbaiki negeri ini sudah tak bisa dilakukan. Saatnya mahasiswa turun ke jalan, menuntut reformasi,” kisah Farid.

Masuk Panggung Politik

Rezim Orde Baru tumbang yang ditandai dengan pengunduran diri Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto. Berhasil ikut “menumbangkan” Orde Baru ketika itu lewat jalur pasca sarjana nya, membuat nama Farid semakin dikenal luas di kota gudeg tersebut. Sementara itu kran demokrasi pun terbuka lebar. Kondisi perpolitikan tanah air mulai ramai, yakni dengan munculnya partai-partai politik baru. Salah satunya PKU (Partai Kebangkitan Umat) yang ikut dimotori oleh Kyai Yusuf Hasyim. Sang Kyai itulah yang mengajak Farid untuk bergabung di partainya.

“Saat itu saya tidak mau karena sedang mempersiapkan diri melanjutkan kuliah S3 saya di Australia. Saat itu juga saya berpikir saya mau masuk politik setelah saya tuntas Doktor saja. Saya mau menuntaskan dulu akademik saya, bisnis sudah mapan baru saya mau terjun ke dunia politik,” kilahnya.

Tahun 1999 ia mencalonkan diri dan akhirnya berhasil menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur lewat partai PKU, begitupun pada periode berikutnya, namun kali ini lewat PPP. Karena ketika itu PKU sepakat untuk bergabung dengan PPP. Saat itu Farid melanjutkan kuliah S3 nya di Universitas Airlangga di Surabaya, mengambil jurusan Ilmu Ekonomi Moneter.

Tahun 2009 menjadi tahun terberat dalam hidup Farid. Sang bunda yang selama ini menjadi orang tua tunggal bagi dirinya mendapat vonis kanker oleh dokter. Sejak saat itu ia berhenti dari berbagai aktivitas politiknya. Ia murni mengabdikan dan melayani sang bunda untuk melawan penyakit tersebut.

Sayangnya, takdir berkata lain, satu setengah tahun setelah vonis dokter sang bunda menghembuskan nafas terakhirnya.

Kepergian sang bunda menjadi pukulan tersendiri bagi Farid yang sejak usia delapan bulan sudah ditinggal meninggal sang ayah dan hanya mengenal sosok bunda. Tak dapat dilukiskan kesedihan Farid, jiwanya goncang. Ia merasa separuh jiwanya hilang berbarengan dengan kepergian sang bunda menghadap Illahi.

Dalam kondisi kehilangan itu Farid mendapat banyak tawaran untuk kembali masuk dunia politik. Namun ia menampik semuanya. Beberapa tahun kemudian, disaat kondisi jiwanya sudah mulai tenang. Ia pun sudah mulai dapat menerima kepergian sang bunda, Farid mulai membuka diri kembali berpolitik. Ia bergabung dengan partai Hanura (Hati Nurani Rakyat).

Singkat cerita, tahun 2014 Farid pun mendapat kesempatan untuk bertarung meraih kursi legislatif di DPR RI. Langkah itu ia ambil setelah mendapat “petunjuk” Illahi untuk memperjuangkan nasib masyarakat di Dapilnya, Jawa timur II. Sebanyak 367 ribu suara ia sumbangkan untuk partai, dan secara pribadi ia memperoleh suara sekitar 150 an ribu suara. Dengan demikian Farid pun berhasil melenggang ke Senayan menjadi wakil rakyat.

Latar belakang pendidikan disertai pengalamannya dalam berbisnis membuat Farid dipercaya untuk menjadi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, yang membidangi masalah perindustrian, perdagangan dan BUMN. Sebagai wakil rakyat, ia memiliki target jangka pendek, membenahi BUMN lewat revisi Undang-undang BUMN, yang ia nilai sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Salah satunya adalah yang terkait dengan anak perusahaan BUMN yang selama ini bebas dari pengawasan dewan dan audit BPK. Padahal menurutnya anak perusahaan BUMN itu juga

merupakan bagian dari BUMN yang harus ikut dikontrol pergerakannya.

“Saya ingin kedepan BUMN lepas dari intervensi politik, baik pemerintah maupun dewan. Biarlah BUMN sebagai entitas bisnis negara yang mandiri dan besar,” ujarnya.

Sementara itu dalam hal karir, Farid mengaku bahwa sejatinya karir atau jabatan yang ia miliki selama ini hanyalah sesuatu yang “*given*” atau pemberian dari sang Khalik. Sehingga apa yang ia jalani selama ini adalah berdasarkan “petunjuk” Illahi. Oleh karena itu ia mengaku tidak memiliki target khusus terkait karir politik atau jabatan dirinya.



Saya dan orangtua saya dipanggil ke dikbud. Akhirnya saya ceritakan bahwa yang saya robek bukan ijazah tapi lembar pemberitahuan kelulusan.

Kenakalan Masa Anak-anak

Jika di bangku kuliah, Farid aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, tidak demikian halnya dengan yang terjadi ketika di masa SD dan SMP. Dimasa kanak-kanak itu Farid yang mengaku memiliki pendirian keras dan sedikit nakal. Salah satunya yang paling diingat Farid adalah ketika perpisahan kelas 6 SD, salah seorang guru yang merupakan wali kelasnya di kelas 5 mengatakan bahwa, “Siapa yang tidak ikut

darmawisata ke Selecta, Malang akan dikurangi nilainya.”

“Apa hubungannya darmawisata dengan nilai ujian kelulusan. Saat itu saya melihat sebagai sebuah ancaman. Saya berontak. Saya tidak ikut darmawisata,” paparnya.

Saat pengumuman ujian kelas 6, Farid kembali membuat ulah sebagai protes ketidakikutan darmawisata. Lembar amplop pengumuman kelulusan dan peringkat di kelas miliknya dirobek Farid. Namun berita yang beredar berkembang bahwa Farid merobek ijazah. Akibat hal itu ia sampai dipanggil menghadap Kepala Disdikbud saat itu.

“Saya dan orangtua saya dipanggil ke Disdikbud. Akhirnya saya ceritakan bahwa yang saya robek bukan ijazah tapi lembar pemberitahuan kelulusan. Itu saya lakukan karena saya tidak terima dengan ancaman itu, apa hubungan ikut darmawisata ke Selecta dengan nilai ujian. Dari sana pun guru saya mengakui kesalahannya,” kisah Farid.

Di masa SMP, kenakalan Farid pun tidak berkurang. Farid dan beberapa teman sekelasnya menggoda salah seorang guru baru yang masih muda dan cantik. Saking seringnya digoda, guru tersebut menangis. Akhirnya Farid pun dipanggil ke kantor Kepala Sekolah. Ia dikenai hukuman berdiri depan kelas, bahkan ia pun sempat beberapa kali merasakan pukulan penggaris kayu yang ada di kelasnya.

“Saat itu saya tidak berani lapor atau mengadu ke ibu dan paman saya. Karena kalau mengadu malah akan mendapat tambahan pukulan dari paman-paman saya itu. Berbeda dengan orangtua sekarang yang tidak terima anaknya dididik dan diajar gurunya. Dulu orangtua saya sadar, guru memukul karena memang muridnya nakal dan sayang, karena kalau tidak dihukum saya malah akan semakin nakal. Jadi saat kejadian itu orang tua saya tidak tahu,” pungkasnya ■



foto : arief/iw

Komisi IV DPR RI melakukan inspeksi ke PT. Sang Hyang Seri meninjau langsung ketersediaan pupuk dan benih di Kabupaten Karawang

Komisi IV Pantau Ketersediaan Pupuk dan Benih serta Alih Fungsi Kawasan Hutan Di Jabar

Panja Benih dan Pupuk, Komisi IV DPR RI meninjau langsung ketersediaan pupuk sekaligus benih di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kali ini Panja melakukan inspeksi ke PT. Sang Hyang Seri untuk melihat dari dekat ketersediaan benih dalam menyambut musim tanam tahun ini.

Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan, saat melihat ketersediaan benih di Karawang, baru-baru ini, menjelaskan, ada empat hal yang sedang dipantau, yaitu kualitas benih, produksi, penyaluran, dan penyerapan benih. "Ketersediaan stok benih saat ini sudah mencukupi. Tetapi, yang jadi masalah sering kali terhambat penyalurannya. Kita ingin memastikan di lapangan seluruh penyaluran benih berjalan baik, sehingga tidak menghambat masa tanam," katanya.

Bersama sejumlah anggota Komisi IV, politisi PKB ini ingin memastikan bahwa penyaluran benih bersubsidi ke para petani tidak tersumbat lagi. Penyaluran benih yang tersumbat

tentu akan mengganggu siklus masa tanam yang dilakukan para petani. Dan salah satu yang menghambat produksi benih adalah utang yang ditanggung PT Sang Hyang Seri. Butuh jadwal ulang utang perusahaan ini.

"Saat ini, sudah ada *reschedulling* utang selama 10 tahun. Dan akan ada penambahan lagi, sehingga bisa membantu *cash flow*. Kalau pun ada PMN, itu tidak untuk membayar utang. PMN untuk meningkatkan nilai aset, produktivitas, kinerja agar swasembada pangan bisa tercapai," papar Daniel lagi.

Ditambahkannya, saat ini PT. Sang Hyang Seri sedang mengajukan PMN sebesar Rp 1 triliun untuk memperkuat kinerja sekaligus meningkatkan nilai asetnya. Ini akan jadi bahan pembahasan di Komisi IV. Minggu depan, sambung Daniel, *master plan* perusahaan BUMN ini rampung. Komisi IV akan menelaah dengan teliti dan cermat, apakah pengajuan PMN ini mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

Tahun depan, sambung Daniel, penyerapan benih bisa berjalan lebih

baik sesuai jadwal masa tanam. Benih-benih yang dihasilkan harus sesuai dengan peta iklim dan peta tanah di masing-masing daerah. Bila akhir tahun ini, terjadi *La Nina*, tentu harus disiapkan benih yang tahan air.

Konservasi Kawasan Hutan Jabar Mendesak

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menyoroti kawasan hutan di Jawa Barat yang tersisa hanya 13%, jauh dari standar minimal yang ditetapkan pemerintah yaitu luas minimal 30% dari luas wilayah saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Panja Hak Guna Usaha (HGU) dan Alih Fungsi Kawasan Hutan ke Perkebunan Cikole Lembang, Bandung, Rabu (20/7).

Politisi Gerindra ini menyarankan untuk mencapai target tersebut Pemerintah Daerah dan Kementerian terkait bisa memaksimalkan lahan-lahan pekarangan dan kebun masyarakat. Jawa Barat itu luas tapi banyak lahannya dimiliki oleh perorangan masyarakat kaya dari

Kota bahkan luar Jawa Barat. Di sini diharapkan Pemda setempat membuat aturan bagi masyarakat yang tidak mengelola tanahnya (membiarkan tidak diurus bertahun-tahun) dicabut saja kepemilikannya lalu diserahkan ke Pemda (negara) agar bisa dimanfaatkan sebagai lahan konservasi atau sebagai lahan terbuka hijau.

“Untuk memenuhi target 30% lahan hijau, Pemda perlu mendata secara rinci ada berapa luas lahan tidur, lahan kosong yang mencapai ribuan hektar di Jawa Barat yang bisa ditanami, apa alasan pemilik tidak mengelola lahan mereka, kasih batas waktu lalu perlukah pemerintah intervensi dengan memanfaatkan lahan yang ada dengan sistem bagi hasil atau kerja sama. Jika ada lahan terbengkalai tapi tidak mau dikelola, yang begini sebaiknya cabut saja hak kepemilikannya,” tegas Edhy.

Komisi IV melihat pemerintah sepertinya masih menganggap kurang begitu penting masalah konservasi hutan, dilihat dari kebijakan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang harus mencari sendiri sumber pendanaan untuk menghidupi kementerianya. KLHK menghimpun PNPB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) setiap tahunnya yang mencapai 5 triliun, sementara total anggaran yang diterima KLHK hanya 6,1 triliun yang sebagian besar pengembalian dari PNPB tadi.

“Artinya inilah yang kami lihat pemerintah nya yang belum serius bukan KLHKnya karena mereka tergantung kebijakan pemerintah, kesolidan KLHK seharusnya diberikan kepercayaan mengelola anggaran lebih besar lagi, bagaimana juga penyerapannya, arah peruntukannya sesuai dengan tujuan,” imbuh Edhy.

Ironisnya, menurut politisi Dapil Sumsel I ini dari berbagai sumber rata-rata nilai kerugian akibat kebakaran hutan kita pada tahun 2015 lalu mencapai 200 triliun, belum termasuk dampak banyaknya masyarakat yang tidak bisa bekerja akibat kebakaran hutan itu. Dengan luas hutan mencapai 120 juta hektar dengan alokasi anggaran 6,1 triliun maka tiap hektar hutan hanya 50rb rupiah alokasinya per tahun. Dengan kunjungan ini kami berharap memantapkan langkah kami dalam



Ketua Komisi IV DPR RI, **Edhy Prabowo**

rangka mengawasi pengelolaan kawasan hutan ke depan.

Di lain pihak, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, San Afri Awang mengemukakan bahwa Pemprov Jawa Barat sudah memiliki Perda Kawasan Perlindungan yang memutuskan 45% kawasan Jawa Barat ini sebagai kawasan perlindungan. Itu artinya mereka memastikan bahwa persoalan air itu nomor satu. Yang harus diperhatikan adalah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, sehingga daerah-daerah *up land* di Jawa Barat sering berkompetisi dengan kepentingan rakyatnya.

“Dari pengamatan KLHK di Jawa Barat terjadi penurunan praktik perambahan hutan oleh masyarakat sekitar, karena Jawa Barat dikuasai oleh Perum Perhutani dengan menjalankan program-program kerakyatannya yang

disebut Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Saya menghimbau pemda segera menindaklanjuti UU Konservasi Tanah dan Air yang dihasilkan oleh Komisi IV sejak tahun 2014 segera diimplementasikan,” papar San Afri Awang

Sedangkan Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat, Budi Susatjo menjelaskan bahwa Pemprov Jabar memiliki program Citarum Bestari (Bersih Indah dan Lestari) dalam rangka perbaikan lingkungan dari hulu sampai hilir dan melibatkan semua pihak, BUMN, Pemkab/Pemkot, Pemerintah pusat dan provinsi yang bersinergi membangun kawasan yang lebih kondusif dari aspek lingkungan.

“Sungai Citarum merupakan sungai yang terpanjang dan terbesar di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Sungai yang mengalir sepanjang 297 km ini membentang dari hulunya di Situ Cisanti yang teletak di kaki Gunung Wayang sebelah selatan Kota Bandung, bermuara di Pantai Utara Pulau Jawa tepatnya di Muara Gembong Kabupaten Bekasi,” jelasnya.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Perum Perhutani, Teguh Hadi Siswanto memaparkan bahwa di Bandung Selatan Perhutani melakukan pendekatan ke masyarakat agar bisa mengembalikan kembali fungsi lahan atau hutan yang sempat terambah ke asalnya. Atau dengan menanam lahan tersebut dengan tanaman kopi. Bagaimana kita menekan praktik perambahan hutan dengan memberdayakan masyarakat sekitar untuk ikut membantu menjaga dan mengelola hutan secara arif,” pungkas Teguh. ■



Kondisi Sungai Citarum



foto : husen/iw

Delegasi Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua, Yudi Widiana meninjau pembangunan Waduk Bendo di Ponorogo, Jawa Timur

Waduk Bendo Tulang Punggung Ponorogo

Waduk selalu jadi tulang punggung daerah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya. Dari waduklah areal sawah terairi dengan baik dan stabil. Produksi dan kualitas pangan pun diupayakan meningkat. Air baku untuk kebutuhan masyarakat juga terpenuhi. Bahkan, waduk bisa juga dimanfaatkan untuk objek pariwisata.

Delegasi Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketuaanya Yudi Widiana meninjau langsung pembangunan Waduk Bendo di Kabupaten Ponorogo, Jatim. Waduk ini jadi salah satu proyek strategis nasional dan sudah dikunjungi pula oleh Presiden Joko

Widodo. Sempat terkendala perizinan, waduk yang menempati areal seluas kurang lebih 295 hektar itu, akan menenggelamkan satu desa dengan memindahkan 67 kk.

Pemindahan penduduknya secara bertahap masih terus dilakukan. Bahkan, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, mengungkapkan, penduduk yang tinggal di lahan waduk justru minta segera dipindahkan. Yang bermasalah adalah waduk tersebut bersentuhan langsung dengan tegakan hutan milik Perhutani. Pihak Perhutani sendiri hanya meminta agar tegakan pohon tersebut direlokasi dan diganti dengan tegakan pohon baru. Kini, sudah tak bermasalah lagi dengan

Perhutani.

“Waduk Bendo salah satu proyek startegis pemerintah. Ini bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di selatan Jatim, khususnya Ponorogo dan Madiun. Bendungan Bendo ini orientasi utamanya adalah penyediaan air baku yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat,” ujar Yudi kepada Parlementaria pertengahan Juli lalu di Ponorogo.

Setelah menyelesaikan kendala teknis di lapangan, sisa waktu pembangunan waduk ini diharapkan bisa segera dioptimalkan. Setidaknya pada akhir 2017 waduk ini sudah terbangun. Sebelumnya, target alokasi Rp 125 miliar tahun 2016 tidak



Wakil Ketua Komisi V DPR RI, **Yudi Widiana**

terserap karena persoalan teknis. Secara keseluruhan anggaran waduk ini sebesar Rp 600 miliar. Dan sudah dianggarkan dalam APBN dengan sistem *multi years*.

Waduk Bendo sendiri berada di Desa Nginden, Kecamatan Sawoo. Sekitar 15 km ke arah tenggara Ponorogo. Lanskapnya berbukit dan masih dipenuhi tegakan pohon. Delegasi Komisi V sendiri sudah mengamati dari dekat proses pembangunan dan maket

master plan waduk ini. Menurut Yudi, kelak, Ponorogo perlu memanfaatkan semaksimal mungkin air yang ada. Tidak saja air itu dibendung, tapi harus dialokasi ke irigasi-irigasi teknis. Ini harus ditangkap oleh Kemen PUPR dan Direktur Irigasi.

Untuk sektor pertanian, Waduk Bendo diharapkan mampu meningkatkan kualitas tanaman pangan. Seiring dengan kampanye pemerintah yang ingin swasembada pangan, maka

keberadaan waduk menjadi sangat penting. Waduk ini kelak akan mengairi 73 ribu hektar sawah di Ponorogo dan sebagian di Madiun. Menurut Bupati Ponorogo, sekitar 60 persen sawah di Ponorogo teraliri waduk, sisanya 40 persen untuk areal sawah di Madiun.

Selain untuk pertanian, waduk tersebut bisa dimanfaatkan untuk tenaga listrik, industri pengendalian banjir, dan pariwisata. Ketua Komisi V Fary Djemy Francis menyambut baik proyek Waduk Bendo ini. Menurutnya, pekerjaan selanjutnya yang tersisa adalah memperbaiki infrastruktur jalan menuju waduk tersebut. karena sudah jadi proyek strategis nasional, perlu dukungan anggaran dari pemerintah dan DPR RI.

Waduk ini memiliki kedalaman hingga 21 meter dan diusahakan konstruksinya tahan hingga 100 tahun. Bila sudah rampung, masyarakat setempat akan menikmati air baku. Selain itu, para petani di Ponorogo dan madiun juga tak perlu khawatir kekurangan air saat musim kemarau tiba. Musim panen padi bisa datang dua kali dalam setahun. Inilah waduk masa depan dan menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat di selatan Jatim. Waduk yang menjadi tulang punggung Ponorogo. ■ (mh)



foto : skyscrapercity.com

foto : dimensimaket.blogspot.com

Pembangunan Waduk Bendi di Desa Nginden, Kecamatan Sawoo, Ponorogo. inset: maket waduk Bendo

Sarana Prasarana Pendidikan P4TK Sumut Buruk Akibat Rendahnya Anggaran Pendidikan

Jumat, 22 Juli lalu, tiga Tim Kunjungan Lapangan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, riset dan teknologi pendidikan tinggi, pemuda dan olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif melakukan kunjungan lapangan ke tiga provinsi di Indonesia. Dua tim di bidang pendidikan masing-masing melakukan peninjauan ke Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Bidang Bangunan dan Listrik (BBL), di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan P4TK Bidang Mesin dan Teknik Industri di Provinsi Jawa Barat (Jabar). Dan satu tim di bidang pariwisata melakukan peninjauan ke obyek-obyek pariwisata di Provinsi Jawa Tengah.

Tim Kunjungan Lapangan Komisi

X DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara dipimpin Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra, ke Provinsi Jawa Barat dipimpin Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah, sedangkan Kunjungan Lapangan Komisi X DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah dipimpin Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih.

Di Medan, Sumatera Utara, saat melakukan peninjauan ke P4TK Bidang Bangunan dan Listrik (BBL) Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra menyatakan keprihatinannya melihat kondisi sarana dan prasarana yang ada.

Menurut Sutan demikian sapaan akrabnya, menjadi skala prioritas bagi Komisi X DPR RI dalam hal melihat bagaimana sarana dan prasarana pendidikan. Karena Komisi X ingin betul anak-anak Indonesia ke depan mempunyai *skill* yang bisa bersaing

dengan negara-negara lain. Namun ternyata setelah ia dan Tim Komisi X melakukan peninjauan ke P4TK BBL, kondisinya sangat memprihatinkan.

“Setelah diperhatikan, sarana dan prasarana pendidikan di P4TK BBL ini seperti meja dan kursi untuk praktek saja mungkin sudah dari jaman Belanda,” kata Sutan di Medan, Sumut.

Tidak itu saja, ia melihat, peralatan-peralatan untuk praktek pun yang diterima P4TK BBL terakhir tahun 1980an. “Bayangkan, komputer saja masih ada komputer kodok mungkin usianya sudah 35 tahun. Sementara sekarang ini, yang namanya teknologi jika tidak terus *diupdate* kita akan ketinggalan jaman,” papar politisi dari Partai Gerindra ini.

Sementara, tambah Sutan, saat ini kita sudah berada di MEA tentunya



foto : suciati/iw

Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Sutan Adil Hendra saat meninjau P4TK bidang Bangunan dan Listrik di Medan



foto : arief/iw

Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Sutan Adil Hendra saat meninjau P4TK bidang Bangunan dan Listrik di Medan

kalau skill daripada anak-anak kita ke depan tidak mempunyai kualitas, anak-anak kita atau generasi berikutnya bukan hanya numpang di negara sendiri bahkan akan terusir.

“Oleh karena itu menjadi suatu catatan bagi Komisi X DPR RI untuk memperjuangkan, tapi ini semua adalah langkah kita untuk menciptakan SDM yang berkualitas. Kami berjanji akan memperjuangkan, agar mutu kualitas dan skill anak-anak kita ke depan bisa menjadi lebih baik”, tegasnya.

Keberadaan P4TKBBL, menurut Sutan adalah sesuatu yang harus terus dilakukan karena ini adalah pabrik SDM bagi tenaga pendidik di SMK. “Jika keterampilan itu tidak didukung oleh yang memberikan pembelajaran bagi mereka karena pabriknya di sini, bagaimana mereka mau menurunkan ilmu keterampilan itu,” ungkapnya.

Ia menegaskan buruknya kondisi P4TK BBL di Medan, Sumut adalah sebagai salah satu akibat rendahnya anggaran pendidikan. “Kurangnya anggaran pendidikan mengakibatkan kondisi-kondisi sarana prasarana pendidikan buruk dan SDM kurang memadai,” kata Sutan kepada Parlemen.

Menurut politisi Gerindra ini, jika bicara menata suatu pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari adanya sarana dan fasilitasnya, SDM dan manajemennya. Karena itu ini merupakan suatu kebutuhan daripada pendidikan kita.

Pendidikan semestinya, tandas Sutan, menjadi skala prioritas. Oleh karena itu, tegasnya, Komisi X DPR RI akan berjuang terus untuk meningkatkan anggaran pendidikan.

Adanya pemotongan anggaran pendidikan dalam APBNP 2016 sangat disesalkan politisi Gerindra ini. “Oleh karenanya ke depan kita ingin pemerintah pusat karena ini berada di daerah, P4TK menjadi salah satu yang diharapkan untuk menempa generasi yang memiliki skill,” harapnya.

P4TK di Medan ini, tambah Sutan, merupakan satu-satunya pusat pendidikan di Indonesia untuk Bidang Bangunan dan Listrik. “Bayangkan kalau ini menjadi sesuatu pabrik dalam bidang bangunan dan listrik namun peralatannya sungguh memprihatinkan, bagaimana mereka mempunyai SDM, bagaimana mereka mempunyai kemampuan sementara peralatan untuk mereka mendapatkan

ilmu itu tidak ada,” tukasnya.

Ciptakan Guru Berkeahlian Khusus

Di Cimahi, Jawa Barat, Tim Komisi X dipimpin Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah menaruh perhatian terhadap Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri (P4TK BMTI) untuk dapat menciptakan lebih banyak guru yang berkeahlian khusus, sehingga dapat mendidik siswa-siswa kejuruan yang dapat bersaing dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Menurut Anggota Tim Komisi X Dadang Rusdina, Indonesia sangat memerlukan pusat pengembangan pendidikan seperti P4TK. Karena menurutnya SMK yang didirikan masih kekurangan guru, dan alat-alat yang mampu menunjang siswa kejuruan dan profesional ketika lulus pendidikan dari sekolah.

Ia menginformasikan, bahwa ternyata dari SMK seluruh Indonesia, 95% belum memiliki alat-alat pendidikan yang memadai, artinya secara kualitas masih patut dipertanyakan. “Kita memasuki era persaingan MEA, jika berbicara



foto : agung/iw

Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Ferdiansyah melakukan kunjungan kerja ke P4TK Bidang Mesin dan Teknik Industri di Cimahi, Jawa Barat

mengenai daya saing maka kita membutuhkan anak-anak didik yang berkelas regional dan internasional. Dan ketika kita mengejar target itu maka yang menjadi masalah adalah sarana dan prasarana,” ungkapnya.

Terkait guru, tambah Dadang, banyak sekali keluhan. Selain kesejahteraan ternyata masih terdapat kekurangan guru yang berkeahlian khusus. Hal ini menjadi pekerjaan rumah dan akan dibawa raker dengan Kemendikbud, berapa jumlah guru yang harus diciptakan terutama yang berkeahlian khusus dan berapa banyak perlengkapan yang harus dipersiapkan.

“Ternyata P4TK ini adalah bengkel guru untuk melatih guru dan kita juga lihat mesin-mesin yang ada adalah mesin-mesin tua yang diproduksi 30 tahun yang lalu, maka semua harus dipersiapkan sesegera mungkin,” paparnya.

Untuk itu, yang harus dilakukan DPR RI dan Pemerintah adalah terkait regulasi. Seperti masukan yang didapat ada keluhan sulit sekali siswa mendapatkan tempat magang di perusahaan/industri karena tidak mau menerima mereka yang magang.

“Ini harus ada tekanan dari pemerintah bahwa harus ada regulasi

yang mengatur bahwa perusahaan/ industri harus mau menerima anak-anak SMK yang akan magang. Kemudian keberpihakan anggaran, menjadi salah satu yang penting untuk menjawab tantangan SMK pada saat sekarang,” tegas Dadang Rusdina dari Dapil Jawa Barat II.

Kembangkan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal

Di Semarang, Jawa Tengah, Ketua Tim Komisi X DPR RI yang juga Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata untuk mengembangkan pariwisata berbasis kearifan lokal.

Permintaan tersebut disampaikan Fikri demikian sapaan akrabnya, setelah meninjau obyek wisata Goa Kreo yang menjadi primadona dari obyek wisata di Kota Semarang, Jawa Tengah. Primadona, karena bentuknya yang sangat indah dan mengesankan. “Pariwisata menjadi salah satu komoditas perekonomian yang terus berkembang untuk menyokong keuangan Indonesia, bisa dilihat dari jumlah wisatawan asing yang berdatangan ke Indonesia, dan ini menjadi bukti majunya sektor pariwisata di republik ini,” ungkap

politisi F-PKS.

Terkait dengan hal tersebut, ia berharap agar pariwisata berbasis kearifan lokal Indonesia semakin dikenal oleh dunia. Menurut politisi asal Dapil Jateng IX ini, Indonesia memiliki sebuah eksotisme alam yang berharga. Ia memberi contoh, tidak banyak wisata di dunia yang menyuguhkan alam lengkap dengan kehidupan asli monyet seperti yang dapat disaksikan di Goa Kreo, Semarang.

“Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara, karena keunikan ekosistem itu tidak ada di negara lain selain di Indonesia,” ujarnya.

Di Inggris kalau mau melihat monyet hanya di kebun binatang. “Itu kata mereka lho, turis yang datang kesini (Goa Kreo). Jadi ketika mereka datang ke Goa Kreo mereka heran dan merasa takjub,” ungkap Fikri seraya menambahkan ini peluang buat kita untuk mengembangkan wisata.

Kekayaan yang ada di Indonesia tidak terkecuali Jawa Tengah, menurutnya, merupakan modal awal untuk bisa membuat sebuah *sosioentrepreneur*. Kebudayaan, alam, lingkungan bahkan pola hidup masyarakat mampu untuk dijadikan destinasi pariwisata.

Sementara aktivis pariwisata Jawa

Tengah, Yos mengatakan bahwa Jawa Tengah mempunyai potensi untuk memiliki banyak destinasi wisata alam yang sekaligus menyuguhkan budaya dan keanggunan masyarakat.

Selain itu, sambungnya, infrastruktur untuk menunjang pariwisata harus terus diperbaiki oleh pemerintah atau swadaya masyarakat. “Jadi banyak masyarakat yang sudah sadar akan potensi wisata daerahnya. Tapi masih kesulitan dalam promosi wisata, jadi belum banyak yang tahu kalau disitu ada wisata,” ungkapnya.



Pariwisata menjadi salah satu komoditas perekonomian yang terus berkembang untuk menyokong keuangan Indonesia, bisa dilihat dari jumlah wisatawan asing yang berdatangan ke Indonesia



Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya yang turut serta ke Jawa Tengah menyatakan Jawa Tengah memiliki potensi destinasi wisata religi yang luar biasa.

Menurutnya, Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) di Semarang jadi maskot religi Jawa Tengah. Desain arsitekturnya merupakan gubahan baru yang mengambil model dari tradisi para wali dengan membubuhkan corak universal arsitektur Islam. Kubah utama dilengkapi dengan minaret runcing menjulang di keempat sisinya.

Selain itu, tambah Riefky, di Semarang ini ada rumah ibadah lainnya seperti Gereja Blenduk, dan Klenteng Sam Poo Kong yang juga punya daya tarik tersendiri.

“Semarang mempunyai sejarah

panjang perdamaian dan keharmonisan antar agama. Keberadaan tiga rumah ibadah yang dikunjungi Komisi X ini bentuk dari keharmonisan tersebut. Jadi ini bukti keharmonisan masa lalu. Tidak hanya untuk menceritakan sejarah, tapi juga jadi obyek wisata yang menarik bagi para wisatawan nusantara dan mancanegara,” jelas politisi Partai Demokrat.

Politisi asal Dapil Aceh I ini mengatakan MAJT, Gereja Blenduk, dan Klenteng Sam Poo Kong jadi obyek wisata terpadu. Di MAJT misalnya, bisa dipadukan sebagai wahana pendidikan, religi, dan pusat aktivitas syiar Islam. Desain arsitektur MAJT merupakan perpaduan antara arsitektur Jawa, Roma, dan Arab.

Menurut Riefky, potensi yang luar biasa terhadap wisata religi ini tentu tidak akan berkembang kalau tidak ada dukungan dari pemerintah daerahnya. Selain dukungan dari pemerintah pusat tentu inisiatif awal harus ada dari pemerintah setempat. Tanpa itu akan sulit, sambungnya.

“Komisi X DPR RI mengapresiasi Pemerintah Kota, Kabupaten, maupun Provinsi Jawa Tengah yang telah mendukung berkembangnya wisata

religi yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini,” ungkapnya.

Ia berharap ada sinergisitas antara Kementerian Pariwisata RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mendukung pemerintah daerah dalam membangkitkan wisata religi.

“Ke depan kita berharap selain dukungan dari pemerintah pusat tentu inisiatif awal harus ada dari pemerintah setempat, tanpa itu akan sulit. Tetapi tentu kami yang berada di Komisi X DPR RI yang berasal dari berbagai macam provinsi ingin melihat semakin maju dan tentu dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita harapkan lebih besar lagi bagi tempat-tempat seperti ini,” harapnya.

Ditambahkannya, Kementerian Pariwisata RI tentu memiliki program-program pengembangan wisata religi. Even-even wisata religi dan promosinya mesti gencar dilakukan. Apalagi, di Kementerian Pendidikan ada Direktorat Kebudayaan yang bertugas mengembangkan tempat-tempat bersejarah seperti cagar budaya dan museum-museum. ■

(sc/as/iw)



foto : iwan armania/iw

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqif berbincang dengan turis asing di sela-sela kunjungan kerja ke obyek wisata Goa Kreo



foto : rizka/iw

Tim Kunker Panja MEA-BKSAP DPR RI pada pertemuan dengan Pemerintah Riau.

Menelisik Pemberlakuan MEA di Riau

Provinsi Riau berbatasan langsung dengan dua negeri jiran, Singapura dan Malaysia. Resistensi penyelundupan barang masih sering terjadi di sini. Penduduk setempat pun kerap mendapat barang-barang kebutuhan pokoknya dari dua negeri jiran itu. Di tengah pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), wilayah ini jadi salah satu yang dipantau.

Para bupati se-Provinsi Riau duduk berjejer berhadapan langsung dengan Panitia Kerja (Panja) MEA yang dibentuk Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. Satu per satu persoalan di kabupaten/kota di seluruh Kepri diungkap. Dari sektor industri, perdagangan, UKM, sampai ke persoalan infrastruktur dan sumber daya manusia dikemukakan. Panja MEA berkepentingan ingin menelisik lebih jauh seperti apa progres perberlakuan MEA di Kepri.



foto : rizka/iw

Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf saat memberikan sambutan

Bertempat di Kantor Gubernur Riau, akhir Juli lalu, tukar pikiran dan informasi seputar MEA terjadi antara

Pemprov Riau dan BKSAP DPR. Di Kota Dumai, misalnya, pertumbuhan industri terhambat, karena pelabuhan yang dikelola PT. Pelindo belum mampu menampung pertumbuhan yang terjadi. Zulkifli AS Walikota Dumai mengatakan, mestinya, Dumai sudah bisa memiliki pelabuhan internasional sendiri. Ini untuk menghentikan arus barang ilegal.

Saat ini industri swasta kerap “membuka” pelabuhan masing-masing untuk memperlancar arus barang. Di sisi lain, kondisi masyarakatnya sangat memprihatinkan. Padahal, mereka berada di tapal batas. Sementara perolehan pelabuhan dan pajak dari lalu lintas barang di Pelabuhan Dumai diserahkan ke pusat. Perlu kebijakan khusus, agar pendapatan dari pengelolaan pelabuhan juga bisa dinikmati masyarakat Dumai, terutama di kawasan yang berbatasan dengan negeri jiran.

Lain lagi apa yang diungkap Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir. Wilayahnya yang berbatasan dengan Johor Baru, Malaysia, merupakan kawasan hutan (92%) penghasil sagu terbaik di Indonesia. Masalahnya, produk sagu tak mudah untuk diekspor. Ada kesenjangan yang mencolok di wilayah ini dengan negara tetangga. Masyarakatnya kesulitan memperoleh kebutuhan sehari-hari.

Dari populasi 240 ribu jiwa, angka kemiskinannya mencapai 43%, tertinggi di Riau dan Sumatera, bahkan di Indonesia. Jerat kemiskinan dilatari oleh mahalnya harga sembako, kurangnya lapangan kerja, dan peraturan lintas batas yang sangat ketat. Melihat kenyataan ini, BKSAP DPR RI pun bersikap atas apa yang terjadi di Kepri.

Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, mengatakan, ingin menjadi ujung tombak dalam membuka akses kesejahteraan bagi masyarakat di Kepri. “Kami melalui BKSAP menjadi ujung tombak dalam diplomasi parlemen untuk mengadvokasi dan mensosialisasikan kepentingan Indonesia dalam kerja sama MEA. Semua ini, tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, juga kepentingan bangsa dan negara yang sama-sama kita cinta ini.”



foto : rizka/iw

Tim Kunker Panja MEA dipimpin Juliari Batubara meninjau pusat makanan khas Riau di Pekanbaru

Ketua Panja MEA BKSAP Juliari P. Batubara dalam kesempatan yang sama merekomendasikan, Kabupaten Kepulauan Meranti masuk dalam kawasan perdagangan bebas atau Free

Trade Zone (FTZ). Temuan selama di Kepri ini akan segera disampaikan ke komisi-komisi terkait di DPR RI agar diteruskan kepada mitranya masing-masing. Namun di sisi lain, Juliari



Dari populasi 240 ribu jiwa, angka kemiskinannya mencapai 43%, tertinggi di Riau dan Sumatera, bahkan di Indonesia.



foto : rizka/iw

Tim Kunker Panja MEA dipimpin Juliari Batubara meninjau salah satu galeri batik asli Riau di Pekanbaru

mengingatkan, sebaiknya pemerintah daerah jangan sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat.

“Pemerintah pusat sudah punya program kerja kementerian-kementerian terkait dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tetapi, kalau saya lihat harusnya pemerintah provinsi dan Daerah Tingkat II juga tidak boleh terlalu tergantung pada pemerintah pusat. Mereka harus jaga anggaran yang mereka miliki agar benar-benar digunakan untuk peningkatan kualitas SDM,” ujar Politisi PDI Perjuangan ini.

Secara geografis, Kepri yang sangat dekat dengan dunia internasional, mestinya sudah ada kampanye tujuan wisata dan investasi yang masif. “Saya belum lihat promosi-promosi itu dan ini harus segera dimulai,” seru Juliari. ■

(bksap/ry)

Hindari Klaim Negara Lain, Natuna Harus Dikembangkan

Pemerintah berkali-kali menegaskan tak terlibat sengketa wilayah di Laut China Selatan. Namun imbas dari agresifnya kebijakan laut negara Cina tetap terasa bagi kedaulatan nasional, terutama di Kepulauan Natuna.



foto : kresno/iw

Anggota Komisi I DPR RI, **Bobby Adhityo Rizaldi**

Pemerintah harus tegas dalam langkah penegakan hukum di wilayah ZEE Indonesia. Beberapa waktu terakhir, wilayah Laut Cina Selatan memanas karena beberapa insiden. Cina sempat melayangkan protes kepada Pemerintah Indonesia atas penangkapan kapal ikan Cina di Perairan Natuna di ZEE Indonesia pada 17 Juni 2016. Penentuan batas ini menyangkut hak masing-masing negara untuk mengeksplorasi kekayaan alam di areal tersebut.

Memberikan respon terkait konflik tersebut, anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan bahwa Natuna merupakan milik NKRI. Guna meniadakan klaim, Pemerintah diminta ekonomi di Pulau Natuna dikembangkan. Pengembangan, imbaunya, terkait perikanan dan migas.

“Ekonomi dan masalah kedaulatan, itu saja,” tutur Bobby, di Ruang Kerjanya Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta.

Pengembangan ekonomi di Natuna dinilai realistis. Apalagi, Natuna merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Natuna juga menjadi jalur utama pelayaran laut dunia. Pengembangan Natuna diyakini sejalan dengan rencana pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Booby menjelaskan awal terjadi adalah pengakuan Cina terjadi *overlapping claims*-tumpang tindih terkait penentuan batas maritim atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kondisi itu terjadi di beberapa wilayah perairan di Laut China Selatan.

Letak strategisnya yang merupakan jalur perdagangan dan di Natuna ini karena memiliki kandungan minyak yang sangat besar. Tetapi yang paling utama adalah siapa yang menguasai jalur koordinasi perdagangan di situ.

Indonesia sebenarnya bukan negara yang berhadapan langsung

dengan Laut Cina Selatan. Di situ juga ada Vietnam dan Filipina. Terjadi dinamika selama ini, apalagi dengan pembangunan pulau buatan oleh Cina di Laut Cina Selatan. Dia bangun pangkalan di atas terumbu karang yang ingin diakui sebagai pulau. Padahal di dalam Konvensi Internasional tentang Hukum Laut United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) pulau buatan tidak diakui.

Telah ada keputusan Arbitase Internasional di Den Haag Belanda, tetapi keputusan itu mengikat, dan tidak bisa memaksa. Cina telah mengatakan tidak akan menaati atau tidak melaksanakan dan tidak patuh terhadap hasil keputusan itu.

Kedua Negara sebagai bangsa, juga mempunyai hubungan strategis. Hal ini juga sudah diagendakan pembicaraan pada Sidang PBB. Pembicaraan terkait hasil putusan arbitase internasional tapi ini tidak memaksa.

Klaim Tiongkok atas Laut China Selatan



Standar Ganda Cina

Lebih jauh Bobby mengatakan, utamanya sendiri Cina telah mengatakan bahwa mengakui Indonesia berdaulat, tetapi mereka juga mengakui bahwa mempunyai zona perikanan tradisional.

“Jadi sebenarnya disitu ada standar ganda. Jadi kita kuat-kuatan aja kalau Cina masih menganggap kita strategis harusnya dia tidak akan sampai melakukan hal-hal yang kita sudah terjadi insiden 3 kali di tahun 2016. Seperti kapal melintas,” ungkapnya.

Yang bisa dilakukan adalah Indonesia tetap menyuarakan bahwa kita tidak mengakui hal tersebut, sambil secara formal juga memperkuat kemampuan militer di Natuna. Dan itu sudah dilakukan di APBN-P Tahun 2016 ini. Setelah Presiden Joko Widodo kesana, langsung dianggarkan cukup besar untuk pembangunan Natuna.

Menanggapi kekhawatiran situasi akan terus memanas yang mengakibatkan terjadi peperangan di Laut Cina Selatan. Menurut Bobby dan Fraksinya Partai Golkar bahwa 10 – 15 tahun ke depan itu sudah tidak ada lagi.



Yang bisa dilakukan adalah Indonesia tetap menyuarakan bahwa kita tidak mengakui hal tersebut, sambil secara formal juga memperkuat kemampuan militer di Natuna.



“Perang konvensional yang tembak-tembakkan itu sudah tidak akan terjadi, jadi efek gentar segala macam itu karena kerugiannya itu jauh lebih besar.

Yang Bobby lihat ini akan berpotensi menimbulkan dinamika-dinamika kecil seperti nelayan dan segala macam. Sehingga sebaiknya

kita memperkuat keamanan laut, serta politik formal.

“Kita tetap menyarankan tidak mengakui garis putus-putus. Hanya itu yang bisa lakukan karena secara hitungan kalau Cina melakukan invansi dan dia ruginya lebih besar dan kita mitra strategis mereka,” tegasnya.

Kekuatan militer Indonesia sudah termasuk tertinggi di kawasan. Secara postur kita sudah kuat, yang perlu diperbaiki adalah koordinasi tentang pengamanan laut.

Tadinya ada 13 institusi sekarang dikoordinasikan oleh Bakamla. Yang ternyata perkembangannya bukan hanya koordinasi, maka perlu lebih diperkuat.

Bakamla harus punya kekuatan sendiri, dan itu perlu payung hukum UU lagi. Dan itu pada tahun depan Komisi I akan membuat UU khusus tentang Bakamla.

“Kedaulatan itu penting, kalau tidak punya kedaulatan, kita tidak bisa mengatur nasib kita sendiri,” imbuhnya. ■

(as)



foto: bksap/iw

Konferensi WHO Advancing Global Health Security: From Commitments to Action di Nusa Dua Bali

Turisme, Perdagangan dan Kesehatan Perlu Dikelola Terpadu

Sektor turisme, perdagangan dan kesehatan perlu dikelola secara terpadu. Ini dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif yang muncul dari ketiga sector tersebut. Ini juga sejalan dengan konsep *one health* yang menegaskan bahwa aspek kesehatan harus ditangani secara terpadu dan lintas-sektoral.

Demikian ditekankan Ketua Panitia Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Panja SDGs), sekaligus Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf saat menjadi panelis dalam Konferensi WHO *Advancing Global Health Security: From Commitments to Actions*, di Nusa Dua Bali, baru-baru ini.

“Turisme menciptakan kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan perdagangan. Nilai total perdagangan Indonesia pada 2015 mencapai US\$ 292,9 miliar. Tetapi aktivitas dari keduanya bersifat *mobile* sehingga

dapat secara signifikan mengubah dan menyebarkan wabah penyakit menular,” urai Nurhayati.

Berdasarkan pengalamannya saat memimpin Panja MDGs—yang saat ini diteruskan menjadi Panja SDGs—aspek kesehatan memang berpotensi memengaruhi wisatawan. Untuk itu, tegas politisi F-PD itu, Panja MDGs fokus pada isu-isu kesehatan.

Sehingga, salah satu hasil dari kajian Panja MDGs dalam aspek kesehatan adalah pentingnya penguatan pemahaman publik maupun negara. Dan langkah tersebut memerlukan peran kuat dari parlemen.

“Parlemen adalah figur politik

terpilih dan berpengaruh di konstituen mereka. Sehingga perlu ambil bagian dalam memperkuat pemahaman publik akan kesehatan,” imbuhnya.

Nurhayati menjelaskan dengan globalisasi saat ini, beragam isu wabah penyakit dapat dengan mudah diketahui dan itu menuntut aspek kesiapsiagaan yang tinggi bagi perangkat Negara. Semisal saat kasus MERS Coronavirus (CoV) yang terjadi di sejumlah Negara termasuk Korea Selatan tahun lalu, kewaspadaan Indonesia harus dalam tingkat yang tinggi.

“Jutaan rakyat kita bepergian ke kawasan Timur Tengah untuk bekerja, Haji/Umroh, belajar dan wisata,” terang politisi asal dapil Jawa Timur ini.



foto : bksap/iw

Ketua BKSAP DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf saat berpidato pada Konferensi WHO



Parlemen adalah figur politik terpilih dan berpengaruh di konstituen mereka. Sehingga perlu ambil bagian dalam memperkuat pemahaman publik akan kesehatan.



Lebih jauh, ia menerangkan, dalam segala fungsinya, parlemen berperan penting dalam konteks membangun Agenda Keamanan Kesehatan Global (*Global Health Security Agenda/GHSA*) yang juga menuntut kolaborasi multi-sektor. Dalam hal anggaran, Parlemen membahas rancangan anggaran untuk kesehatan.

“Untuk Indonesia, sesuai rekomendasi yang terus menerus dari Panja MDGs, Indonesia telah mengalokasikan 5 persen dari total anggaran negara untuk sektor kesehatan. Promosi kesehatan dan aspek pencegahan penyakit harus menjadi program prioritas dari sektor ini,” saran dia.

Konferensi WHO tersebut

digelar untuk membahas beragam mekanisme lanjutan pasca pertemuan WHO di Cape-Town 2015, ketika wabah Ebola menyeruak. Konferensi juga memperkenalkan upaya-upaya evaluasi bersama dan yang dilakukan oleh pihak luar (*Joint External Evaluation*) dalam upaya kesiapsiagaan kesehatan.

Konferensi juga lebih jauh memperkenalkan strategi *one health*, untuk keterpaduan penanganan kesehatan lintas-sektoral. Sejumlah pakar kesehatan, praktisi WHO, hingga perwakilan dari 52 negara menghadiri konferensi yang dibuka oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila Djuwita F. Moeloek. ■ (sf)



foto : bksap/iw



foto : bksap/iw

Peserta Konferensi WHO *Advancing Global Health Security: From Commitments to Action* di Nusa Dua Bali



Delegasi negara peserta APA Standing Committee Meeting on Economic and Sustainable Development di Islamabad tahun 2016

Delegasi DPR Usulkan Kepentingan Nasional di Sidang APA

Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee Meeting on Economic and Sustainable Development membahas enam rancangan resolusi di bidang Komisi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan. Delegasi DPR RI berhasil memasukkan 14 paragraf usulan untuk kepentingan nasional.

Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Tjatur Sapto Edy (F-PAN), menghadiri Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee Meeting on Economic and Sustainable Development, di Islamabad, Pakistan 25-29 Juli 2016 lalu. Turut serta dalam Delegasi Indonesia, yakni Anggota BKSAP DPR RI Hamdhani (F-P Nasdem)

Sidang tersebut dihadiri oleh 22 dari 42 Negara Anggota yaitu: Afganistan, Bahrain, Bhutan, Kamboja, Korea Utara, Indonesia, Iran, Irak, Kamboja, Kuwait, Kyrgyztan, Lebanon, Pakistan, Palestina, RRT, Rusia, Sri Lanka, Turki, Thailand, Vietnam, Yemen dan Yordania.

Sidang membahas enam rancangan resolusi di bidang Komisi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan. Pertama, *Resolution on Financial Affairs: Ensuring Efforts for Economic Growth*; kemudian *Resolution on the Role of APA Parliaments to Adopt Legislation in Supporting the Implementation of the Sustainable Development Goals*.

Berikutnya, *Resolution on Asian Integrated Energy Market*; *Resolution on Environmental Issues*; *Resolution on Poverty Eradication* dan *Resolution on Water and Sanitation in Asia for All*.

Dalam kesempatan sidang ini, para delegasi yang hadir menyampaikan pandangan dan masukan terhadap berbagai rancangan resolusi yang dibahas. Dalam pengamatan, yang terlihat aktif dalam perdebatan adalah



foto : bksap/iw

Delegasi DPR RI (tampak di layar) membacakan speech pada sesi General Debate, APA Standing Committee Meeting on Economic and Sustainable Development.

Indonesia, Iran, Yordania, dan Pakistan.

Tjatur mengungkapkan, Delegasi Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam diskusi sehingga berhasil memasukkan 14 paragraf usulan, yang mengakomodasi kepentingan nasional Indonesia, ke dalam rancangan-

rancangan resolusi mengenai isu energi, lingkungan hidup, SDGs, stabilisasi keuangan dan pengentasan kemiskinan.

Sidang akhirnya menyepakati enam rancangan resolusi tersebut diatas yang akan dibawa dan diadopsi pada

Sidang Pleno ke-9, yang rencananya diselenggarakan pada tanggal 27 November - 2 Desember 2016 mendatang di Siam Reap, Kamboja.

Disela-sela menghadiri sidang APA, Delegasi DPR RI juga melakukan tatap muka dengan masyarakat Indonesia di Islamabad dan sekitarnya yang umumnya adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan di *International Islamic University Islamabad (IIUI)*. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah mahasiswa menyampaikan harapan dan dukungan DPR RI diantaranya mengenai pemberian beasiswa.

Sebagaimana diketahui, APA merupakan forum antar Parlemen di kawasan Asia yang bertujuan untuk mendorong kerja sama dalam penyelesaian isu yang menjadi perhatian bersama.

Selama ini, Indonesia melalui BKSAP DPR RI selalu berpartisipasi aktif di berbagai forum kerja sama antar Parlemen, termasuk APA. Dalam setiap sidang, BKSAP terus mendorong kerja sama regional antar parlemen pada isu yang menjadi kepentingan nasional Indonesia. ■

(sf)



foto : bksap/iw

Delegasi Indonesia yang dipimpin Anggota BKSAP Tjatur Sapto Edy (kedua dari kanan) bersama Anggota delegasi Islamabad

Merit Sistem Penting, Hargai Prestasi Pegawai Pekerja Keras

Ada pesan penting yang disampaikan Ketua DPR RI Ade Komarudin saat menghadiri acara Halal Bihalal bersama karyawan-karyawati Setjen DPR RI dan keluarga besar karyawan yang membantu kegiatan Dewan, usai Lebaran lalu.

Hadir bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan tiga mantan Sekjen DPR RI Ny. Sumaryati Haryanto, Faisal Djamal dan Nining Indra Saleh serta Pengurus Pensiunan Pegawai Setjen (P3S) DPR, Ketua DPR RI mendorong agar lembaga DPR RI dibangun berdasarkan kinerja dan profesionalitas atau disebutnya sebagai merit sistem.

Ade Komarudin yang akrab disapa Akom menyampaikan hal itu seiring dengan Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat. “Ibu Win sebentar lagi akan pensiun, kami atas nama Pimpinan Dewan tentu terima kasih karena terus memberikan bimbingan kepada tim kesetjanaan. Karena itu saya titip agar merit sistem diberlakukan di DPR,” ujarnya.

Merit sistem yang dimaksud adalah penghargaan terhadap prestasi yang dicapai oleh pegawai yang melakukan kerja keras. “Kita tak usah mengenal lagi prestasi berdasarkan umur dan senioritas, tapi prestasi dan jabatan yang disandang berdasarkan prestasi yang telah dilakukan,” paparnya.

Jabatan itu kata Akom, adalah hak bagi pegawai yang telah melakukan kerja keras, bukan seseorang yang lebih senior atau memasuki pensiun. “Seseorang berhak atas jabatan itu bukan berdasarkan umur atau yang akan memasuki pensiun, atau senior, tetapi berdasarkan prestasi dan kinerja yang patut diberikan *reward* oleh kita,”



Ketua DPR RI, Ade Komarudin

tegas dia.

Politisi Golkar itu menegaskan bahwa merit sistem itu penting diberlakukan untuk kebaikan semua dan pegawai yang bekerja di Setjen DPR RI bisa lebih termotivasi. “Merit sistem itu untuk kebaikan kita semua agar yang bekerja disini bisa lebih termotivasi,” paparnya.

Dalam halal bi halal tersebut, Akom juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh jajaran Pejabat Setjen DPR, staf serta mitra kerja jika selama bertugas di DPR RI ada hal yang kurang berkenan. “Saya atas nama Pimpinan DPR RI menyampaikan permohonan maaf besar-besarnya. Maklum sebagai manusia biasa pasti tak pernah luput dari kesalahan,” pungkasnya.

Tingkatkan Solidaritas dan Integritas

Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany dalam sambutannya mengatakan, acara halal bihalal digelar setiap tahun dimaksudkan untuk memperkuat tali silaturahmi tidak



Pimpinan DPR RI halal bihalal dengan karyawan dan karyawati Setjen DPR RI

hanya antar karyawan Setjen DPR RI tetapi juga para karyawan yang mendukung kegiatan Dewan seperti Bank Mandiri, BRI dan BNI, Polda Metro Jaya serta karyawan PT Pos dan para wartawan Koordinatoriat DPR.

“Halal bihalal dilakukan setelah sebulan penuh melakukan ibadah puasa Ramadan. Karena itu forum halal bihalal ini merupakan momen untuk meningkatkan solidaritas dan integritas karyawan/karyawati dalam rangka mendukung kegiatan Dewan serta meminta maaf sebab dalam kerja sama banyak hal yang kurang berkenan atau kesalahan,” ungkap Winpanggilan akrab Sekjen DPR.

Di awal sambutannya, Sekjen DPR RI mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1437 Hijriah kepada seluruh pegawai dan hadirin. “*Taqabbalallahu Minna wa Minkum*, semoga Allah Swt menerima amal ibadah kita sehingga kita bisa menjadi insan yang lebih bersyukur dan kembali kepada fitrah secara lahir dan batin,” ujarnya.

Acara halal bihalal menurutnya didasari oleh bentuk religiusitas dan bentuk syukur setelah melewati bulan Ramadhan. Halal bihalal ini didasari dari religiusitas yang tinggi setelah melakukan ibadah puasa selama satu

bulan hingga tiba Hari Raya Idul Fitri sebagai tanda syukur dan penuh ketakwaan serta ridho Allah SWT setelah bulan Ramadhan.

Sementara itu Ustadz Dadang Holiyulloh yang menyampaikan tauziah dalam acara ini mengupas masalah halal bihalal. Halal bihalal ini adalah produk asli Indonesia, di Arab sendiri halal bihalal tidak ada. Kisahnya KH Wahab Abdulloh pada tahun 1948 dipanggil oleh Presiden Soekarno karena setelah 3 tahun kemerdekaan RI disinyalir terjadi disintegrasi bangsa.

“Beliau diundang Presiden bagaimana mengupayakan persatuan bangsa, sehingga muncul istilah halal bihalal-saling menghalalkan,” ia menambahkan.

Dadang Holiyulloh mengemukakan, dalam menjalankan agama yang paling berat adalah melaksanakan amanah. Amanah menjalankan perintah agama, mumpung masih sehat dan masih kuat kenapa tidak mudik alasannya macet, padahal bertemu dengan orang tua adalah bagian kepentingan kita menjalankan dari amanah Allah.

“Jadi Anggota Dewan ini juga



Tausiah yang dibawakan KH Dadang mengisi acara halal bihalal



Sekjen DPR RI, **Winantuningtyas Titi Swasanany**

foto : runi/iw

foto : jaka/iw



Kita tak usah mengenal lagi prestasi berdasarkan umur dan senioritas, tapi prestasi dan jabatan yang disandang berdasarkan prestasi yang telah dilakukan.



amanah dari Allah SWT. Jadi Sekjen DPR RI juga bentuk amanah. Termasuk jadi ustadz juga amanah,” ujar KH Dadang penuh semangat.

Ia melanjutkan bahwa jadi ustadz itu berat. Sebelumnya dia bercita-cita ingin jadi polisi namun datang ke Komdak diukur tinggi kurang setengah centi. Lantaran sakit hati tidak jadi polisi lalu pulang ke Sukabumi daftar jadi santri keluar jadi kiai, alhamdulillah bisa ceramah di kantor polisi.

Mengutip salah satu ayat Al-quran, boleh jadi yang disangka buruk oleh manusia, tetapi baik menurut Allah.

“Karena itu menjadi anggota Dewan, menjadi Sekjen DPR RI ini adalah aturan Allah. Ini amanah, meski tidak mau akhirnya tetap dipaksa oleh Allah,” pungkasnya. ■

(mp)

Virzha

“DPR Harus Tetap Berdiri Tegak Diatas Kepentingan Rakyat”

DPR RI harus diselamatkan. Itulah ungkapan yang keluar langsung dari artis penyanyi, Virzha. Bersama dengan Rahayu Setiowati dan Runi Sari dari Majalah Parlementaria, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol ini menjelaskan ikhwal ungkapannya itu sesaat sebelum berlangsungnya konser Pancasila

“Menurut saya saat ini tugas DPR RI cukup berat dalam menjalankan fungsinya. Sebagai lembaga politik, tentu banyak kepentingan yang coba menghalangi DPR. Namun saya yakin DPR RI akan mampu mengesampingkan itu semua, dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat luas dan bangsa secara keseluruhan,” papar pemilik nama lengkap Muhammad Devirzha ini.

Dilanjutkannya, jika pun ada beberapa anggota DPR RI yang terlibat permasalahan hukum, pria kelahiran Banda Aceh 12

Virzha

foto : runi/fw

Mei 1990 ini lebih menganggapnya sebagai sebuah oknum. Ia malah melihat lebih banyak anggota DPR RI yang benar-benar berjuang untuk kepentingan masyarakat luas.

“DPR RI itu kan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, jadi memang tugasnya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat luas. Jikapun ada anggota DPR RI yang terlibat masalah hukum itu hanya sebagian kecil saja, kan jumlah anggota DPR RI lebih dari lima ratus orang. Sama seperti lembaga dan instansi lain yang juga ada anggota terkena masalah hukum seperti tersandung korupsi, tapi itu kan oknum. DPR RI pun begitu,” jelasnya.

Oleh karena itulah Virzha menganggap DPR RI harus diselamatkan dari orang-orang seperti itu. DPR RI sebagai pengemban amanah rakyat harus berdiri tegak di atas kepentingan masyarakat. Atas dasar itu jualan, Virzha mengaku belum tertarik untuk terlibat langsung dalam politik praktis, seperti dalam pemilu 2014 lalu dimana beberapa artis didaulat untuk menjadi calon legislatif (caleg) dan calon wakil rakyat.

Meski demikian, sebagai warga negara yang baik, Virzha pun mengaku ikut terlibat dalam kampanye pada pemilu tahun lalu dengan mendukung salah satu kandidat presiden yang diidolakannya. Walau kemudian calon yang diusungnya gagal, baginya tidak masalah. Itulah proses demokrasi yang sebenarnya. Virzha mengaku akan tetap mendukung presiden dan pemerintahan terpilih, sepanjang kebijakan yang dijalankan berpihak pada rakyat luas dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Bermula dari Ajang Indonesian Idol

Sejatinya, sebelum mengikuti ajang pencarian bakat, Indonesian Idol, Virzha sudah mulai menggeluti dunia musik. Bersama teman-temannya di Kota Medan, Sumatera



Virzha

foto: rumi/iw

Utara, ia sempat membentuk sebuah grup musik Indie yang diberi label Hoppipolla. Sayangnya band itu hanya berumur tiga tahun.

Lepas dari grup band tersebut, Virzha pun mendirikan grup band Reborn, sayangnya di band tersebut pun ia hanya mampu bertahan satu tahun. Begitupun ketika ia menggawangi band indie berlabel *Beautiful Monday* pada tahun berikutnya hanya mampu bertahan satu tahun lamanya.

Bosan terus bermain dalam grup band Indie lokal, Virzha pun memberanikan diri mengikuti Indonesian Idol yang pada Januari 2014 lalu itu sempat menggelar audisi di kota Medan. Tujuan utamanya tak lain untuk mencari pengalaman *plus* mengembangkan karir bermusiknya. Pukul dua pagi Virzha sudah mulai mengantre bersama calon peserta audisi lainnya. Baru bertemu dengan juri lokal pada jam tiga sore nya. Satu bulan kemudian ia dinyatakan lolos dan berhak mengikuti audisi

selanjutnya yang dijurikan oleh artis-artis ibukota.

Dewi fortuna agaknya mulai berpihak pada Virzha, ia dinyatakan lolos dan berhak melenggang ke Jakarta untuk mengikuti babak spektakuler ajang tersebut. Lagu (*Everything I Do*), *I Do it For You* yang dinyanyikannya berhasil memikat hati para dewan juri. Ia pun mendapat tiga “yes” dari tiga dewan juri. Babak demi babak ia lakoni hingga sampai di grand final ia harus rela kalah bersaing dengan Nowela dan Husein Alatas.

Namun, meski hanya mampu meraih gelar juara ketiga di ajang Indonesian Idol season ke delapan itu, namun hal itu sudah melambungkan nama Virzha. Terlebih lagi usai ajang itu, Ahmad Dhani menggandengnya menjadi vokalis grup band Mahadewa, menggantikan Judika. Berbagai event pun diikutinya. Bahkan di luar grup band tersebut, Virzha pun mulai merilis single perdananya bertajuk *Aku Lelakimu* yang pernah dipopulerkan Anang Hermansyah. Setelah diputar secara serempak oleh 125 radio di seluruh Indonesia, single perdana Virzha ini sempat bertengger di charts beberapa stasiun radio tersebut. Bahkan, berkat debut perdananya itu ia berhasil meraih penghargaan sebagai pendatang baru terdahsyat di ajang *Dahsyatnya Award 2015* dan nominasi di ajang Anugerah Musik Indonesia untuk beberapa kategori.

Tahun lalu, Virzha mengeluarkan album perdananya yang bertajuk “Satu”. Di album itu, enam buah lagu ia ciptakan sendiri, sementara lima lagu lainnya merupakan tembang lawas yang telah dipopulerkan artis lainnya yang dipilihnya dalam album tersebut. Saat ini ia bertekad akan terus berkarya lewat album-album berikutnya. Oleh karena itu lah ia belum berpikir untuk terlibat dalam panggung politik tanah air. ■

(ayu)



foto : vox.com/iv

Parlemen Turki dan Upaya Penanganan Krisis Pasca Percobaan Kudeta

Oleh:

Irhamna, S.I.P dan Moh. Hasbi Rofiqi, S.IP
Peneliti Center for Election and Political Party (CEPP)

Turki menjadi pusat perhatian dunia dalam beberapa waktu ini, Hal tersebut mulai dengan yang terkait dinamika dari proses pengintegrasian Turki kedalam Uni Eropa, penanganan pengungsi akibat konflik timur tengah sampai yang terakhir percobaan kudeta yang dilakukan oleh beberapa faksi militer di Turki. Melalui tulisan ini, peneliti hendak melihat bagaimana pemerintah Turki dalam hal ini parlemen Turki berperan dalam menyelesaikan permasalahan kudeta tersebut, namun sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai bagaimana sejarah dan konteks politik parlemen Turki.

Turkish Grand National Assembly

Sebagai sebuah republik sekuler, Turki memiliki sejarah keparlemenan yang cukup panjang. Dalam masa Kekaisaran Ottoman, pada 1876, Turki pernah memiliki parlemen pertama meskipun tidak bertahan lama, dan sejarah yang sama kembali

berulang pada 1908. Pascaruntuhnya Kekaisaran Ottoman, baru pada 1923 Turki membentuk sistem parlementer konstitusional yang diikuti dengan pembentukan *Turkish Grand National Assembly* (Esmer dalam Sayari: 2002). Pembentukan *Turkish Grand National Assembly* ini menjadi upaya fundamental dari Mustafa Kemal Atatürk untuk membentuk Republik Turki menggantikan Kekaisaran Ottoman.

Poin menarik lainnya adalah pengakuan terhadap hak suara perempuan (*women suffrage*) pada tahun 1930, dan empat tahun kemudian perempuan diberikan hak politik yang lebih luas berupa hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota Parlemen. Pencapaian dalam empat tahun ini layak untuk diapresiasi mengingat banyak negara lain seperti, Perancis, Belgia, Yunani dan Kanada, masing-masing membutuhkan waktu lebih dari sepuluh tahun untuk mewujudkan hak tersebut bagi perempuan.

Dalam sejarah Republik Turki, Parlemen Turki pernah dibubarkan sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 1960, ketika militer mengambil alih kekuasaan melalui kudeta militer yang bertahan hingga 1961, dan kemudian kudeta berikutnya pada tahun 1980 yang bertahan sampai tahun 1983 (Esmer dalam Sayari: 2002). Dua kudeta tersebut memaksa Turki untuk menyusun kembali konstitusi Republik. Saat ini Turki menggunakan Konstitusi 1982, yang telah mengalami beberapa perubahan penting, terutama masalah-masalah yang terkait dengan keanggotaan dan integrasi Turki ke Uni Eropa.

Parlemen Turki atau *Turkish Grand National Assembly* merupakan lembaga legislatif yang bersifat unikameral. Parlemen Turki terdiri dari 550 anggota. Berdasarkan Pemilu yang diselenggarakan pada 1 November 2015, *Justice and Development Party* (AKP), partai yang didirikan oleh Recep Tayyip Erdoğan ini berhasil meraih 317 kursi, sementara itu suara oposisi



foto: thestar.com/iw

Masyarakat turun ke jalan mengutuk kudeta yang dilakukan militer Turki

diwakili oleh *Republican People's Party* (CHP) sebanyak 133 kursi. Mereka terpilih melalui sistem proporsional dari 85 daerah pemilihan untuk empat tahun masa jabatan. Partai yang berhak mendapatkan kursi di Parlemen harus melewati ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar minimal 10% dari total suara nasional.

Secara umum Parlemen Turki terdiri dari dua komisi, komisi yang bersifat tetap dan sementara. Terdapat 18 komisi yang bersifat tetap dengan ruang lingkup yang spesifik untuk masing-masing komisi, antara lain: Komisi Konstitusi, Komisi Hukum, Komisi Pertahanan Nasional, Komisi Luar Negeri, Komisi Harmonisasi dengan Uni Eropa dan Komisi untuk Persamaan Hak Perempuan dan Laki-laki. Dari 18 komisi tersebut untuk pengalokasian jumlah anggota tergantung kepada seberapa banyak jumlah kursi yang dimiliki oleh partai politik, hanya ada dua komisi yang secara spesifik jumlahnya diatur oleh Konstitusi, yaitu Komisi Perencanaan dan Anggaran sebanyak 40 orang, dan Komisi Badan Usaha Publik sebanyak 35 orang. Sementara itu, untuk komisi yang bersifat sementara (*ad-hoc*) adalah *Parliamentary Inquiry Committee* dan *Parliamentary Investigation Committee* (Turkish Grand National Assembly: 2016).

Parlemen Turki dan Kebijakan Penanganan Kudeta

Pada hari Jum'at, 15 Juli 2016 terjadi upaya kudeta yang dilakukan oleh salah satu faksi Militer Turki terhadap

pemerintahan resmi dibawah Presiden Erdogan, namun pada pelaksanaannya upaya tersebut gagal karena berbagai penyebab, salah satunya adalah tidak adanya dukungan dari masyarakat Turki, bahkan partai oposisi yang selama ini terkenal keras terhadap pemerintahan pun juga menolak aksi kudeta tersebut.

Merespon kejadian luar biasa tersebut pemerintah Turki pun mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan terkendali. Parlemen Turki pun juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendukung hal tersebut, diantaranya, pada keesokan harinya tanggal 16 Juli 2016, Parlemen Turki melakukan Sidang Istimewa yang salah satu hasilnya adalah kesepakatan empat partai parlemen (Partai Keadilan dan Pembangunan, Partai Rakyat Republik, Partai Gerakan Nasionalis, dan Partai Demokrat Rakyat) untuk mendukung langkah pemerintah dalam menangani situasi krisis akibat percobaan kudeta tersebut. Selain itu, parlemen Turki juga bekerja keras untuk membahas berbagai usulan pemerintah terkait dengan pemulihan situasi pasca kudeta di Turki, salah satunya adalah pembahasan tentang kondisi darurat dan usulan penjatuhan hukuman mati bagi pelaku kudeta.

Pada 21 Juli 2016, melalui perdebatan yang panjang antar fraksi di parlemen, akhirnya parlemen Turki menyetujui pelaksanaan keadaan darurat nasional selama tiga bulan yang diajukan oleh pemerintah. Dalam

keadaan darurat tersebut pemerintah Turki mendapatkan legitimasi konstitusional untuk mengeluarkan dekret dan mengeluarkan kebijakan yang memiliki kekuatan hukum tanpa harus melakukan pembahasan atau mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh Parlemen. Sebelumnya, pada kondisi normal, dalam undang-undang Turki mengatur bahwa untuk kebijakan tertentu pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari parlemen.

Saat ini, parlemen Turki sedang menghadapi perbedaan pendapat yang tajam terkait pembahasan usulan pemerintah tentang pelegalan kembali hukuman mati yang telah dicabut pada tahun 2004 karena pemerintah Turki berencana menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa pelaku kudeta. Pencabutan hukuman mati tersebut harus mendapatkan persetujuan parlemen Turki karena kewenangannya untuk membuat undang-undang dan menetapkan konstitusi. Usulan ini mendapat tentangan dari berbagai pihak baik internal Turki maupun dunia internasional terlebih otoritas Uni Eropa (UE) yang bahkan mengancam akan menghambat Turki bergabung dengan UE. Hal tersebut karena UE menganggap hukuman mati melanggar hak asasi manusia.

Selain itu parlemen Turki juga harus dihadapkan dengan pro-kontra yang menganggap bahwa pemerintahan presiden Erdogan mencoba memanfaatkan situasi pasca percobaan kudeta ini untuk memperkuat posisi politiknya, sehingga beberapa kebijakan pemerintah dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang selama ini dijunjung oleh Turki, mulai dari usulan pelegalan kembali hukuman mati sampai dengan upaya perubahan konstitusi. Berdasarkan penjelasan di atas, parlemen Turki mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya pengembalian kondisi Turki pasca percobaan kudeta. Peran yang dimaksud adalah selain mengupayakan Turki kembali kondusif dan terkendali, Parlemen Turki juga diharapkan mampu menjadi penyeimbang pemerintah melalui kewenangan konstitusionalnya, sehingga nilai-nilai demokrasi di Turki bisa tetap dipertahankan. ■



foto : kresno/iw

Usulkan Kapolri Berkumis

Rapat Paripurna yang mengagendakan pengesahan Calon Kapolri Komjen Tito Karnavian menjadi Kapolri definitif yang semula berlangsung khidmat dan serius, mendadak menjadi cair dan diwarnai senyum dan tawa. Perubahan suasana ini lantaran interupsi anggota Dewan Michael Wattimena yang menyampaikan usulan cukup unik.

Bukan soal disiplin, kinerja dan citra polisi, melainkan usulan agar Tito memelihara kumis, bukan seperti sekarang yang halus mulus tanpa rambut diatas bibirnya. Kata Michael, tiga Kapolri terdahulu berkumis tebal, maukah Kapolri baru Tito Karnavian juga memelihara kumis.

“Ini usul saja, hanya usul pribadi. Tiga periode dari kepemimpinan Kapolri, itu mulai dari Pak Timur Pradopo, sampai dengan Pak Badrudin Haiti, itu semuanya berkumis. Harapan saya Pak Tito juga berkumis,” pinta Michael, politisi Partai Demokrat yang juga memelihara kumis tebal. Sontak permintaan itu disambut gelak tawa oleh para Anggota Dewan, awak

media dan publik yang berada di balkon Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II.

Dalam istilah panyandra Jawa, yakni pengetahuan untuk mendeteksi karakter seseorang berdasarkan performa fisik, berkumis tebal atau dalam bahasa Jawa *bregos* bagi seorang laki-laki dewasa, ibarat ulat bulu yang berwarna hitam, bergerak sedikit demi sedikit bisa membuat yang melihat menjadi berdiri bulu roma.

Berkumis tebal menurut beberapa kalangan adalah tipe ideal lelaki pada umumnya. Kumis bisa mengesankan seorang laki-laki jantan, *macho*, berwibawa dan tangguh. Bahkan ada yang percaya memiliki kumis tebal bisa membawa tuah kewibawaan.

Untuk mencairkan suasana rapat yang selalu formal, Michael Wattimena berkelakar, dengan kumis syukur-syukur bisa meringankan masalah yang akan dihadapinya saat menjabat sebagai Kapolri.

“Supaya kelihatanya agak *smile*, dan dengan kondisi *smile* itu saja bisa dapat mengobati segala macam persoalan internal yang ada di jajaran Polri, maupun keamanan dan ketertiban masyarakat,” guraunya. ■

(eko/mp)

UU Berjalan dan Juru Kunci Komisi

Karena senioritas dan pengalamannya, anggota Komisi VI DPR RI Irmadi Lubis mengupas secara komprehensif undang-undang tentang Kekayaan Negara dalam raker dengan Menteri Keuangan mewakili Meneg. BUMN belum lama ini.

Sampai akhirnya Ketua Komisi VI, Teguh Juwarno menjulukinya sebagai Juru Kunci Komisi. Karena penguasaannya yang matang tentang UU yang ada dalam ruang lingkup Komisi VI dia dijuluki juga sebagai Undang-undang Berjalan.

“Pak Menteri hampir semua undang-undang yang dibahas di Komisi VI Pak Irmadi selalu terlibat. Jadi kami menyebut beliau ini undang-undang berjalan,” kelakar Teguh disambut gelak tawa para khalayak hadirin. Bahkan sebelum Komisi VI ada, Irmadi sudah ada lebih dulu. Pecah tawa pun tak tertahankan, sehingga ruang sidang menjadi ramai dengan gemuruh tawa.

Sebelumnya politisi senior PDI-P Irmadi menjelaskan tentang konstruksi undang-undang tentang

Kekayaan Negara. Menurutnya dalam UU yang berlaku, Presiden RI memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari pengelolaan pemerintahan. “Jadi konstruksinya begini, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan,” papar Irmadi.

Sedangkan Menteri Keuangan, dalam Undang-undang disebutkan, sebagai Chief Financial Operational of the State (CFO). Adapun menteri-menteri pembantu Presiden dan Kepala Lembaga Pemerintahan yang lain-lainnya adalah *Chief Operational Officer (CEO)*.

“Kekuasaan di bidang keuangan ada di dalam Undang-undang No 17 tahun 2003 terutama di pasal 6 ayat 1. Kemudian di pasal 2 H dikuasakan kepada Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam hal kepemilikan pada kekayaan negara yang dipisahkan,” ungkap dia.

Dia melanjutkan, oleh karena itu di pasal 24 Undang-undang No 17 dikatakan, Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan negara, berupa



foto : iwan armanias/iw

Anggota Komisi VI DPR RI, **Irmadi Lubis**

BUMN. Dia mengharapkan ada keserasian dalam pelaksanaan aturan.

“Pak Menteri kita bereskan status ini, jangan sampai menteri BUMN sebagai pemegang saham. Menteri keuangan adalah CFO RI dan BUMN bagian dari keuangan negara,” harapnya. Benar-benar hafal dan menguasai undang-undang. ■



foto : jaka/iw

Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Keuangan

Bung PARLE

MACET...

IYA...GARA-GARA
MACET DI ARUS MUDIK
KEMARIN NAMA BREBES
MENDUNIA
YA ...

BETUL...
ITU KEMACETAN
YANG FENOMENAL,
LUAR BIASA DAN
BANYAK MEMAKAN
KORBAN JIWA

PADAHAL KEJADIAN ITU
SUDAH DIPREDIKSI SEBELUMNYA,
KARENA KOMISI V DPR TELAH
MELAKUKAN PENYISIRAN ATAS
JALUR MUDIK SEPANJANG
PANTURA DAN BREBES
TIMUR

NYATANYA...PENGEMUDI
SEPERTI TERPERANGKAP DALAM
JEBAKAN "TOL". MACET
PARAH PULUHAN JAM...

PADA SAAT ITU
SEMUA STAKEHOLDER DARI
KEMENHUB, KORLANTAS DAN
PENGELOLA JALAN TOL
MENYAKINI BAHWA ARUS MUDIK
AKAN BAIK-BAIK SAJA

SALAH PREDIKSI,
MINIM KOORDINASI DAN TAK
ADA REKAYASA LALU LINTAS YANG
EFEKTIF ITU PENYEBABNYA...

SATU LAGI...
MASYARAKAT KITA
SELALU MUDAH TERGODA
DAN MENCOBA YANG BARU
TERMASUK JALAN
TOL...

YA...SEMOGA SAJA
INI JADI PEMBELAJARAN
BERHARGA BAGI PEMERINTAH,
AGAR KEJADIAN SEPERTI INI
TAK AKAN TERULANG LAGI
DI TAHUN TAHUN KE
DEPAN YA BUNG...